



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Melalui Penajaman Alokasi Anggaran di Nusa Tenggara Barat

Bambang Widiyanto

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan
Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif TNP2K



Maret 2017

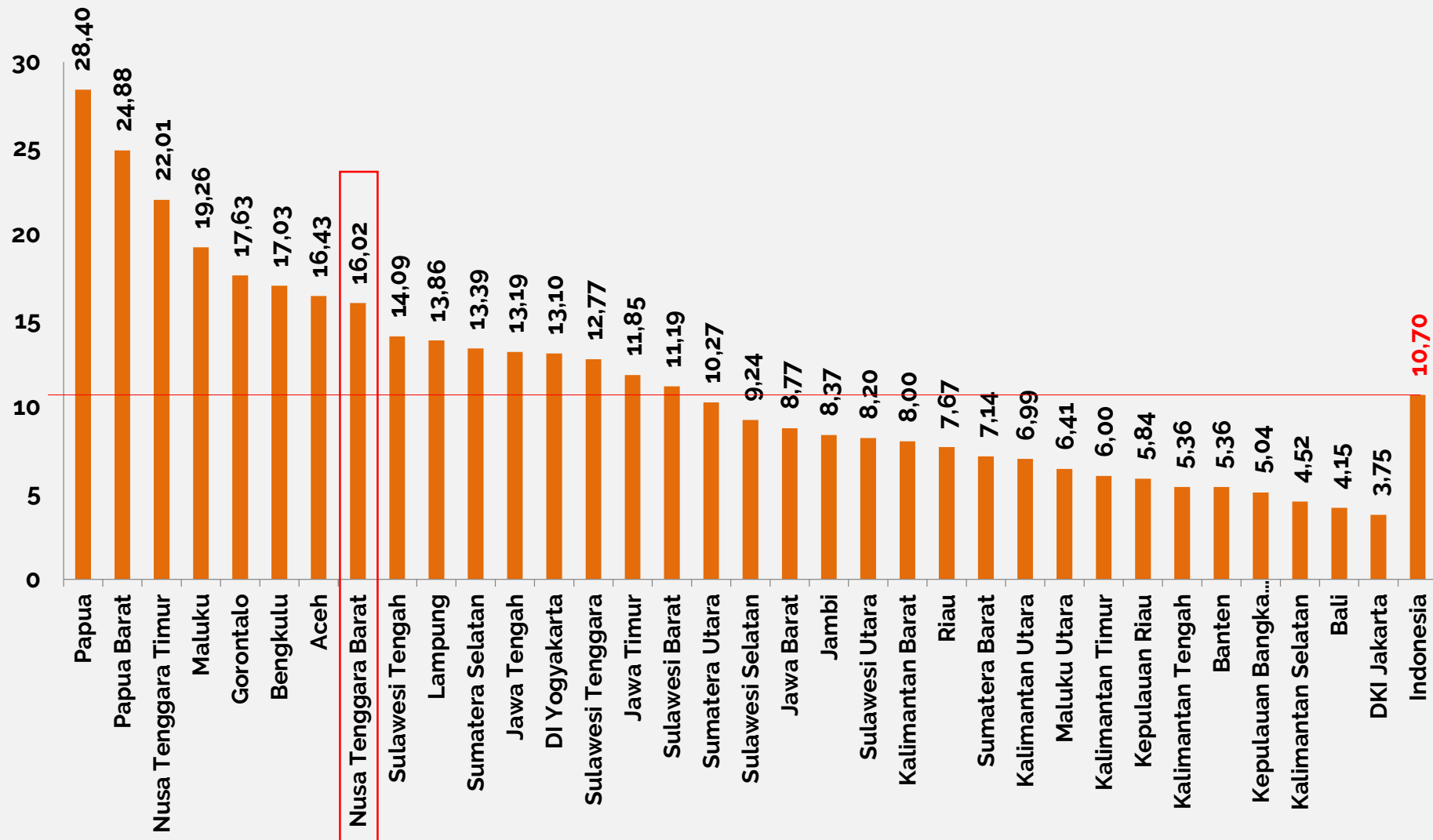
Kemiskinan

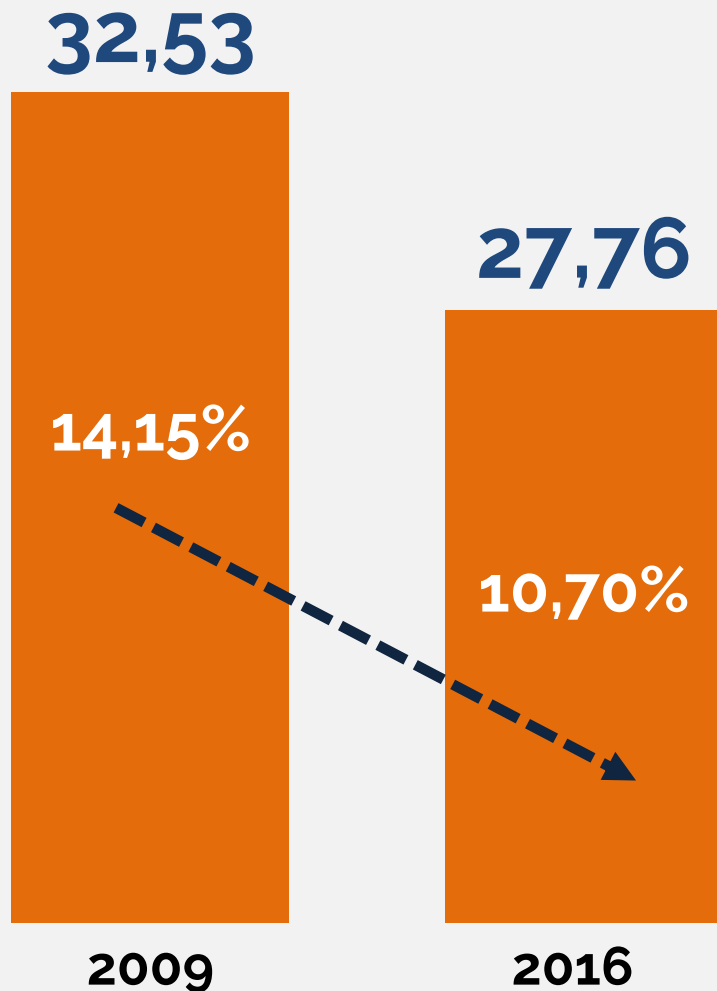
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional, 1970-2016



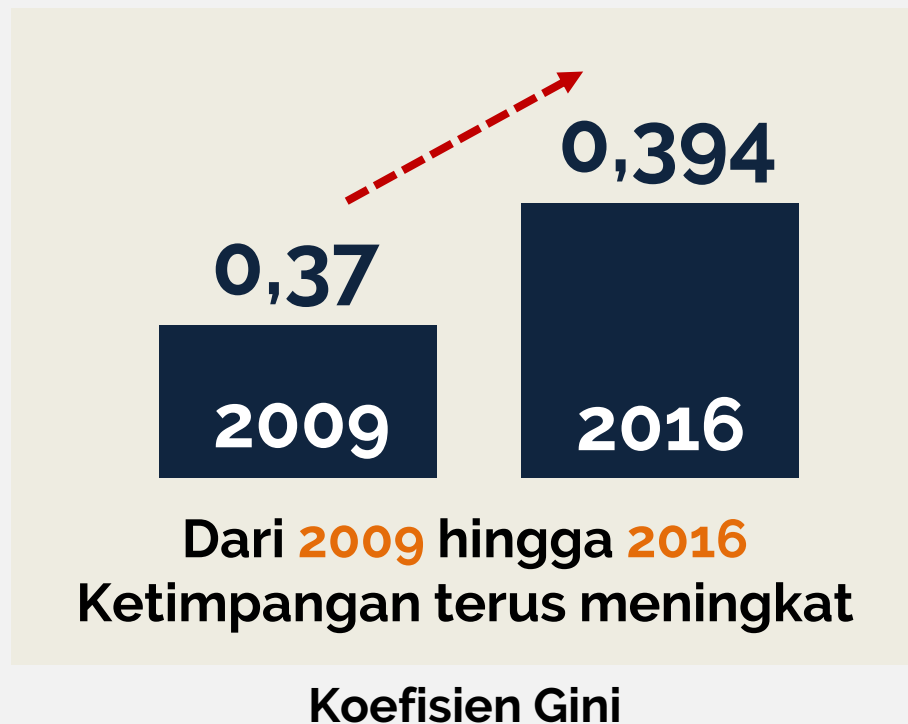
Keterangan: Sejak tahun 1996 menggunakan dasar perhitungan yang disempurnakan

Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%) September 2016





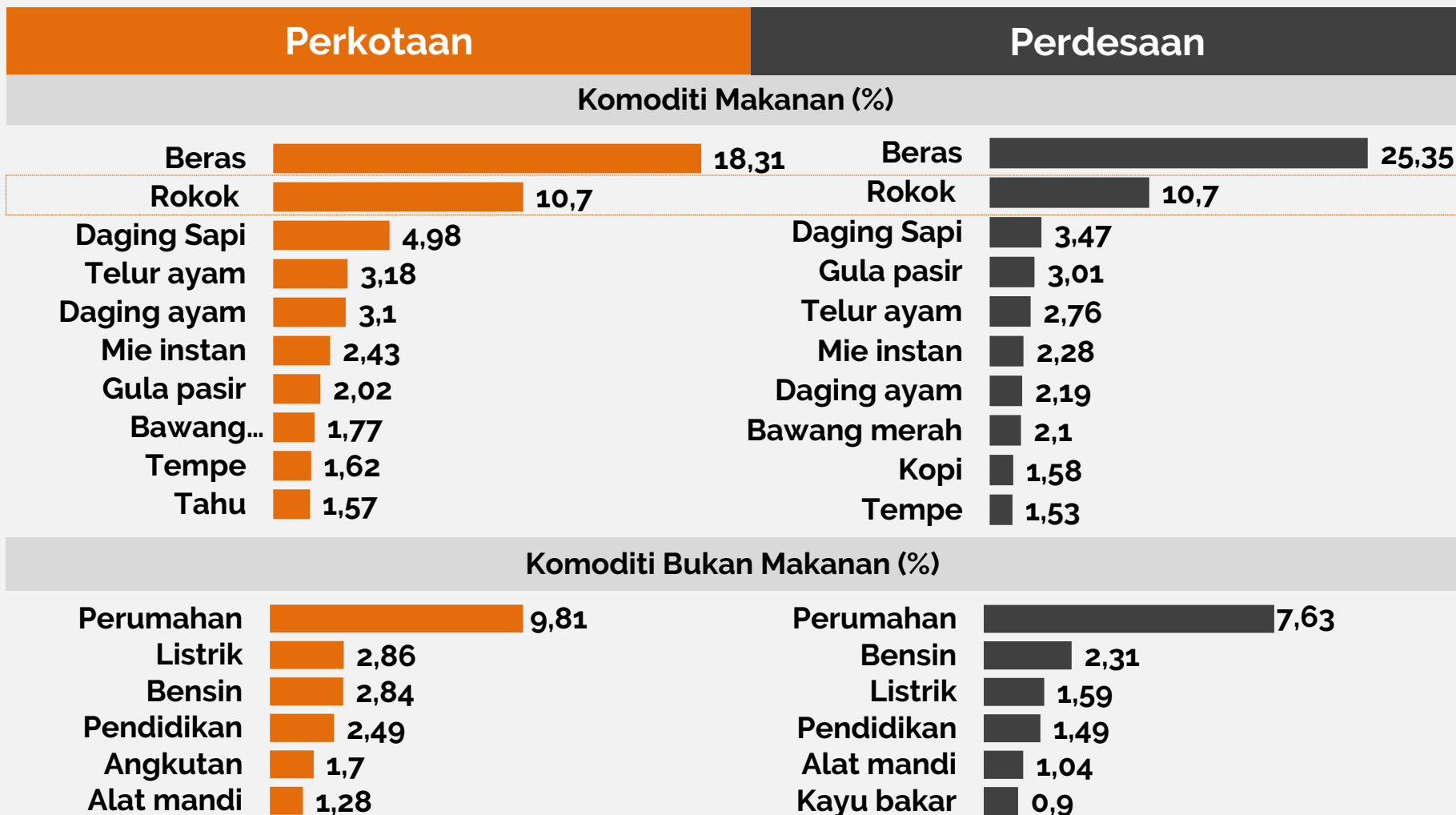
Penduduk miskin berkurang sebesar **4,77 juta** selama **6 tahun**, tetapi kesenjangan meningkat



- Jumlah penduduk miskin (juta)
- Tingkat kemiskinan (%)

Komoditas yang Memberi Sumbangan Terbesar Terhadap Garis Kemiskinan **September 2016**

Rokok Penyumbang Terbesar Kedua Setelah Beras



Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Perubahan Jumlah Penduduk Miskin

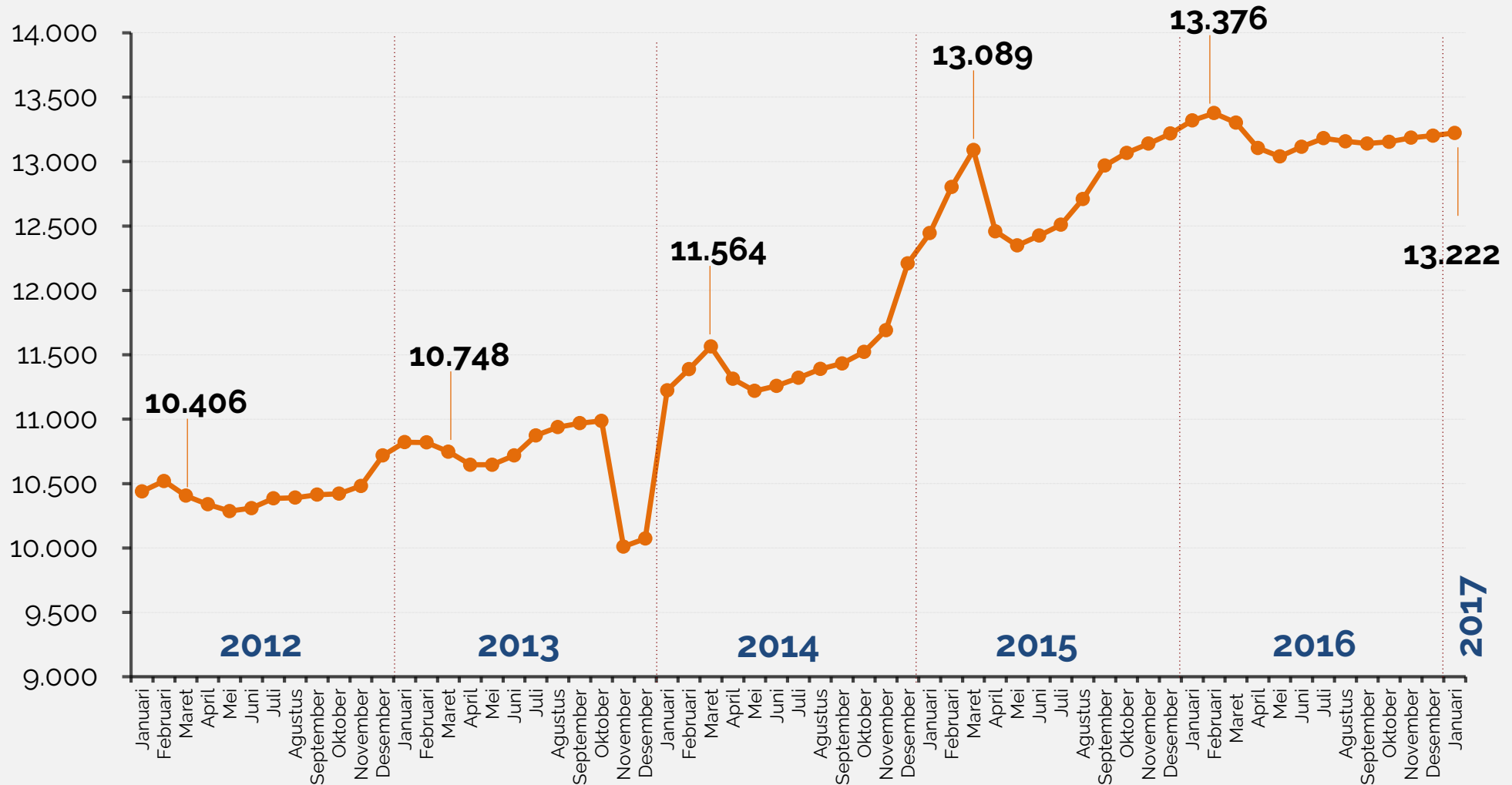
Kenaikan Harga Beras	Peningkatan Tingkat Kemiskinan
10 %	0.8 %
20 %	1.6 %
30 %	2.4 %
40 %	3.2 %

CATATAN:

- 1) Bobot bahan makanan dalam garis kemiskinan sekitar **65%**
- 2) Bobot konsumsi beras dalam garis kemiskinan sekitar **26%**
- 3) Diasumsikan pertumbuhan pengeluaran per kapita riil **5%**.

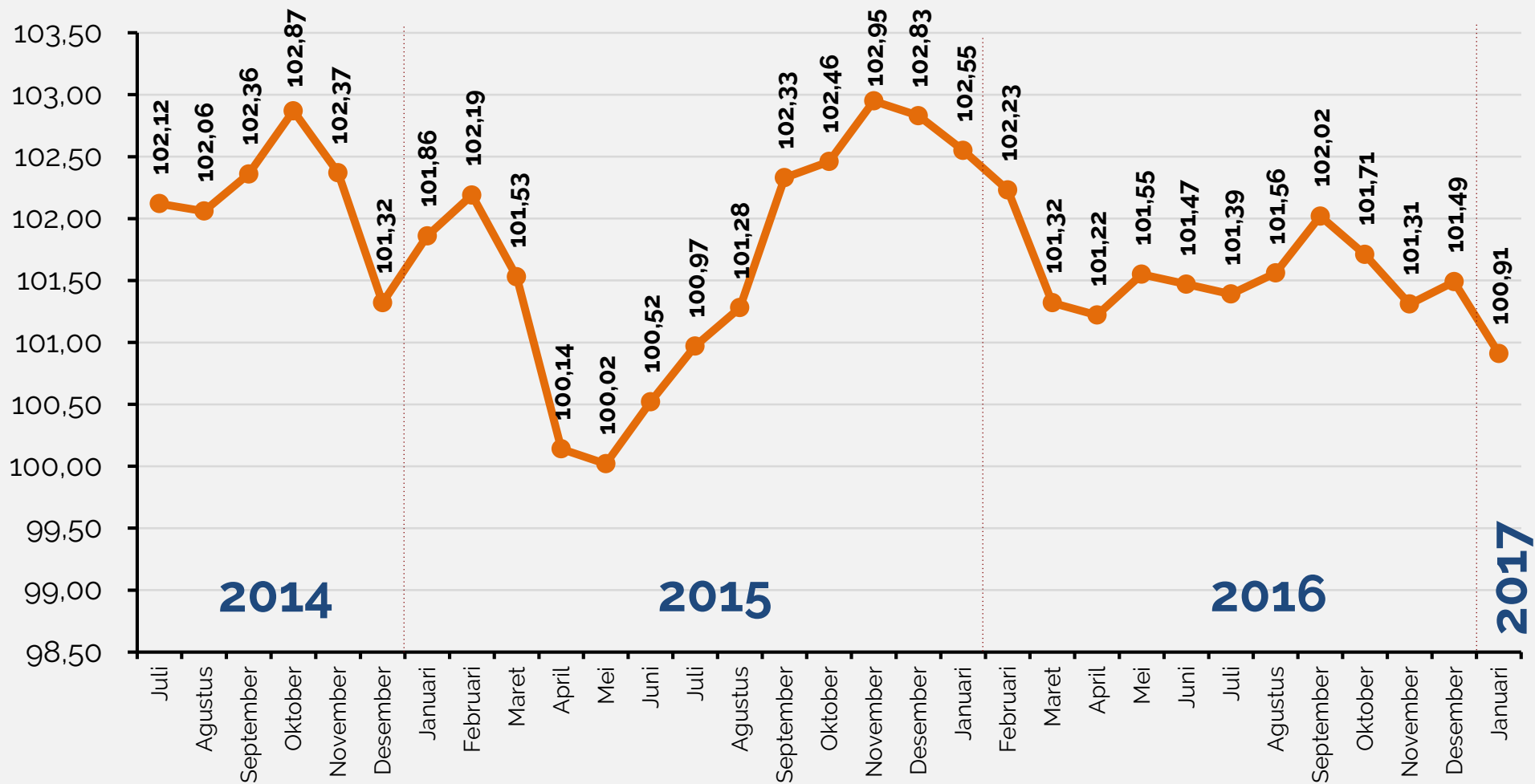
Rata-Rata Harga Eceran Beras/Kg

Januari 2012 – Januari 2017 (Rupiah)



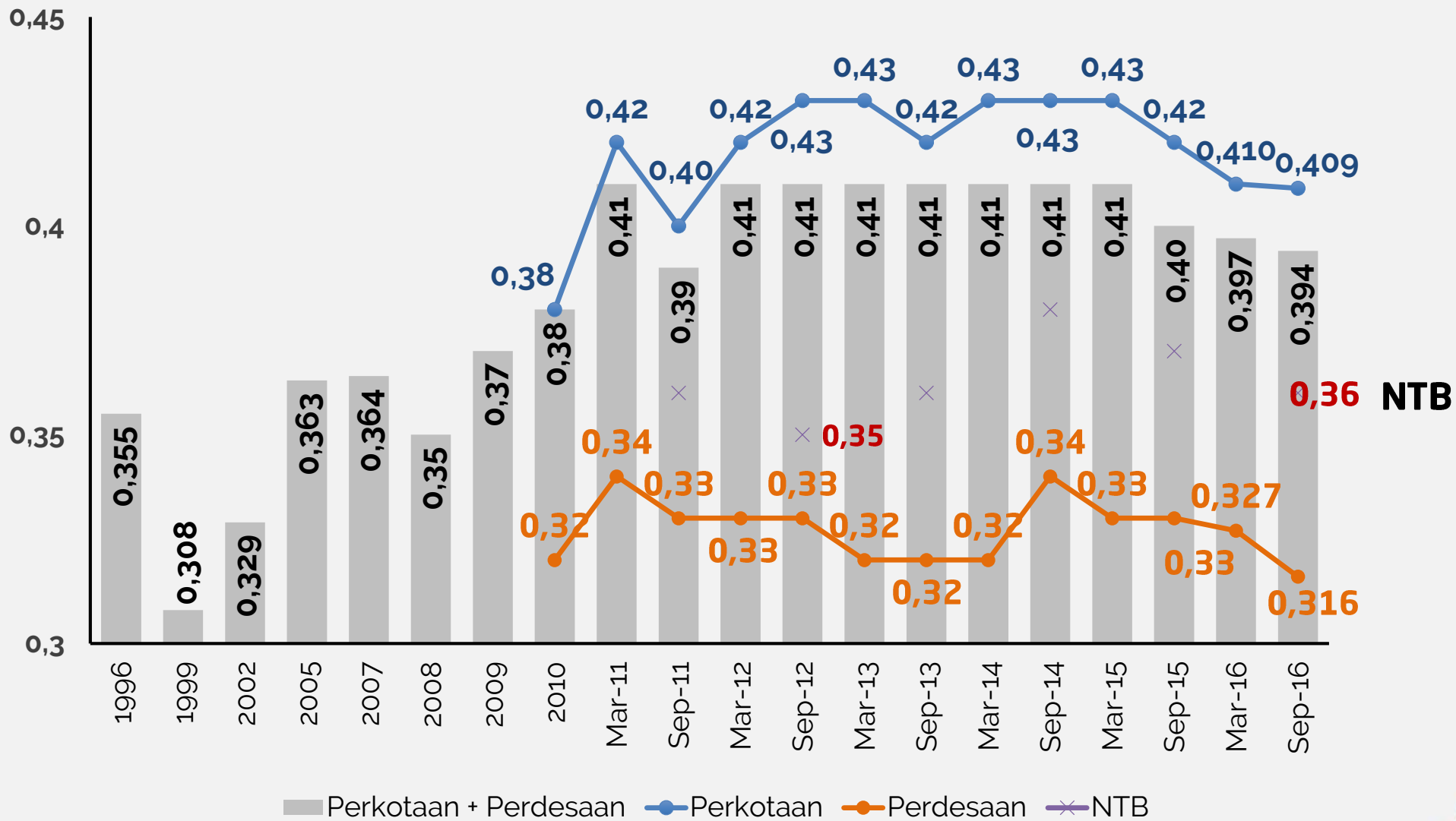
Nilai Tukar Petani (NTP)

Juli 2014 – Januari 2017 (2012=100)



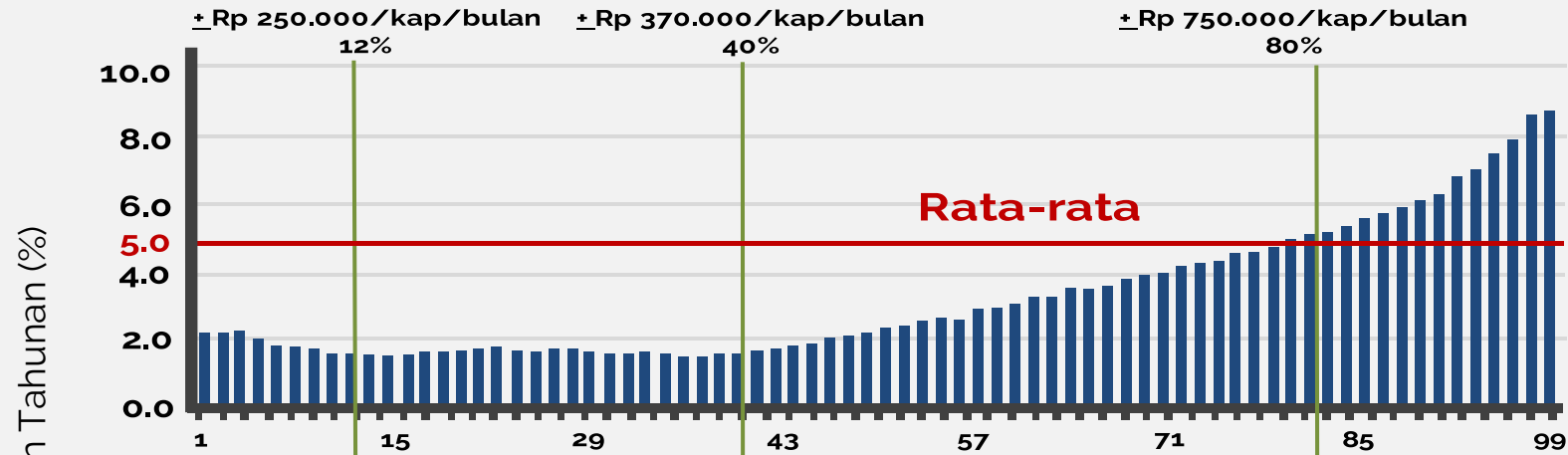
Ketimpangan

Rasio Gini Nasional Perkotaan & Perdesaan 1996 -2016

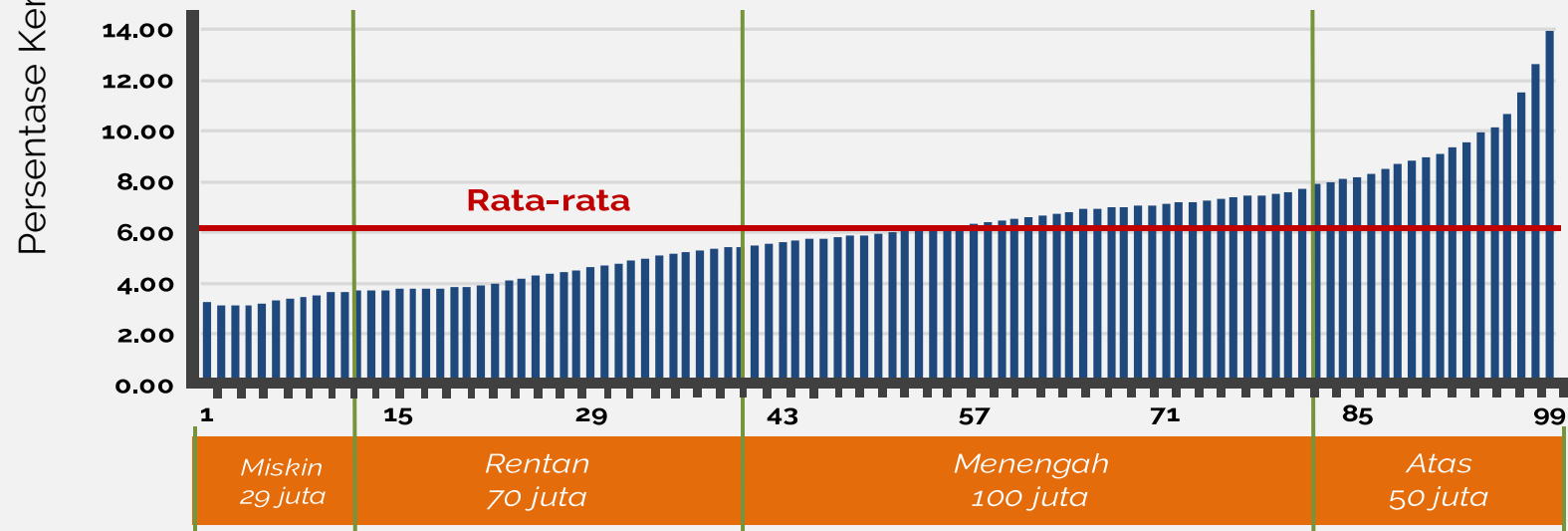


Pertumbuhan konsumsi kelompok miskin mengalami peningkatan, tapi pertumbuhan konsumsi kelompok kaya juga terus meningkat menyebabkan meningkatnya ketimpangan

(2008-2012)



(2009-2015)



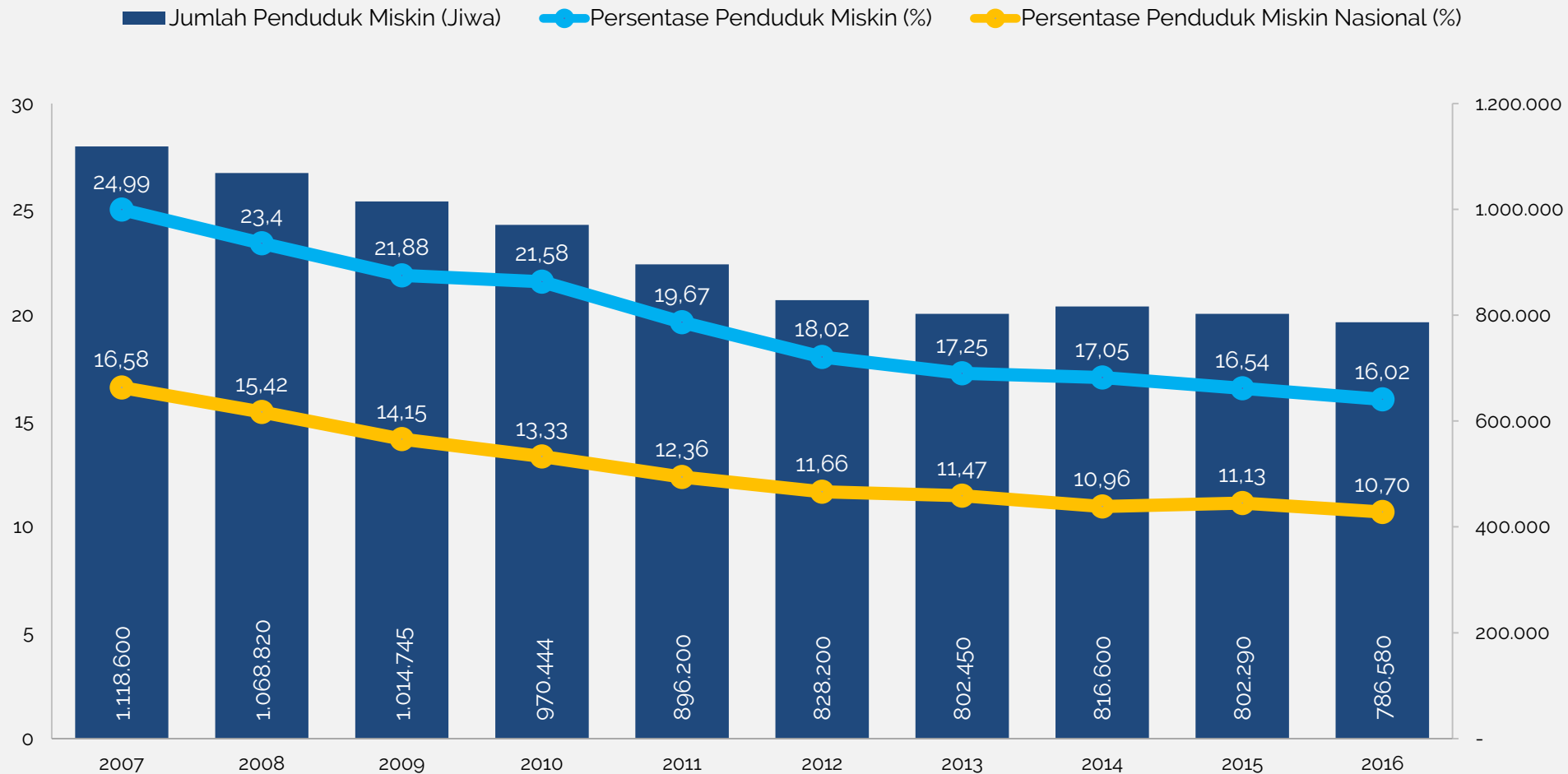
Pendorong Utama Ketimpangan

1. **Ketimpangan sejak awal kehidupan** dalam hal peluang dan akses pelayanan dasar (Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur Dasar seperti Air Bersih, Sanitasi, dan Listrik)
2. **Ketimpangan kualitas pekerjaan** dimana bagi mereka yang terampil memperoleh penghasilan yang tinggi, sementara mereka yang kurang terampil terjebak dalam pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah
3. **Tingginya konsentrasi kekayaan** pada sekelompok kecil masyarakat
4. **Rendahnya kemampuan menghadapi guncangan** karena tidak semua memiliki perlindungan dan jaminan sosial (Guncangan dapat berupa guncangan ekonomi, kesehatan, dan bencana alam)

Pemanfaatan Data untuk Penetapan Prioritas dan Penajaman Alokasi Anggaran

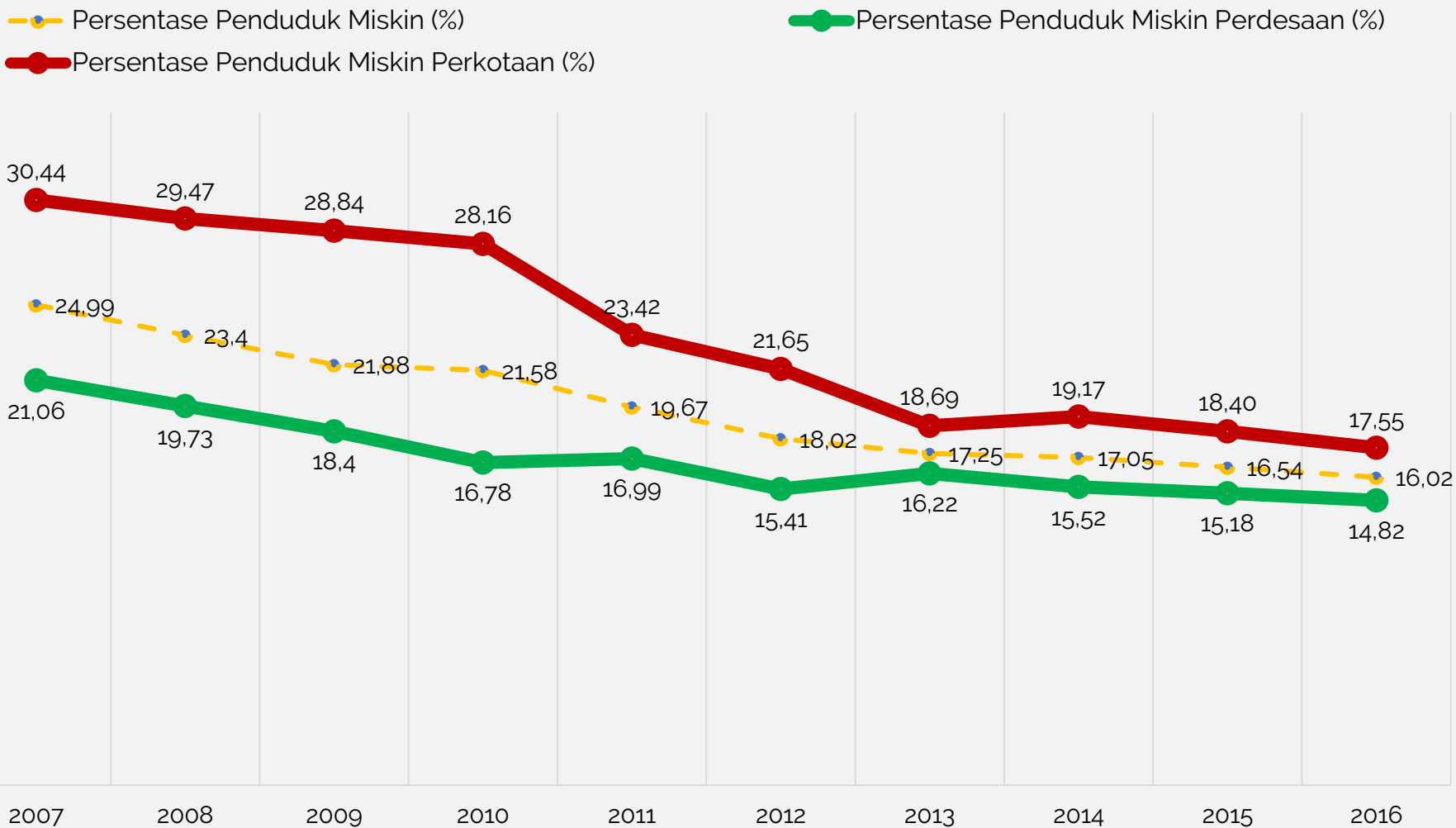
Kemiskinan

Perkembangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional, 2007-2016



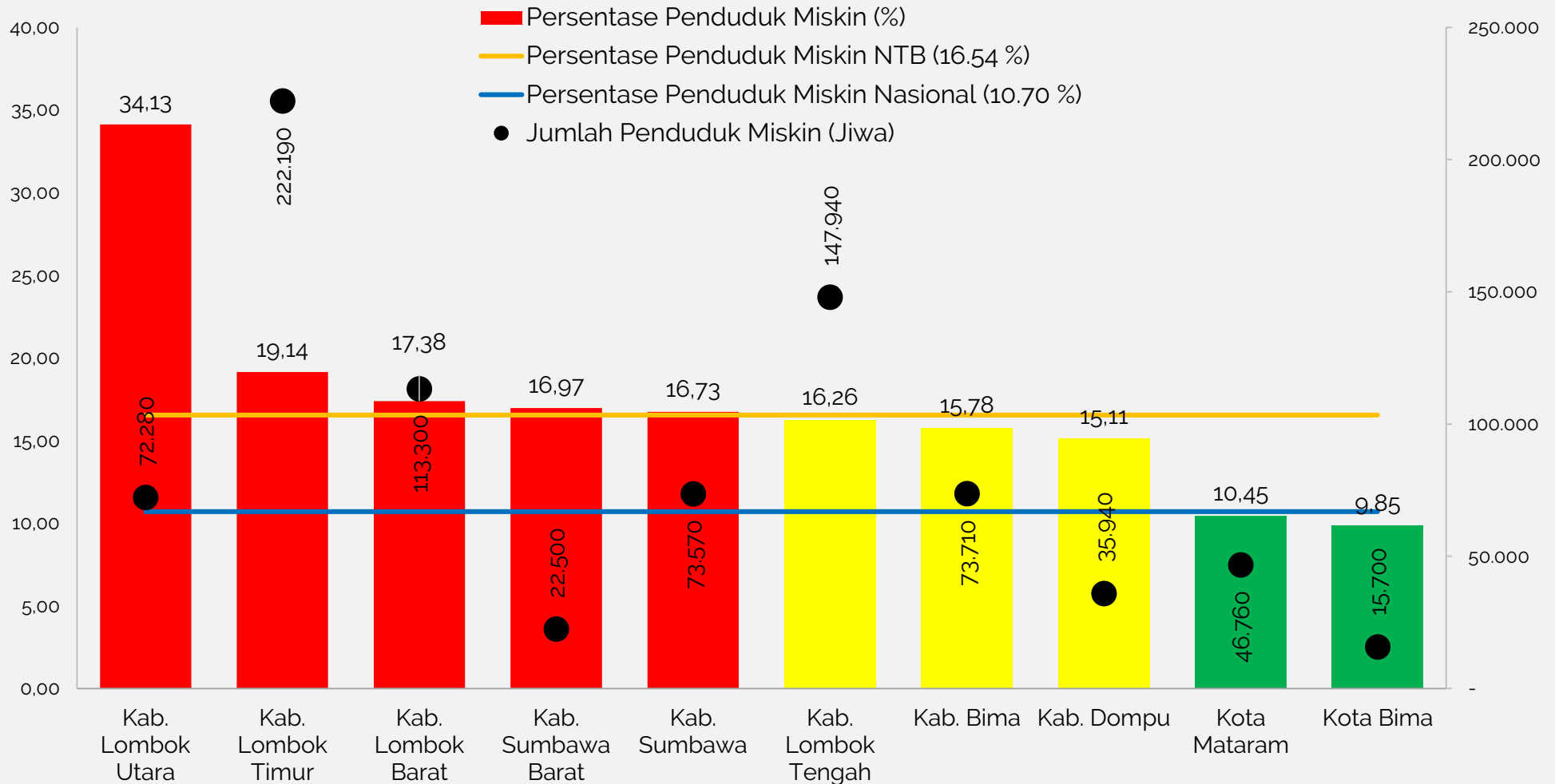
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, grafik diolah

Perkembangan Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2007-2016



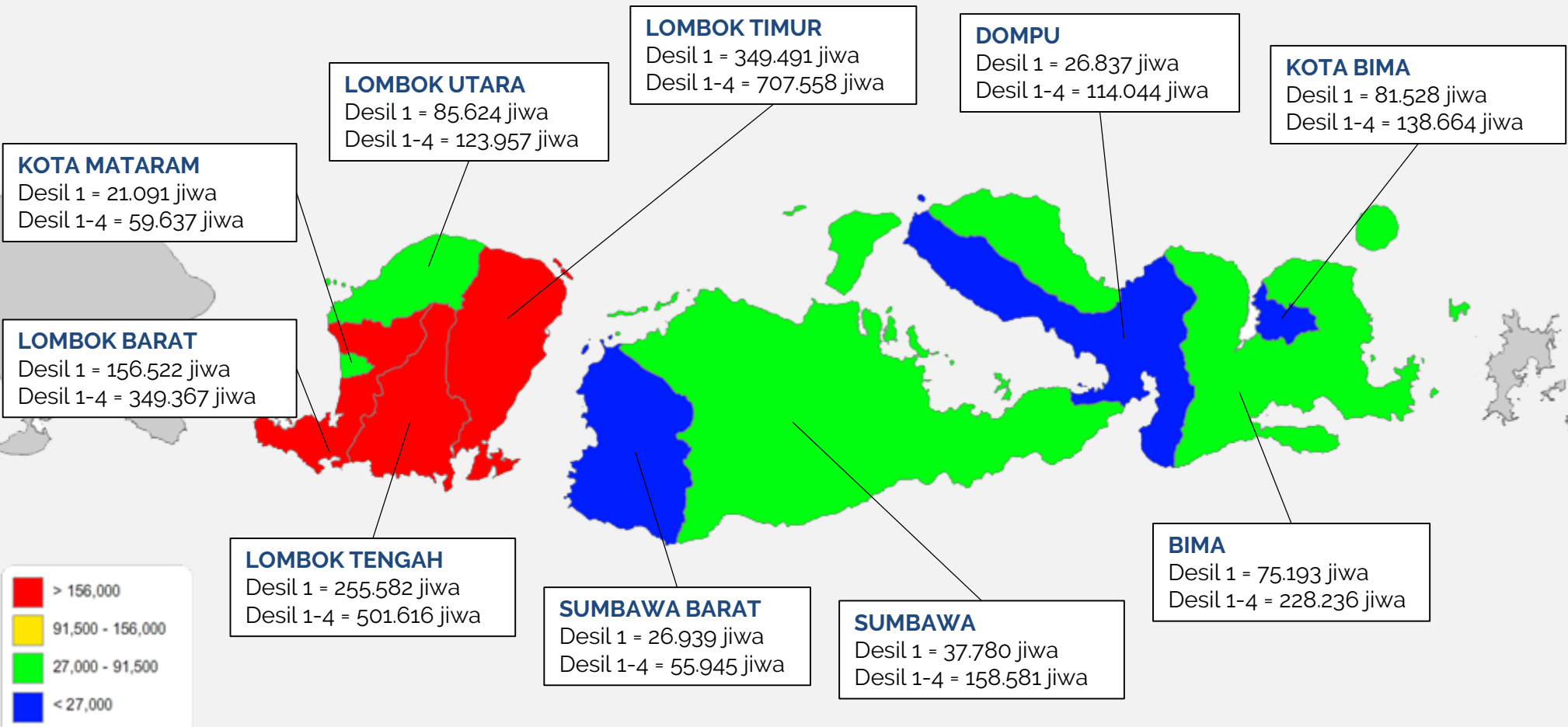
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, grafik diolah

Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

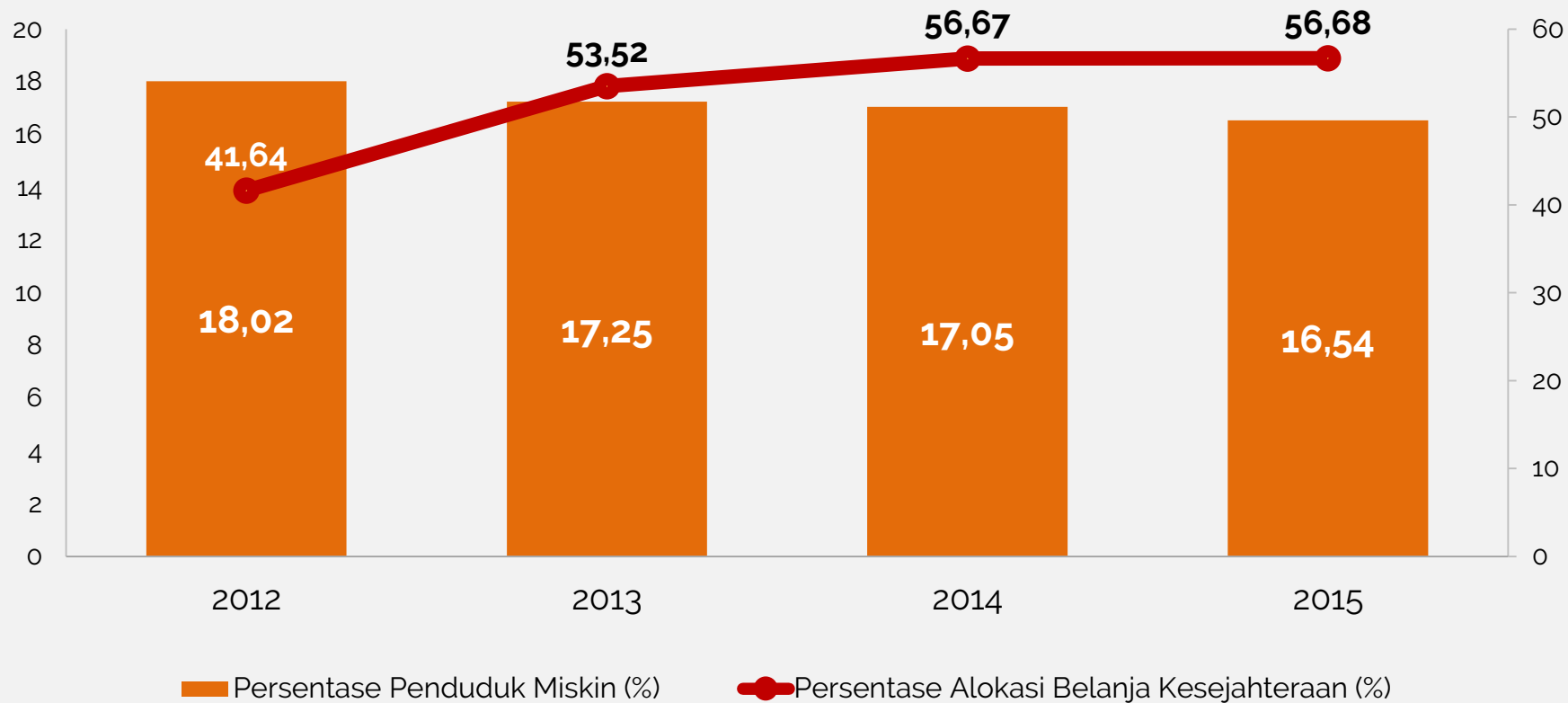


Sumber: Badan Pusat Statistik RI, grafik diolah

Jumlah Penduduk Desil 1-4 Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015



Relevansi Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dengan Persentase Alokasi Belanja Kesejahteraan (Prov+Kab/Kota) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2012-2015



Sumber: BPS dan Kemenkeu RI (DJPK), grafik diolah

Alokasi Belanja Kesejahteraan = Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan + Kesehatan + Perumahan dan Fasilitas Umum + Perlindungan Sosial

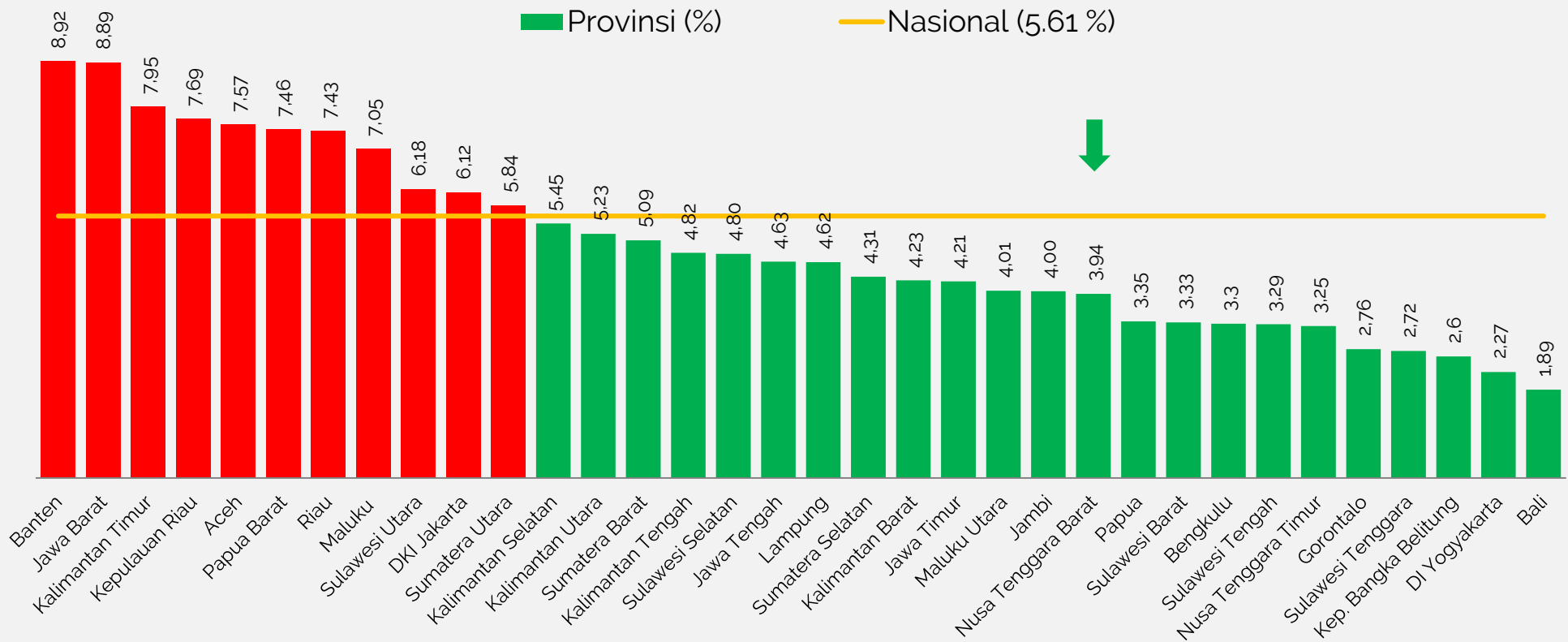
Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Alokasi Belanja Kesejahteraan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015



Sumber: BPS dan Kemenkeu RI (DJPK), grafik diolah

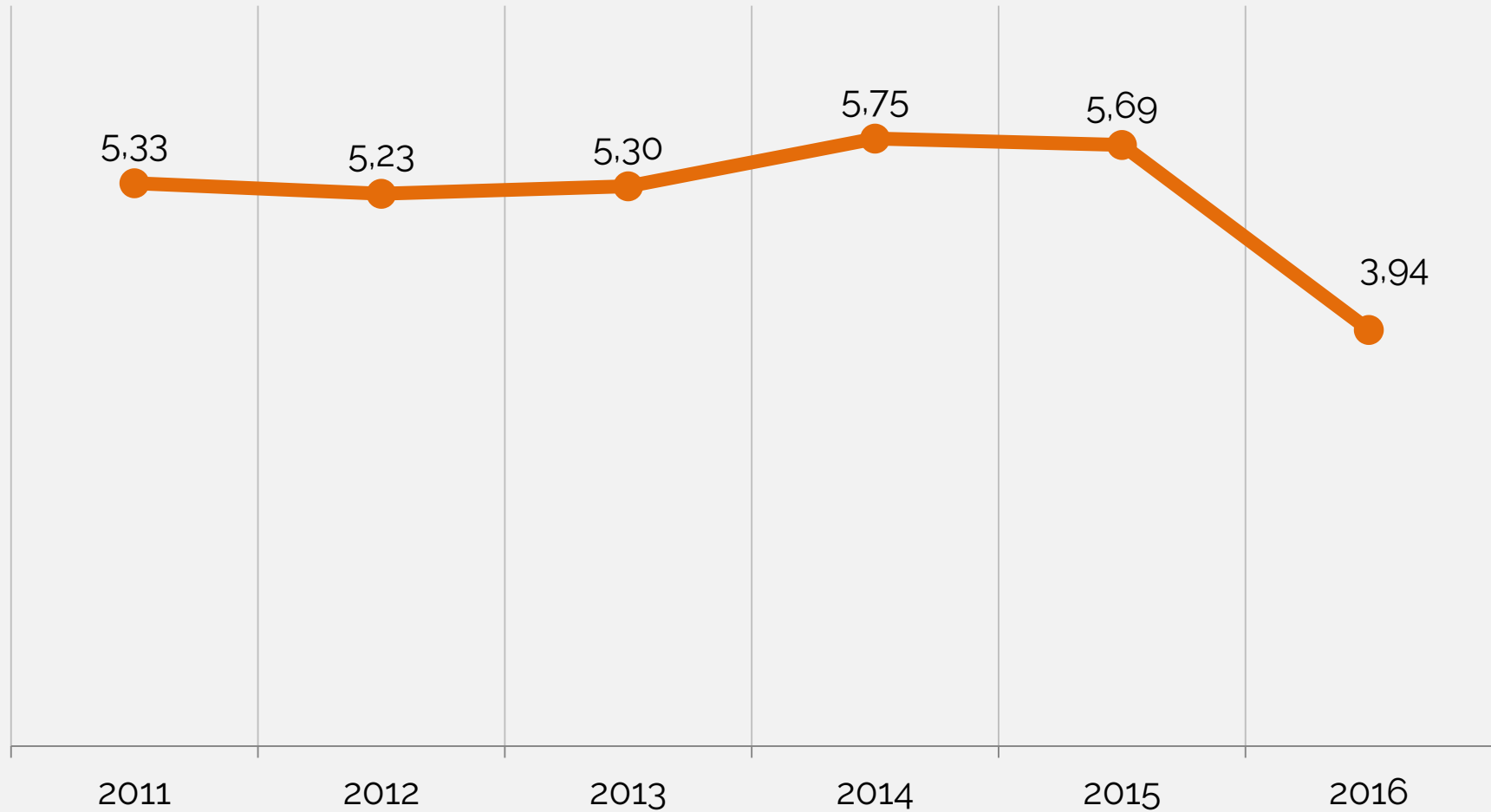
Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Indonesia menurut Kabupaten/Kota, 2016



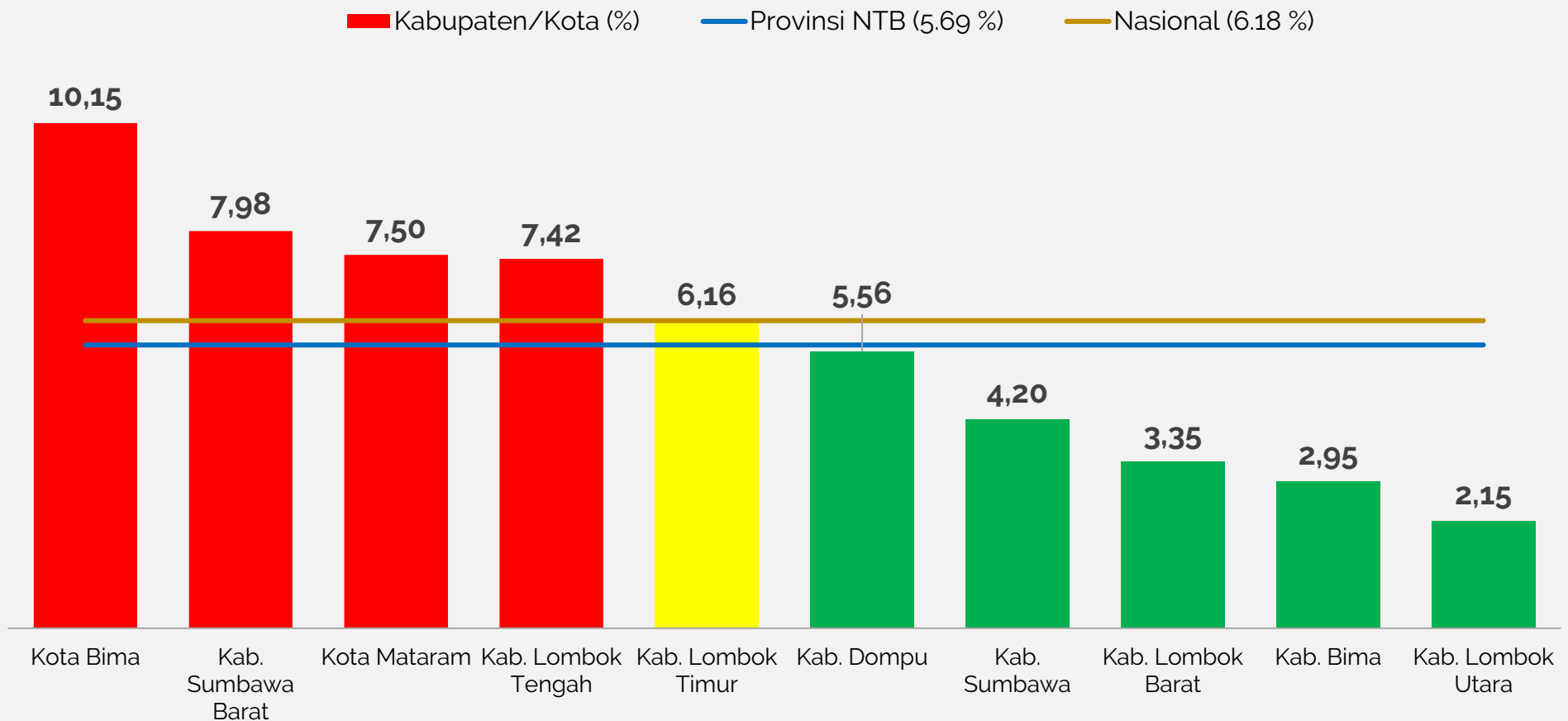
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, grafik diolah

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2011 - 2016



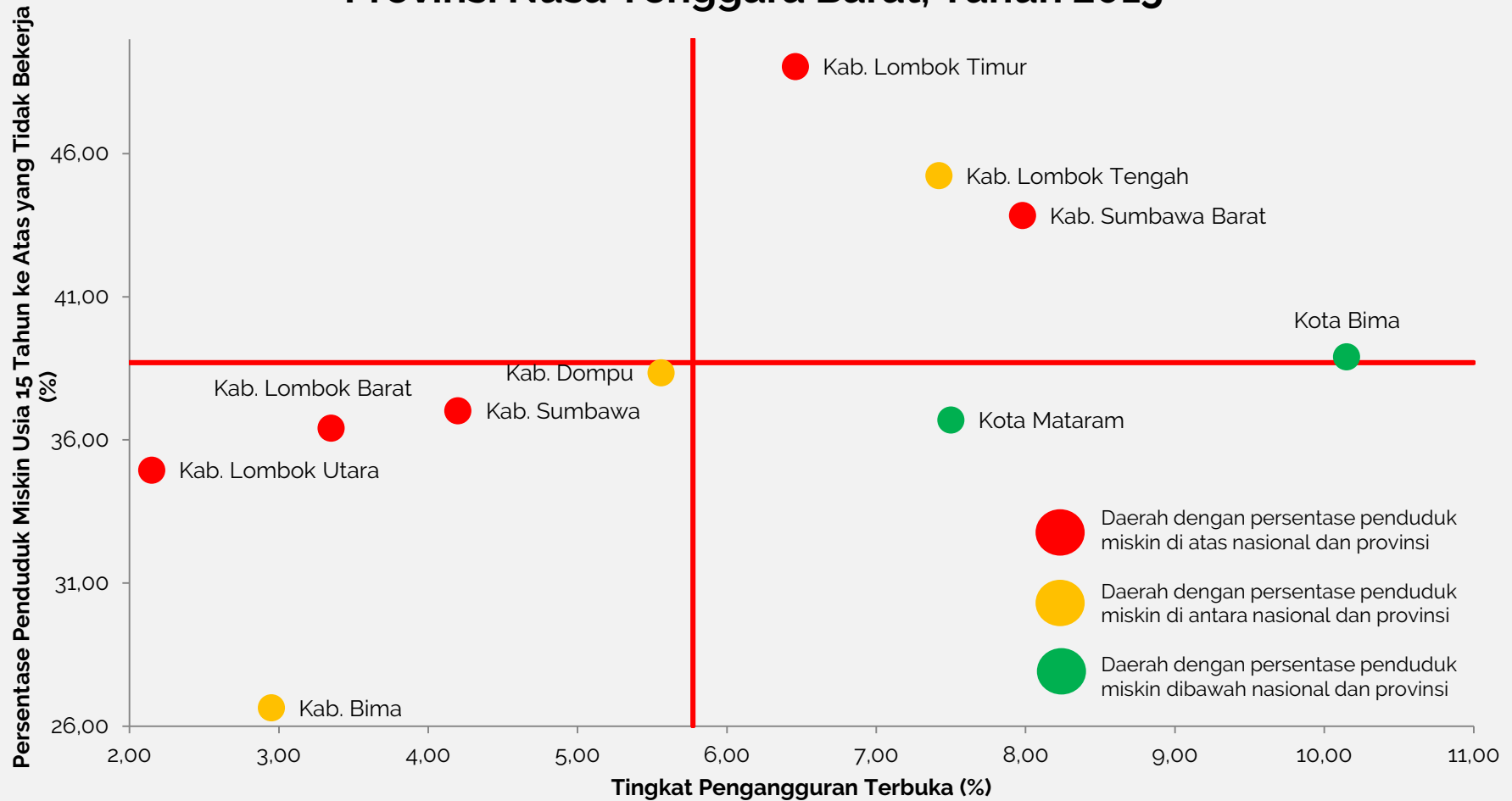
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, grafik diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015



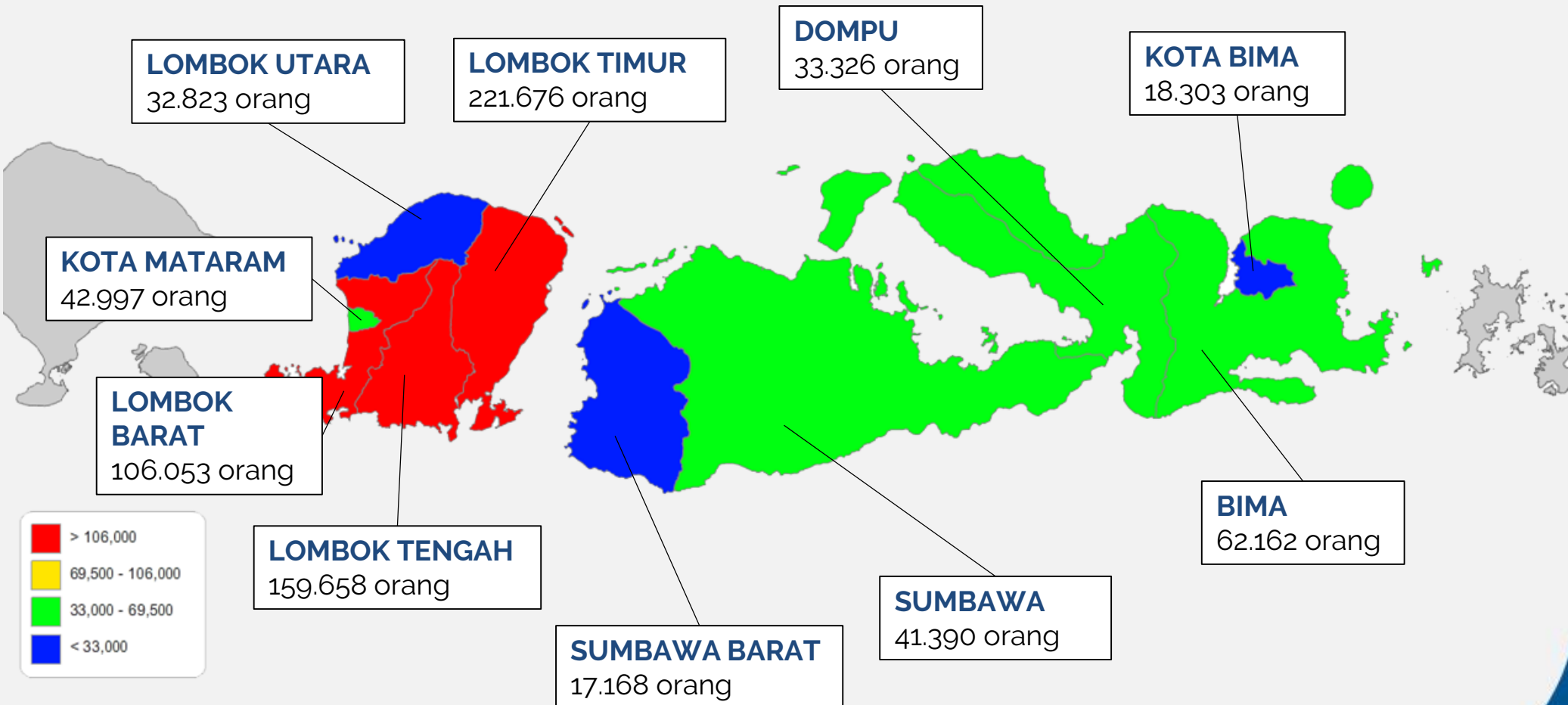
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, grafik diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) VS Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Bekerja (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2015

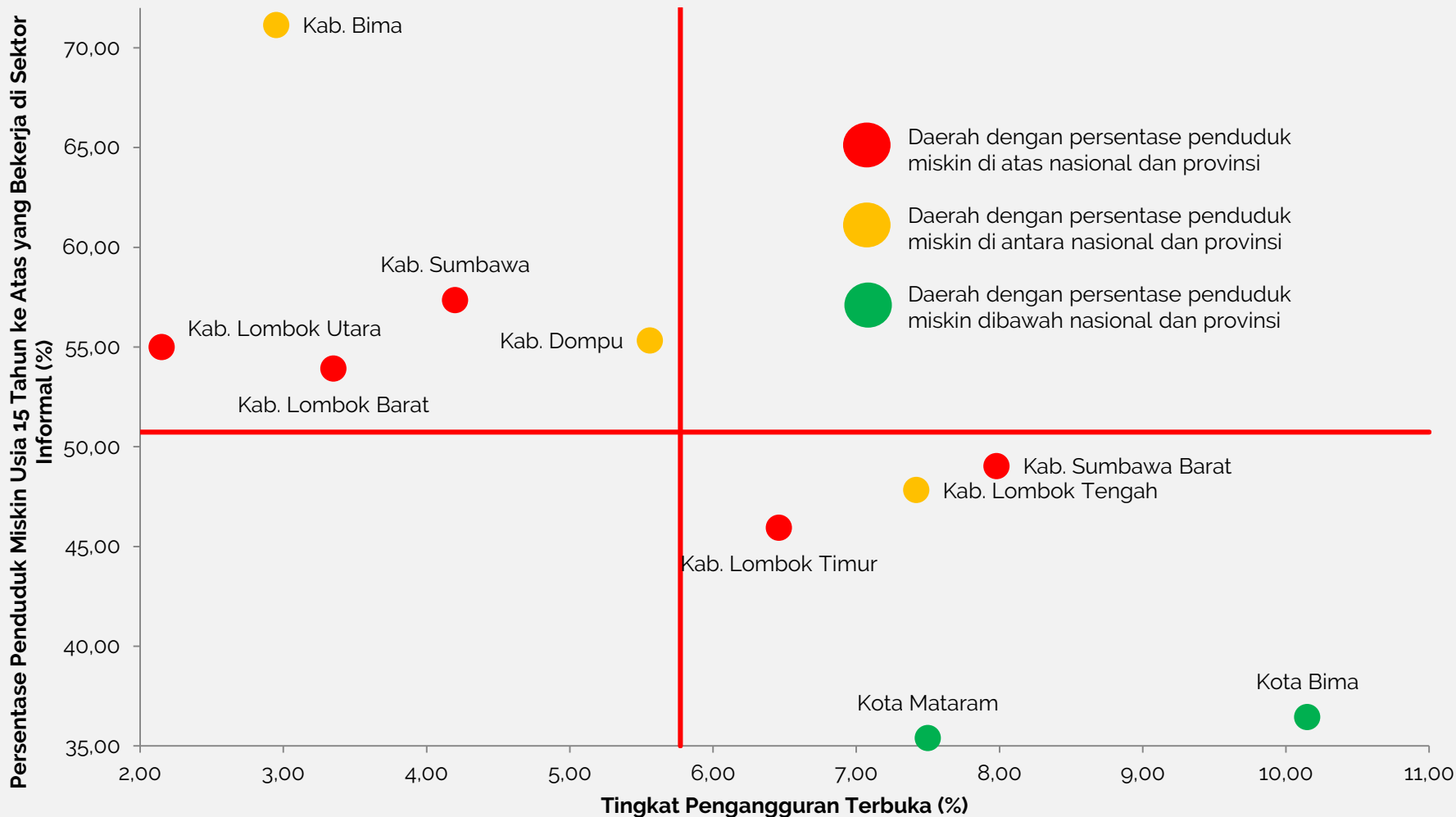


Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, grafik diolah

Penduduk Desil 1-4 Usia 15-59 Tahun yang Tidak Bekerja Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

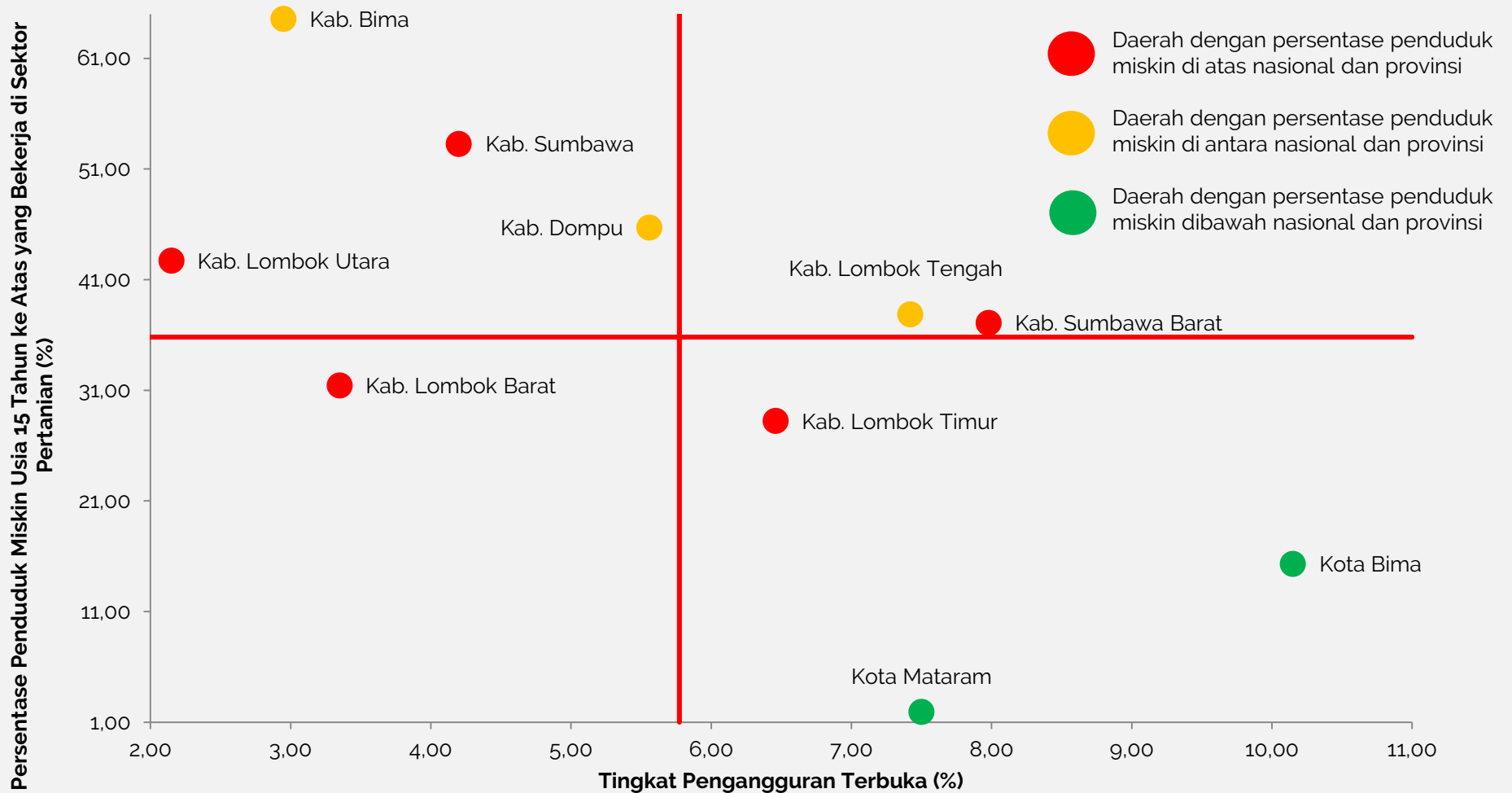


Tingkat Pengangguran Terbuka VS Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Informal (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, grafik diolah

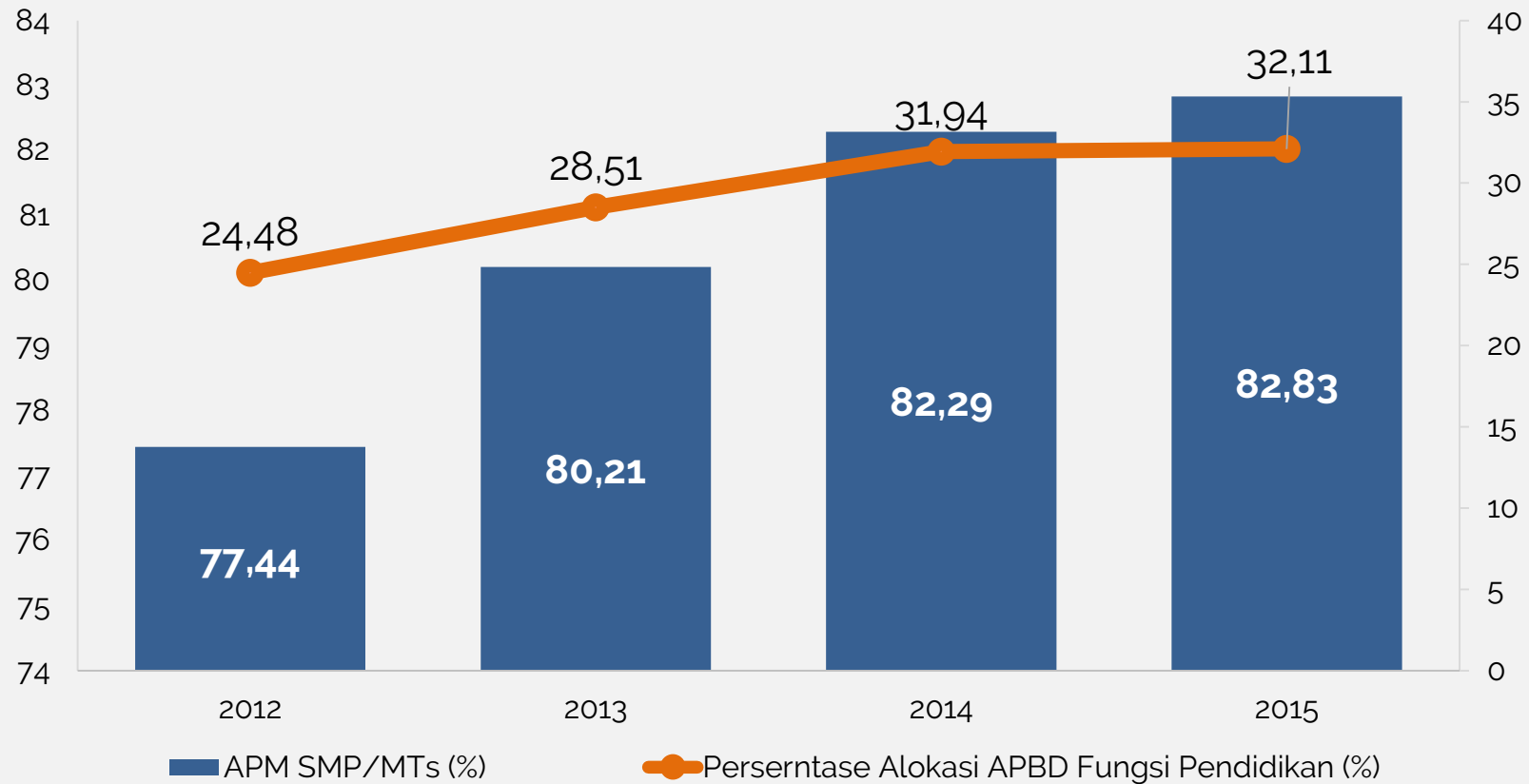
Tingkat Pengangguran Terbuka VS Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, grafik diolah

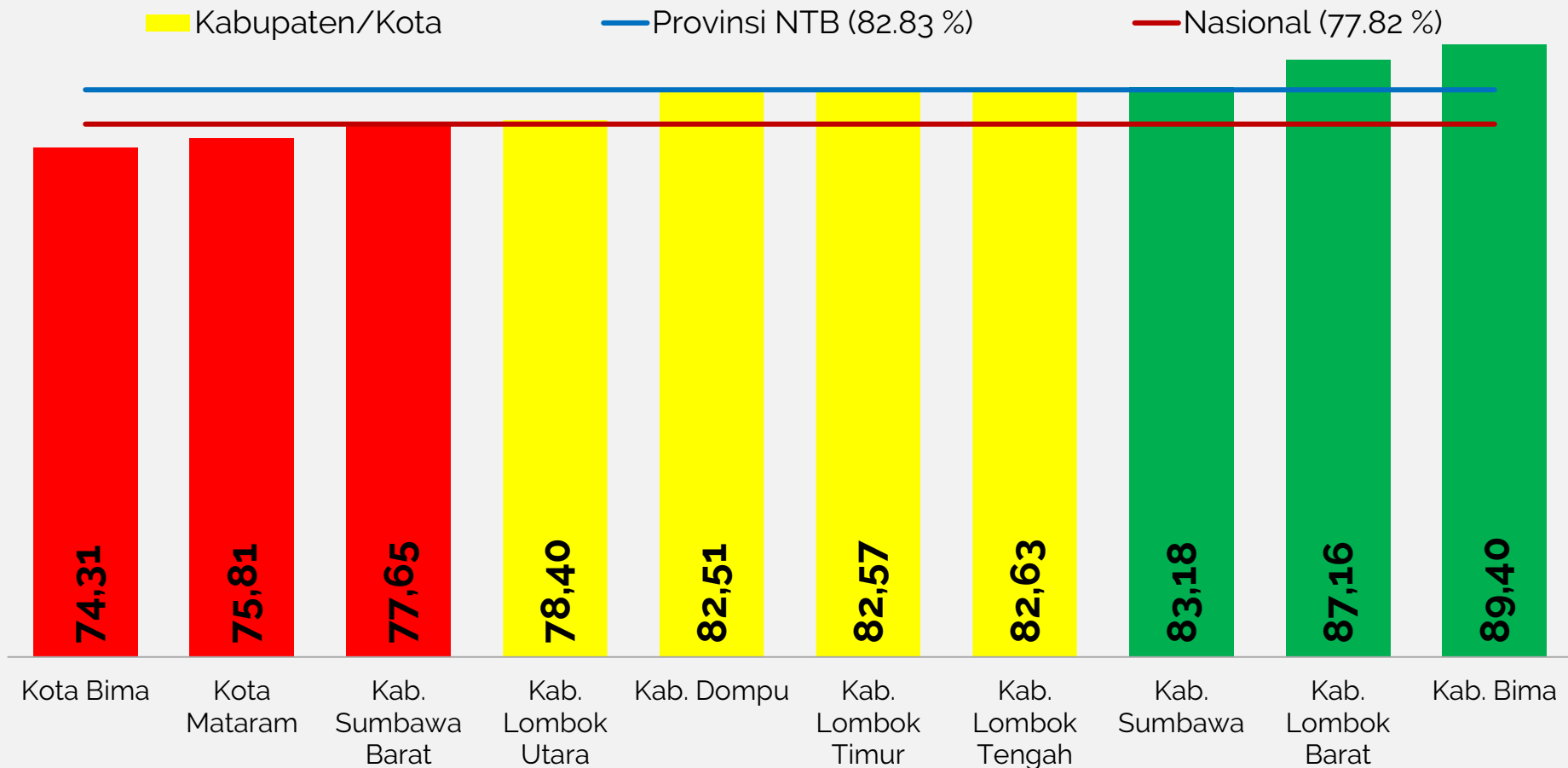
Pendidikan

Relevansi Perkembangan Indikator Pendidikan dengan Persentase Alokasi APBD Fungsi Pendidikan (Prov+Kab/Kota) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2012-2015



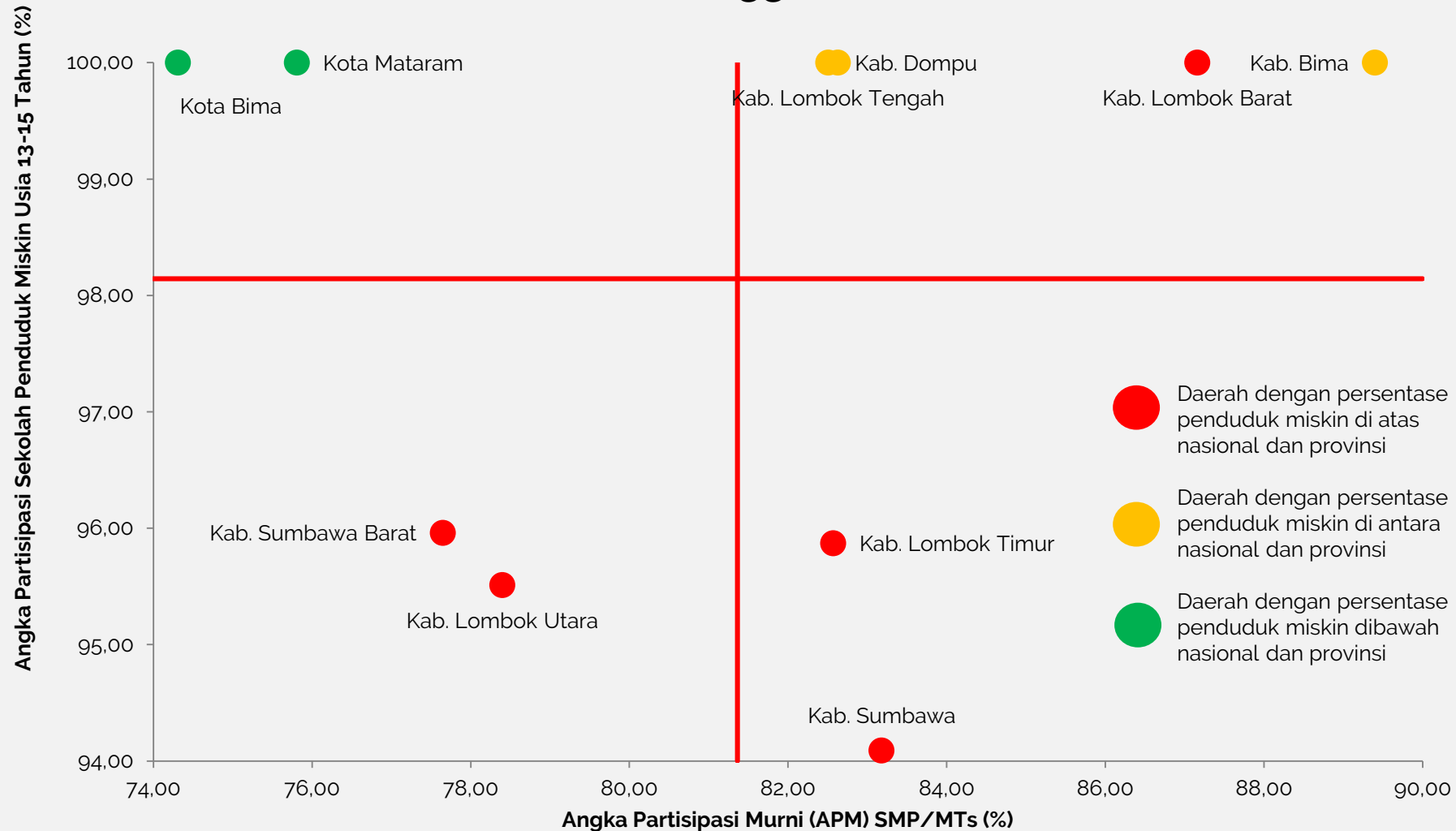
Sumber: BPS dan Kemenkeu RI (DJPK), grafik diolah

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015



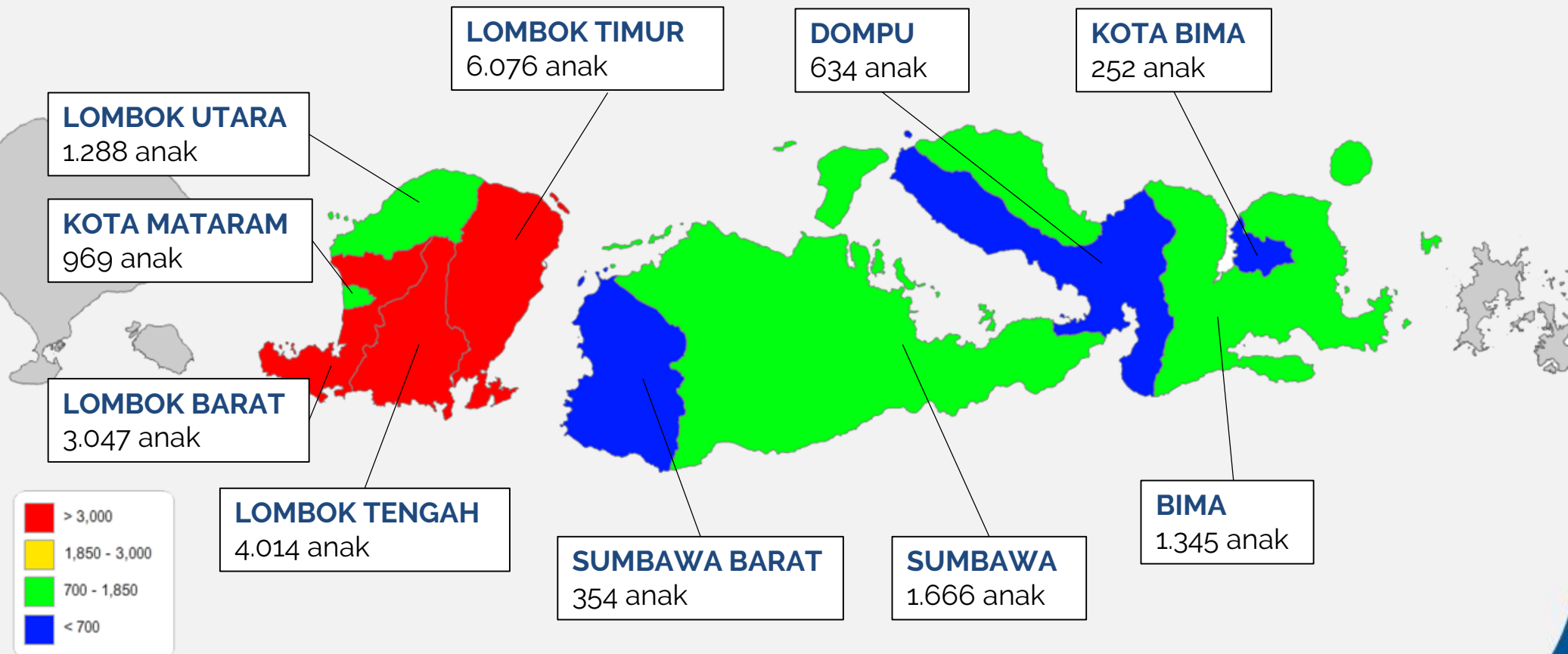
Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB 2015, grafik diolah

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs VS Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Usia 13-15 Tahun, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015

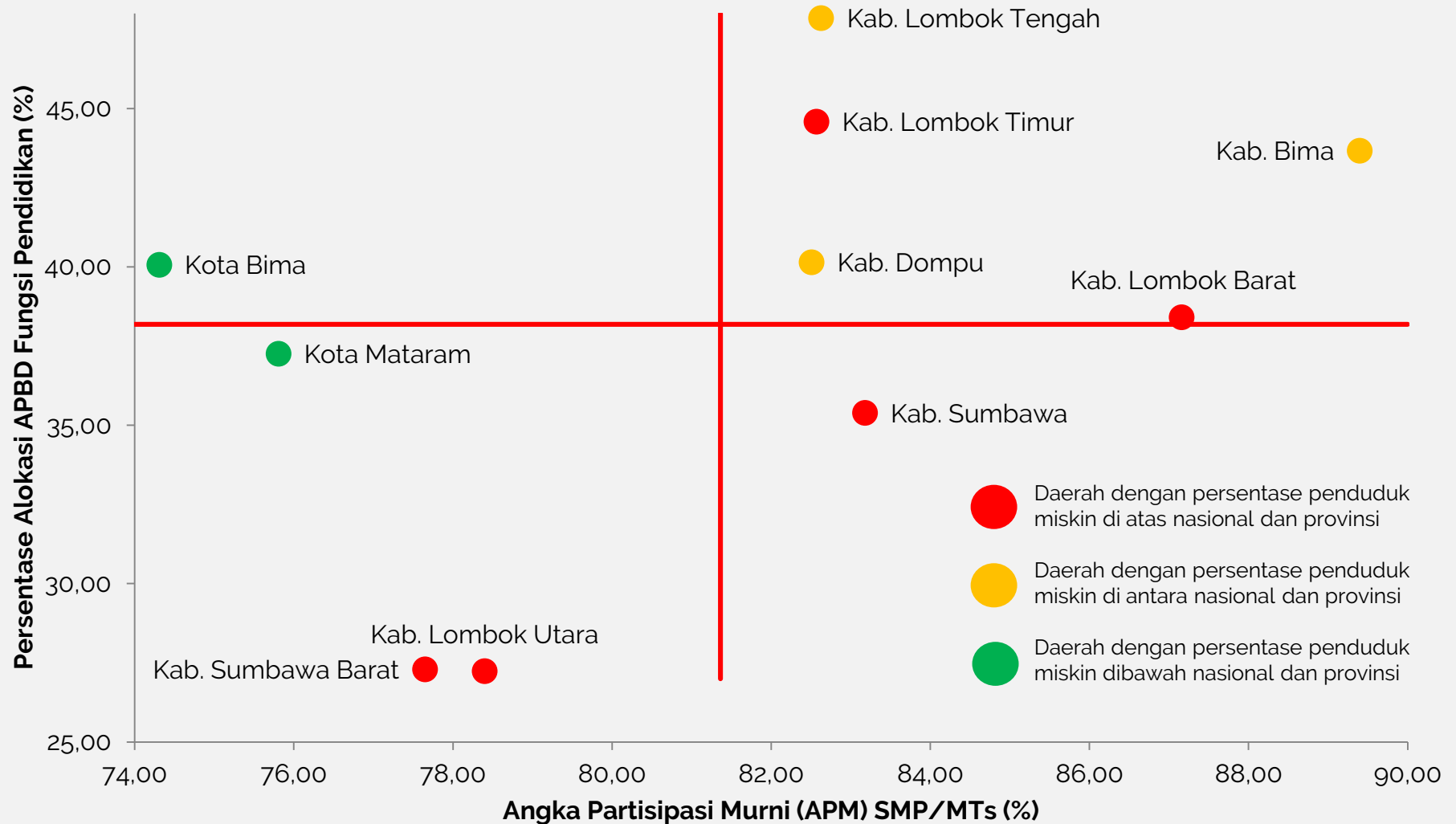


Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, grafik diolah

Jumlah Anak dari Rumah Tangga Desil 1-4 Usia 13-15 Tahun yang Tidak Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015

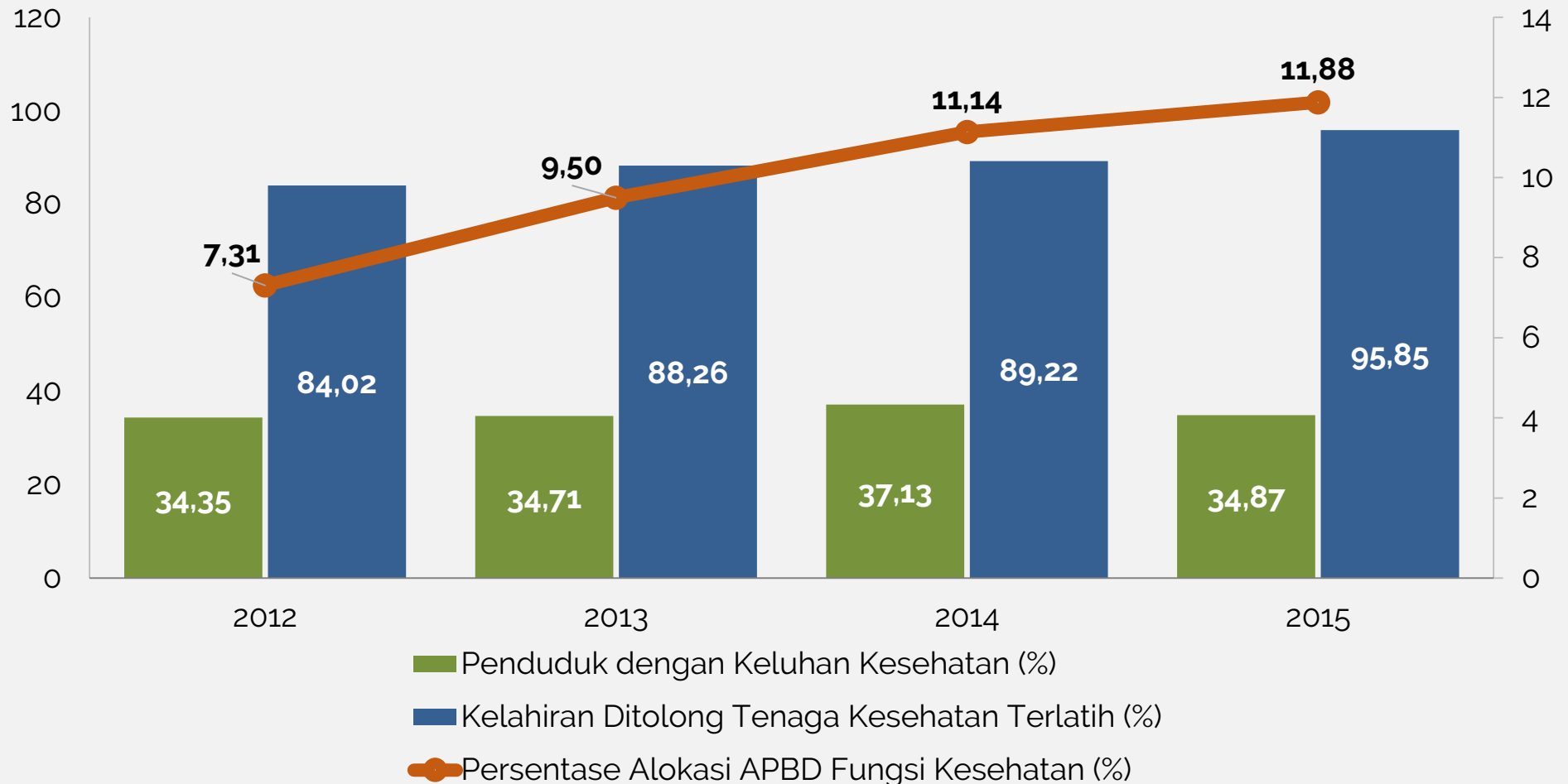


Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Pendidikan dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015



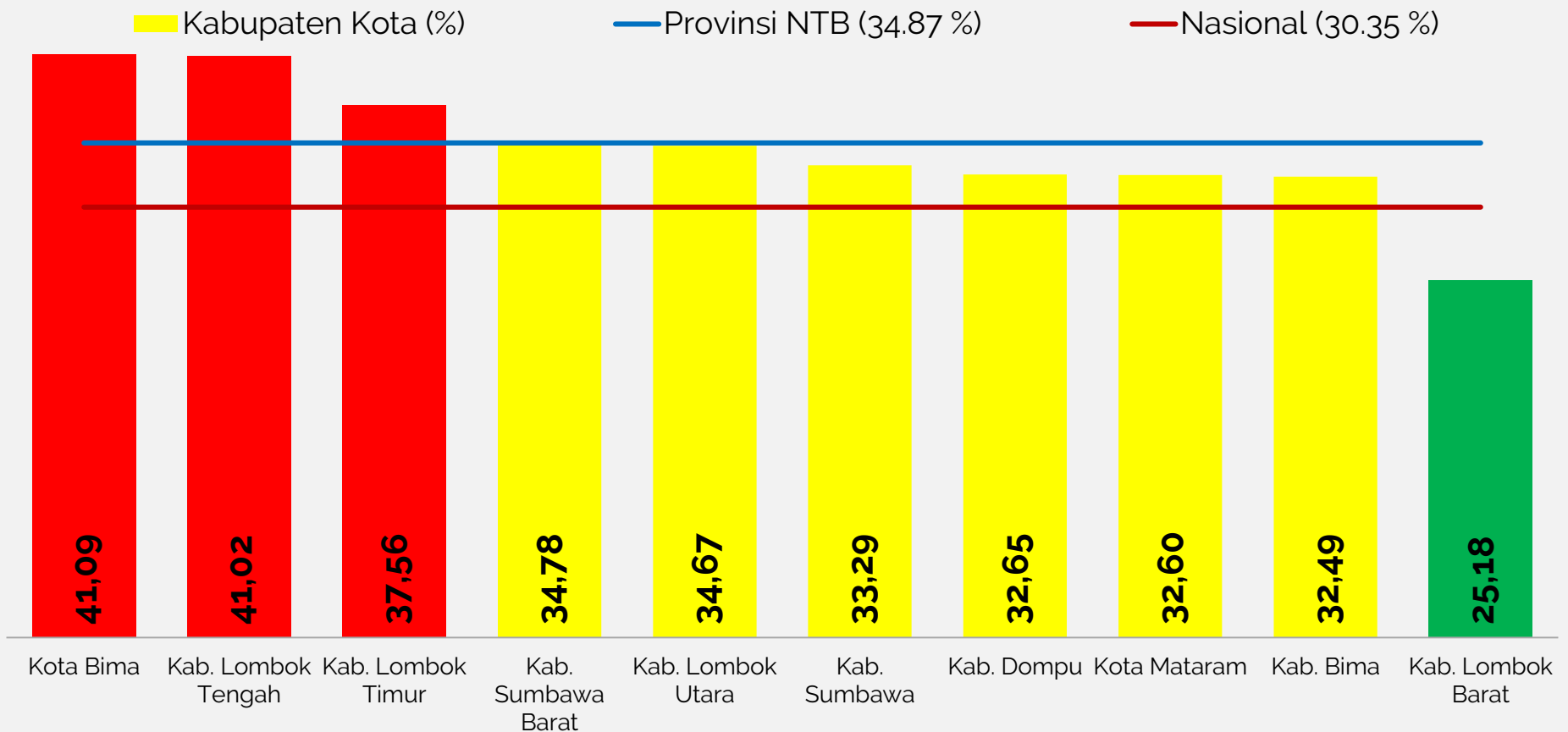
Kesehatan

Relevansi Perkembangan Indikator Kesehatan dengan Persentase Alokasi APBD Fungsi Kesehatan (Prov+Kab/Kota) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2012-2015



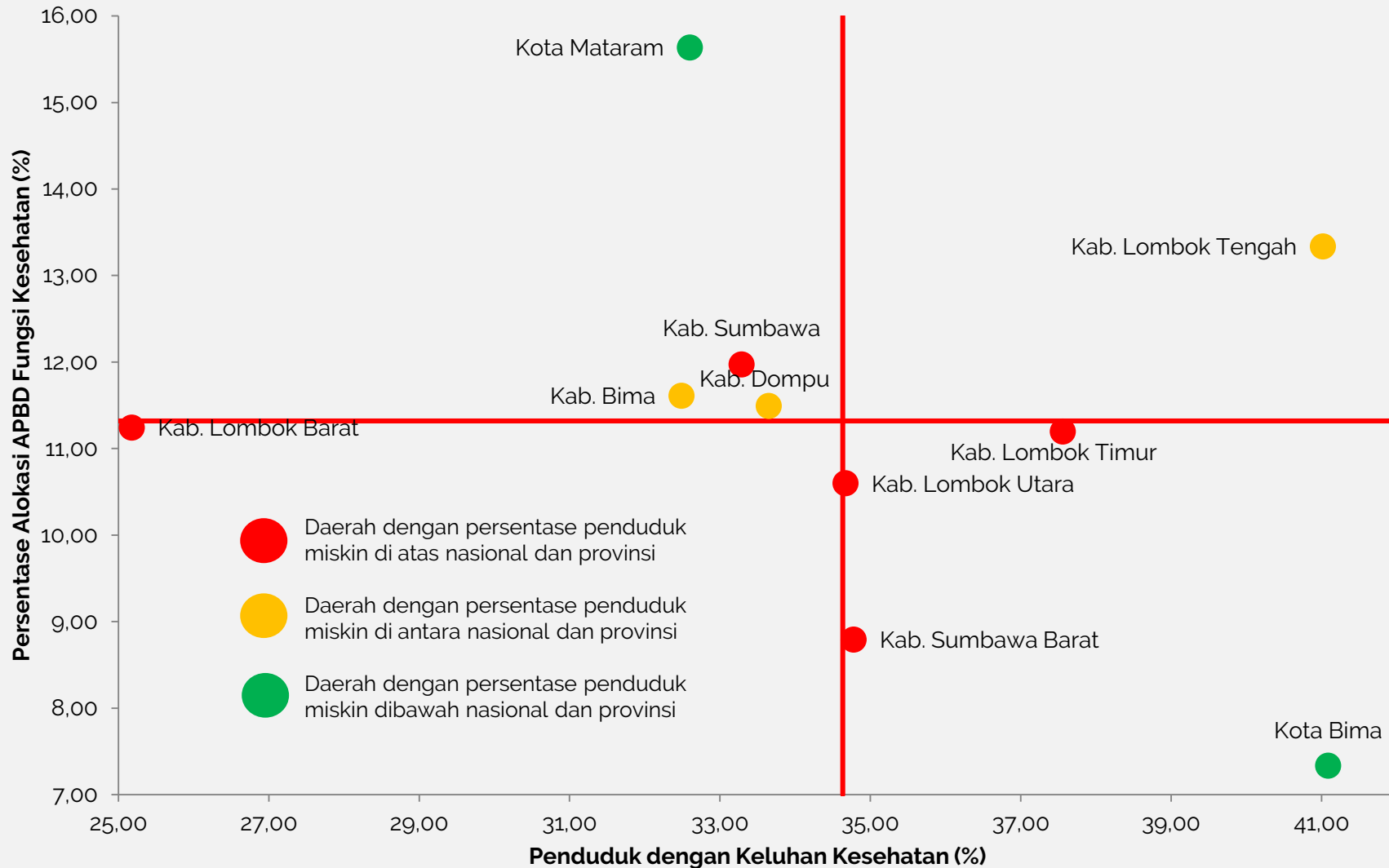
Sumber: BPS dan Kemenkeu RI (DJPK), grafik diolah

Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015



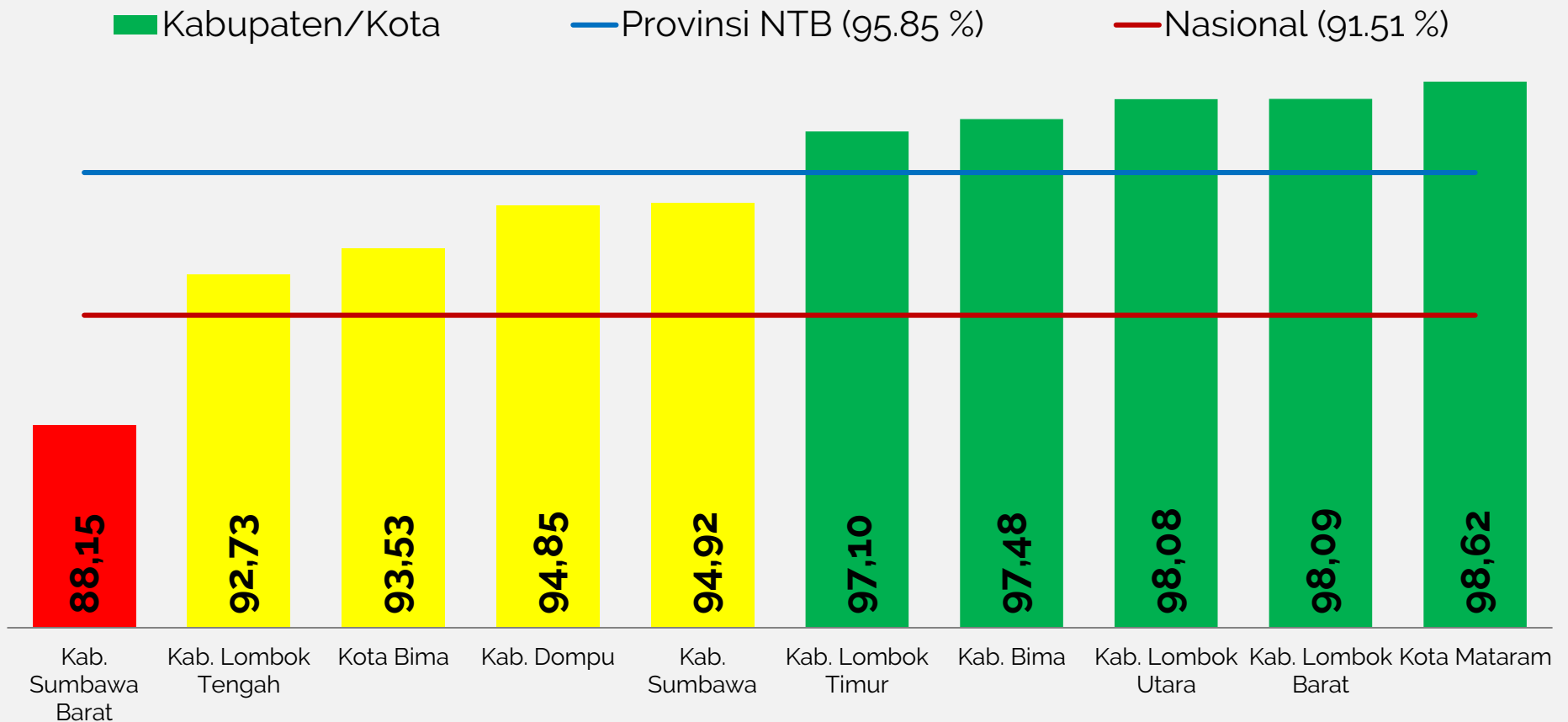
Sumber: Badan Pusat Statistik, Hasil SUSENAS Provinsi NTB 2015, grafik diolah

Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Kesehatan dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015



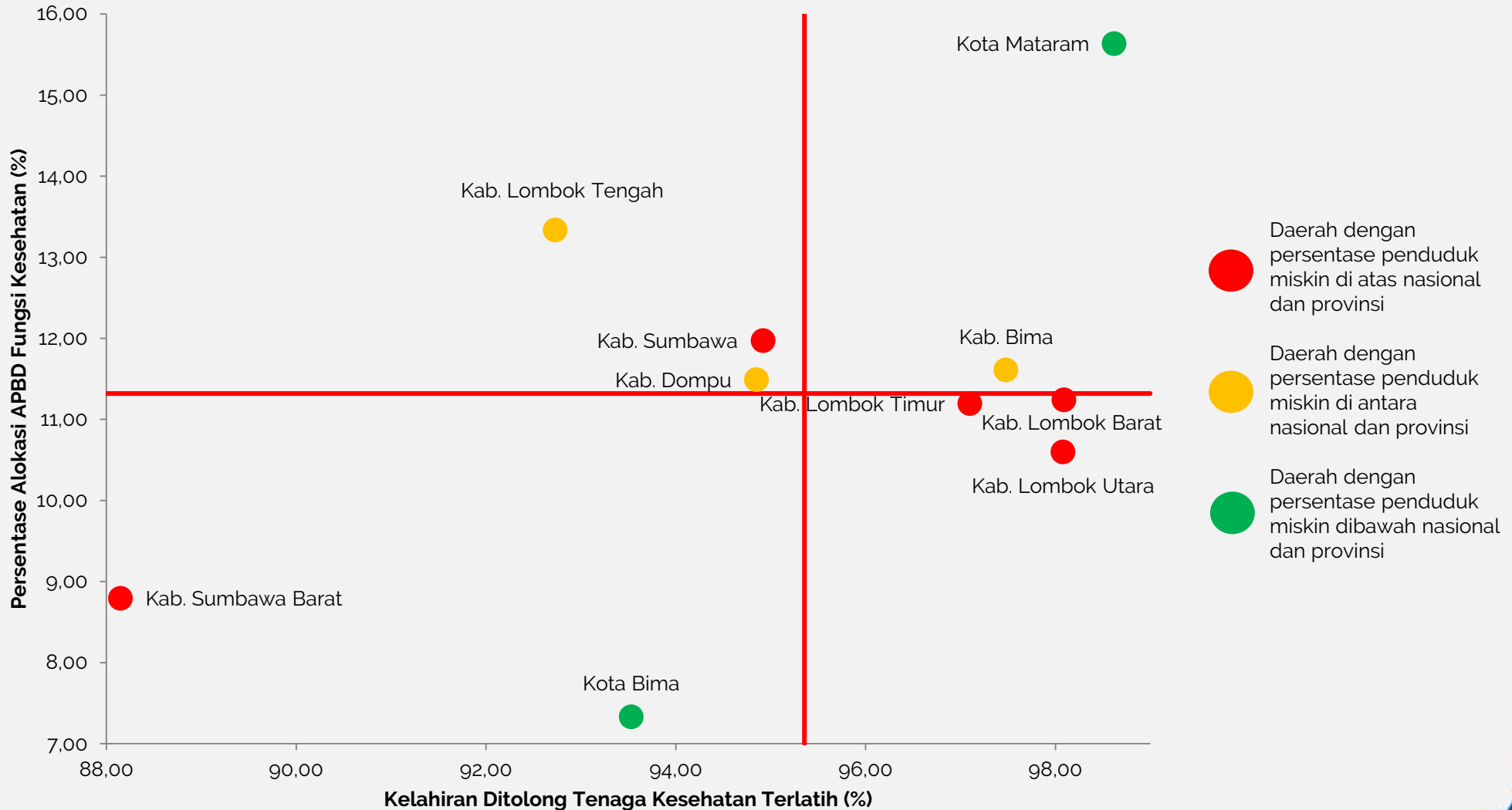
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, grafik diolah

Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015



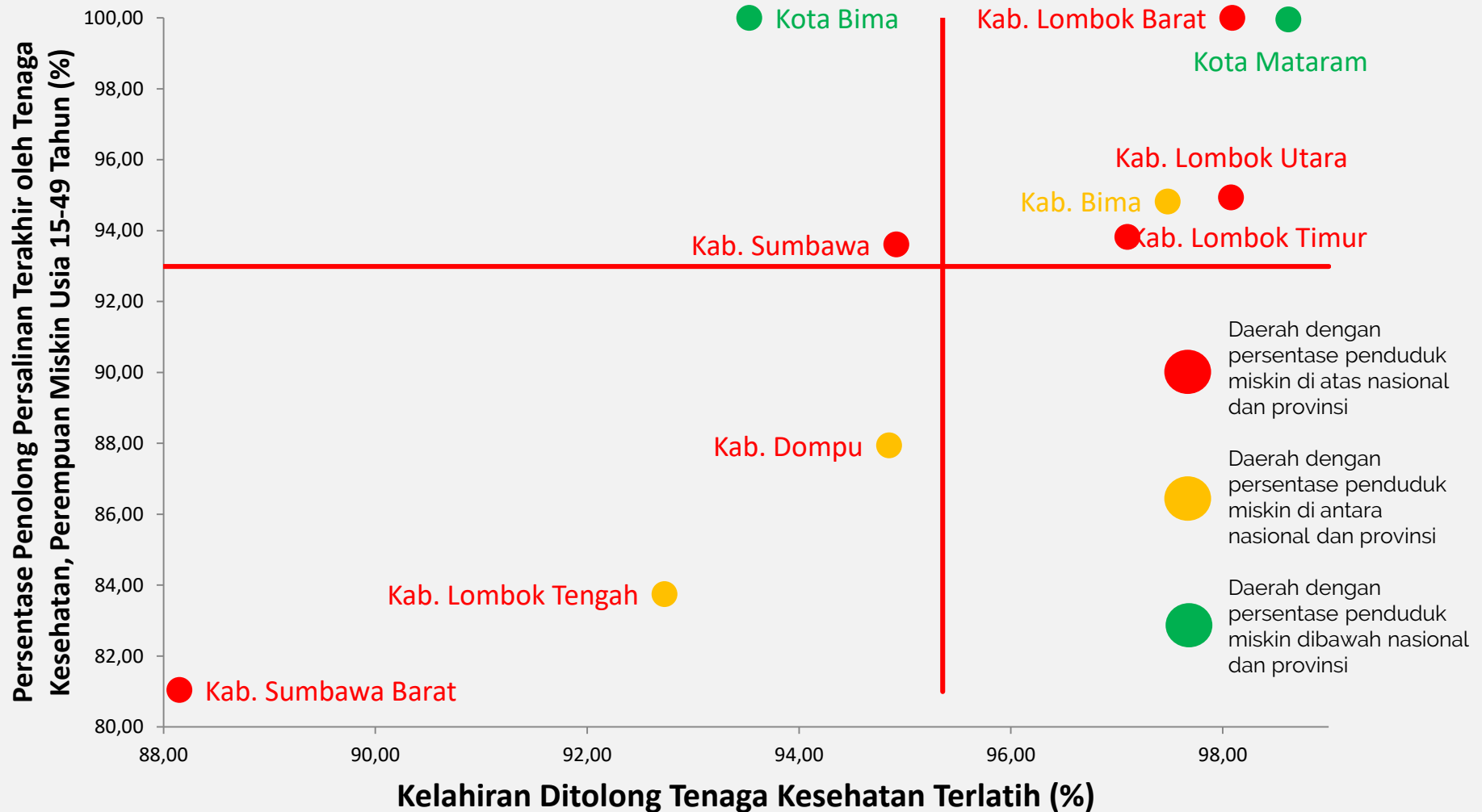
Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi NTB Dalam Angka 2016, grafik diolah

Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Kesehatan dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015



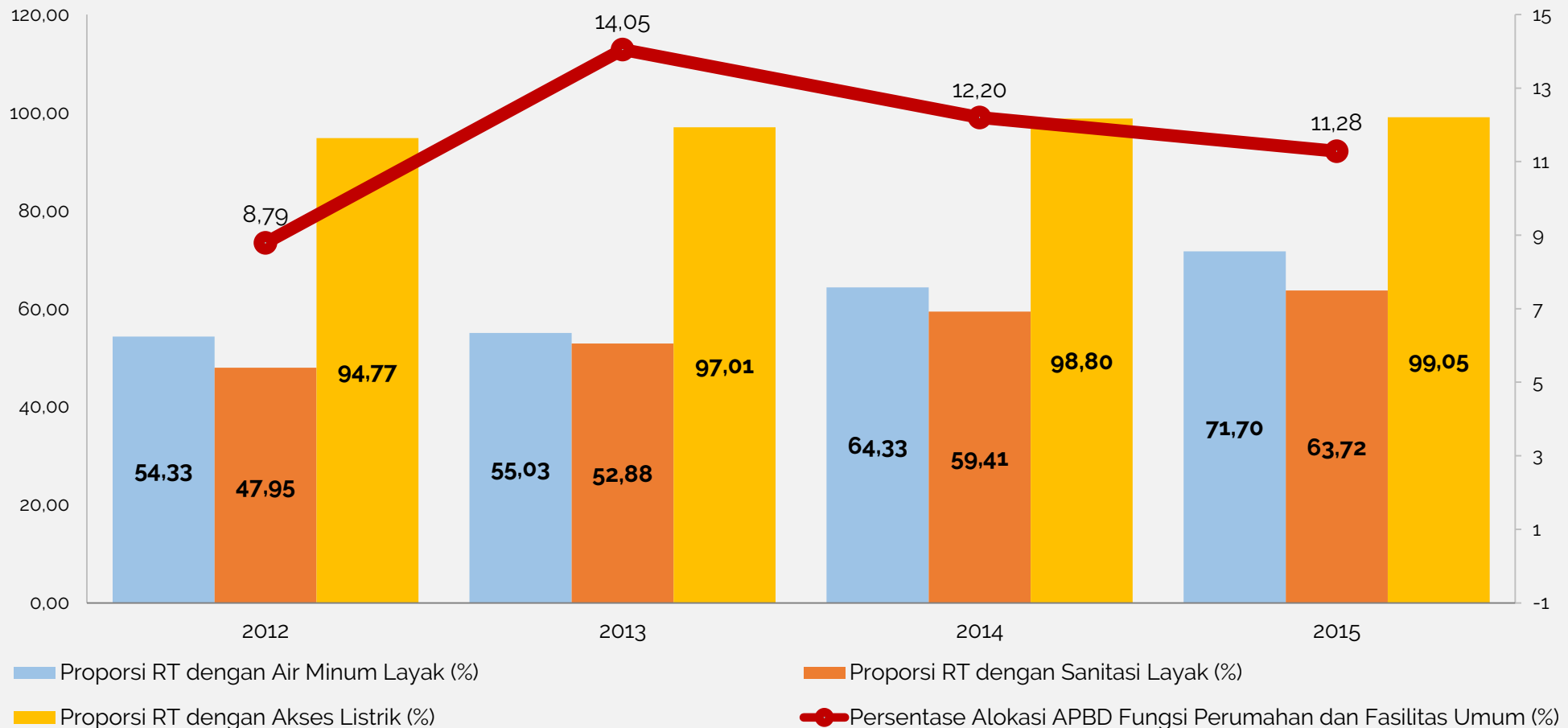
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, grafik diolah

Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) VS Persentase Penolong Persalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan, Perempuan Miskin Usia 15-49 Tahun (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015



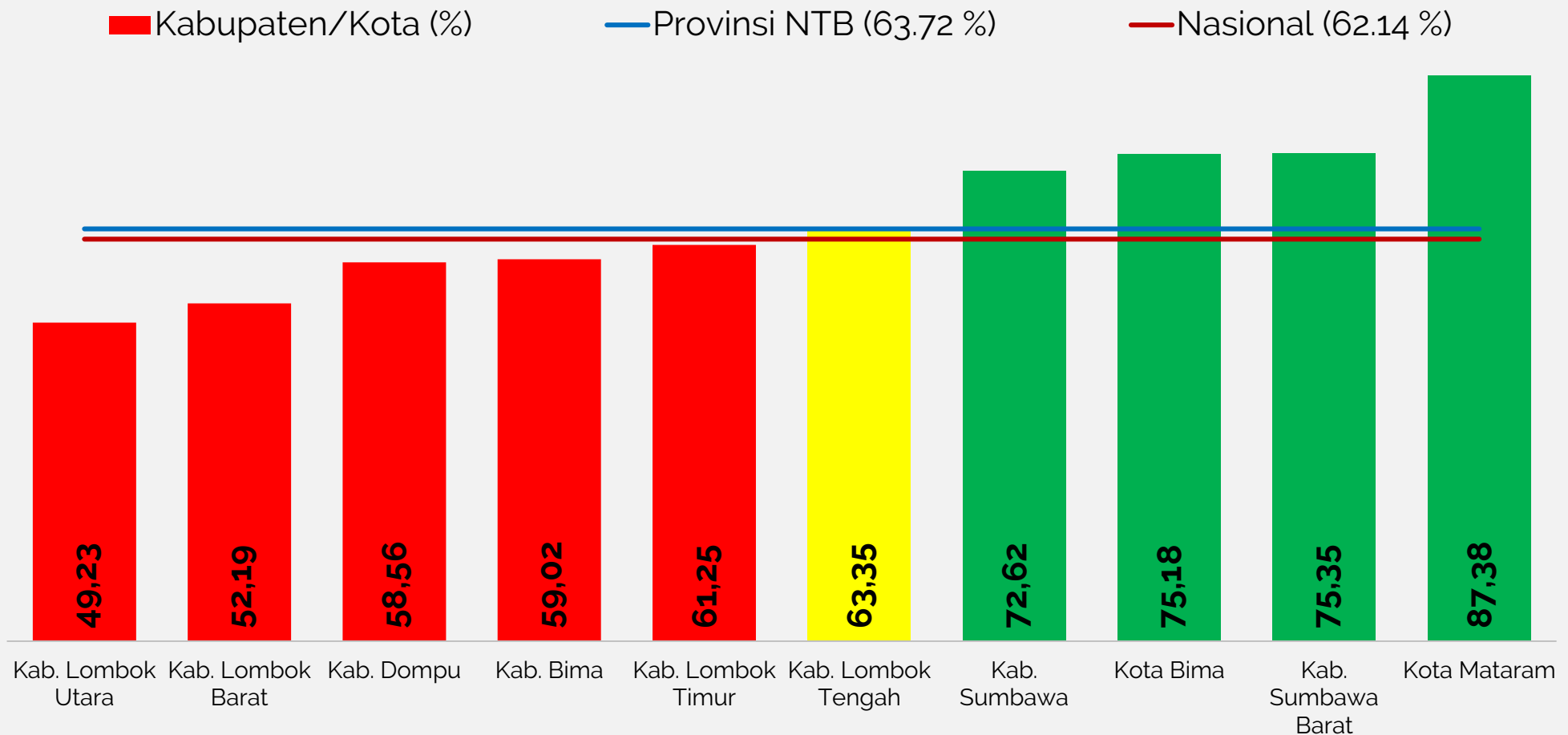
Infrastruktur Dasar

Relevansi Perkembangan Indikator Infrastruktur Dasar dengan Persentase Alokasi APBD Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum (Prov+Kab/Kota) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2012-2015



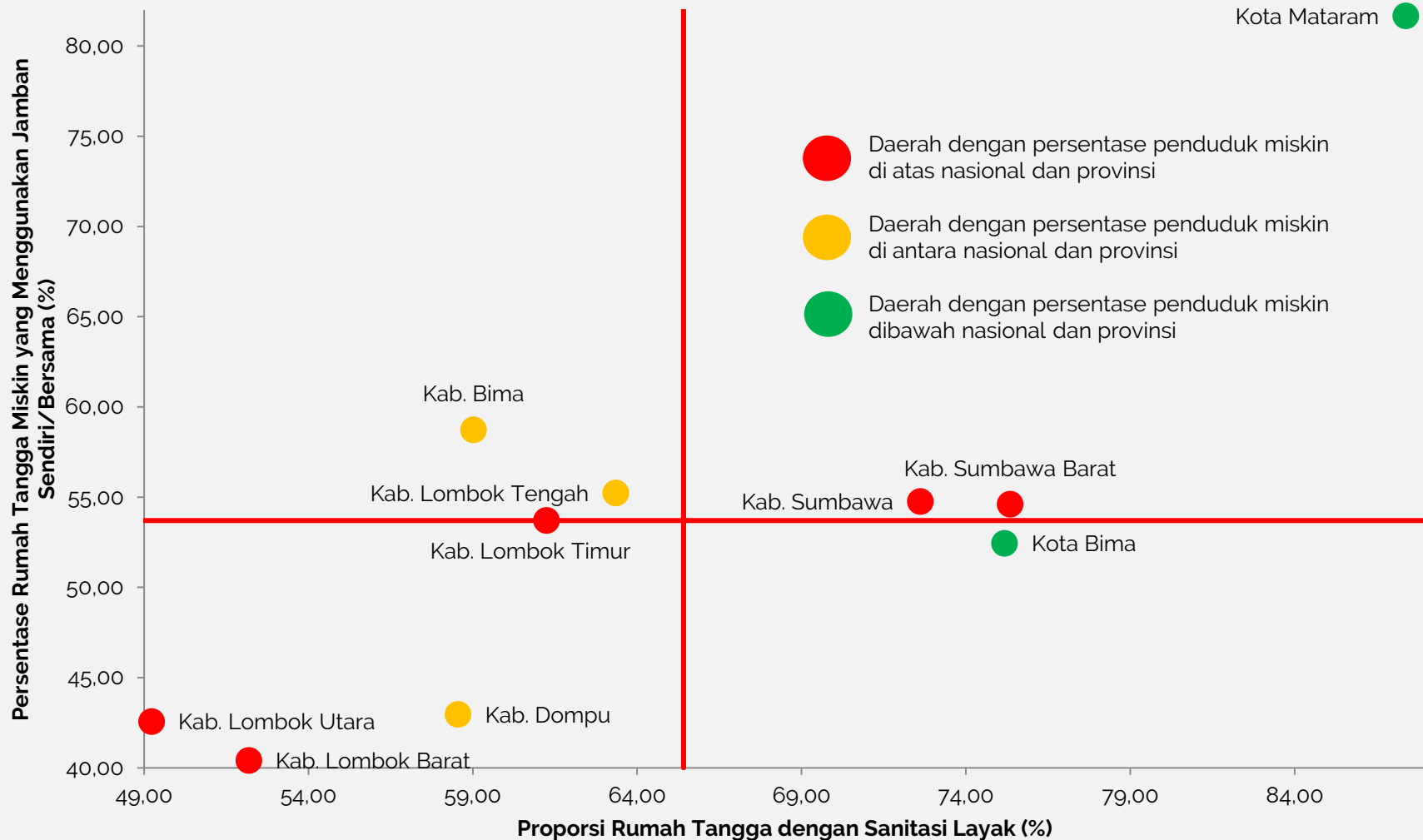
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dihitung menggunakan rumus baru, yaitu air minum layak sudah mencakup air minum utama dan air mandi/cuci .

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015



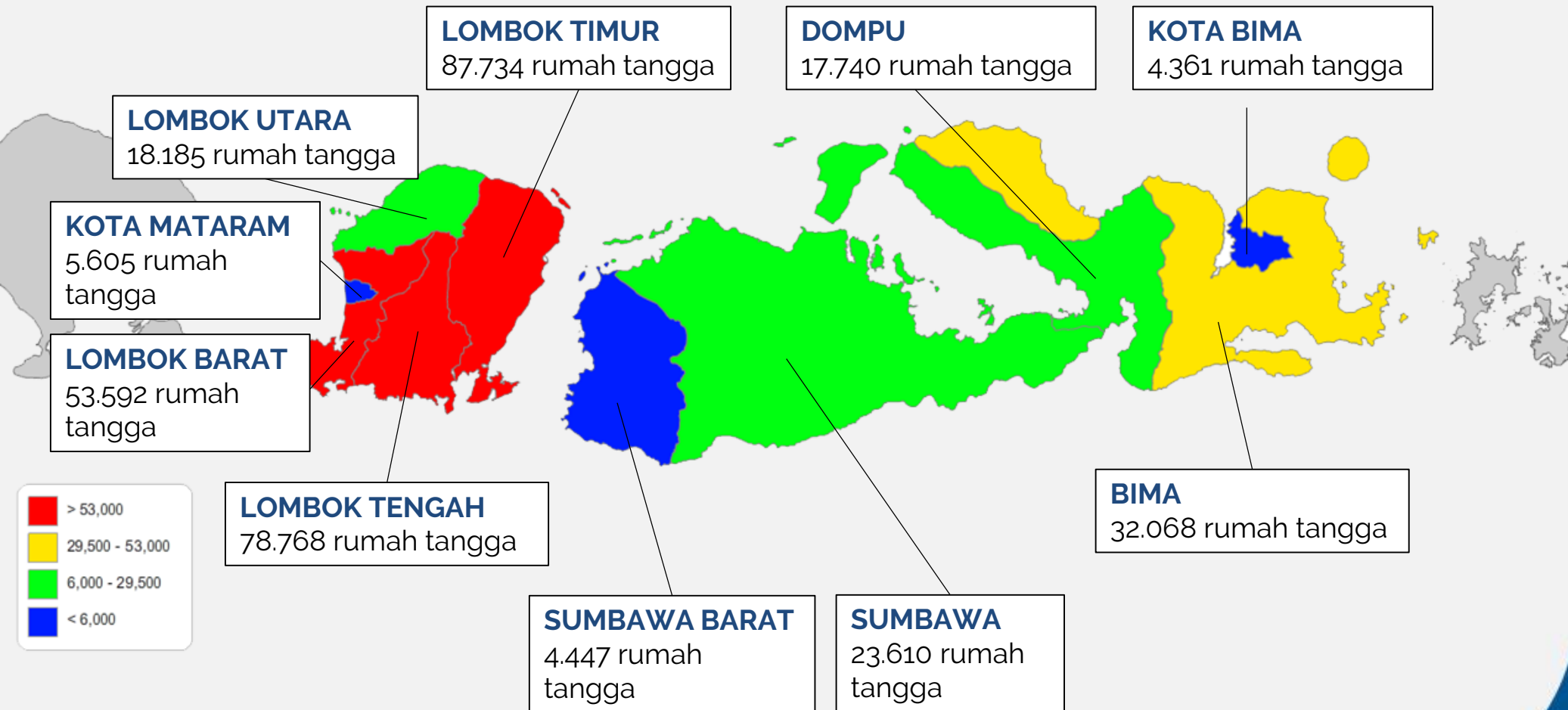
Sumber: Badan Pusat Statistik, data Kabupaten/Kota diolah dari SUSENAS 2015, grafik diolah

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) VS Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015

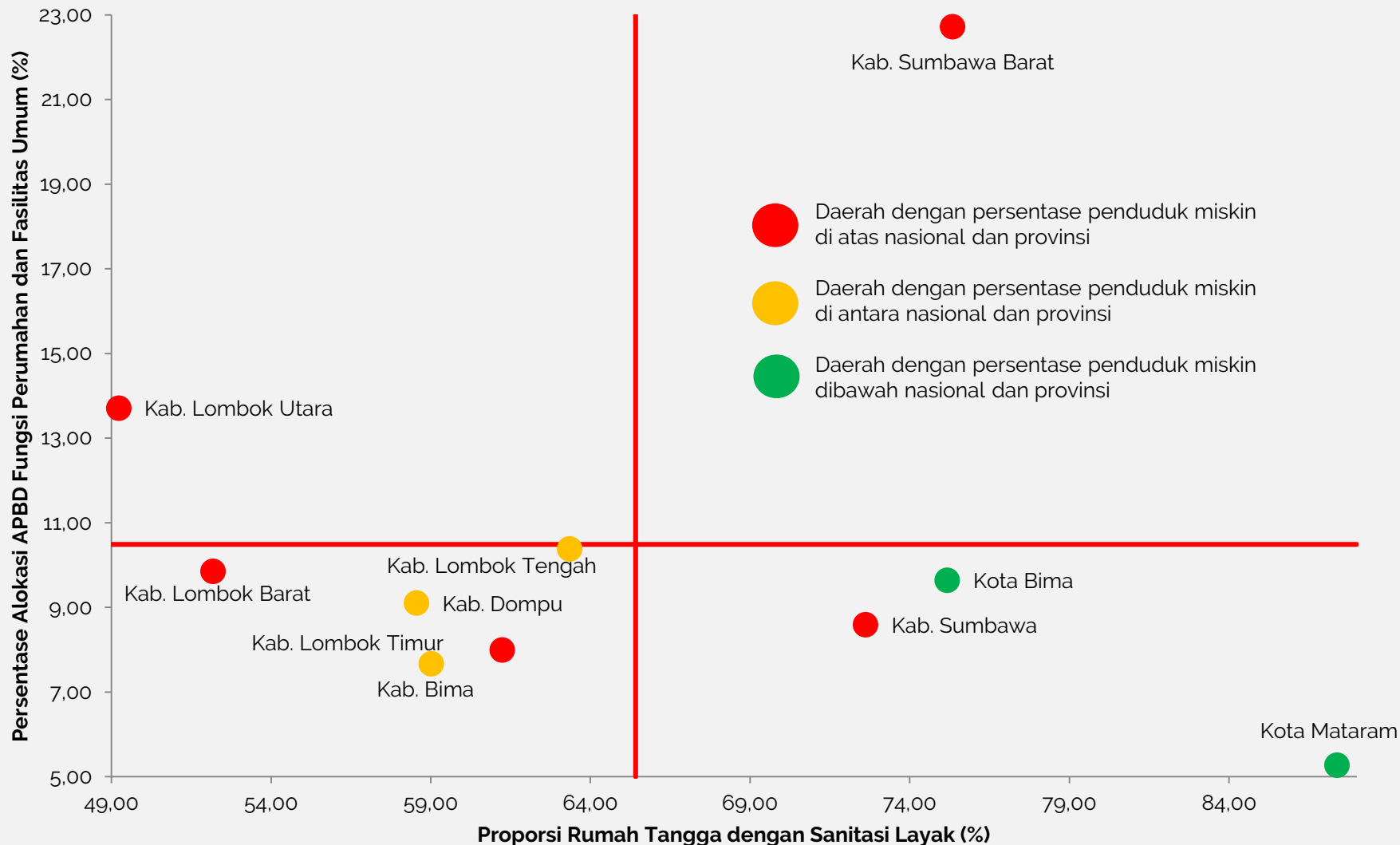


Sumber: SUSENAS BPS dan Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, grafik diolah

Jumlah Rumah Tangga Desil 1-4 Tanpa Akses Jamban Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015

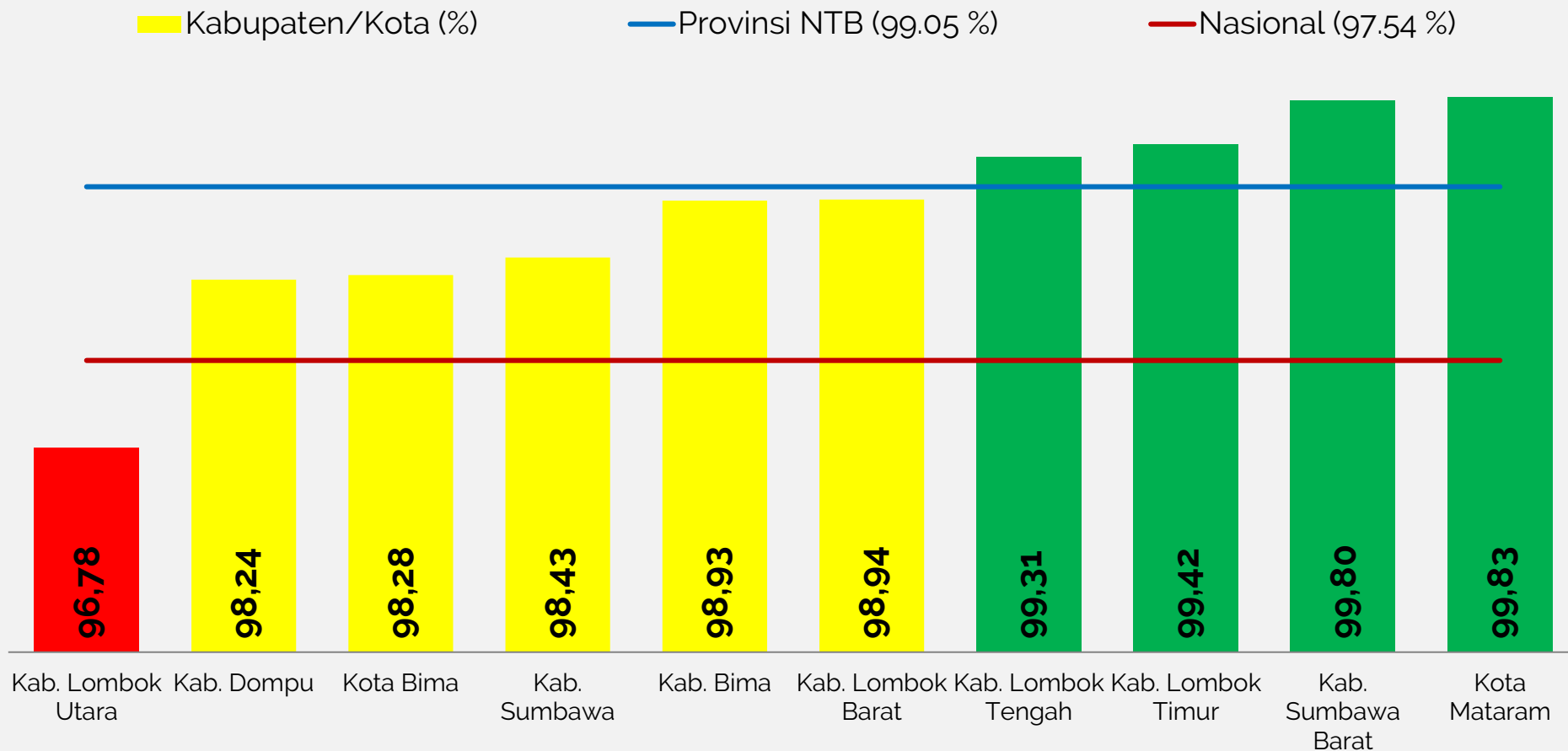


Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Infrastruktur Dasar dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015



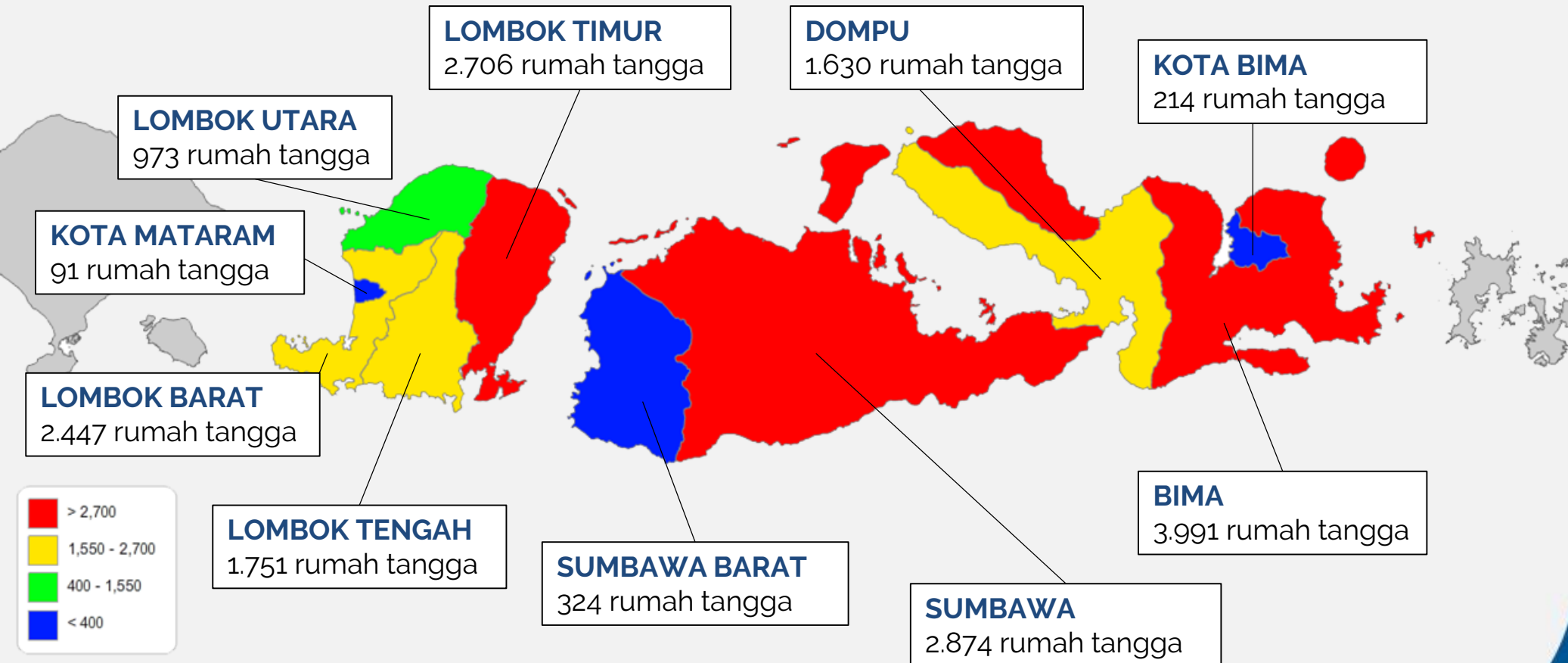
Sumber: Data olah SUSENAS BPS 2015 dan Kemenkeu RI (DJPK), grafik diolah

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

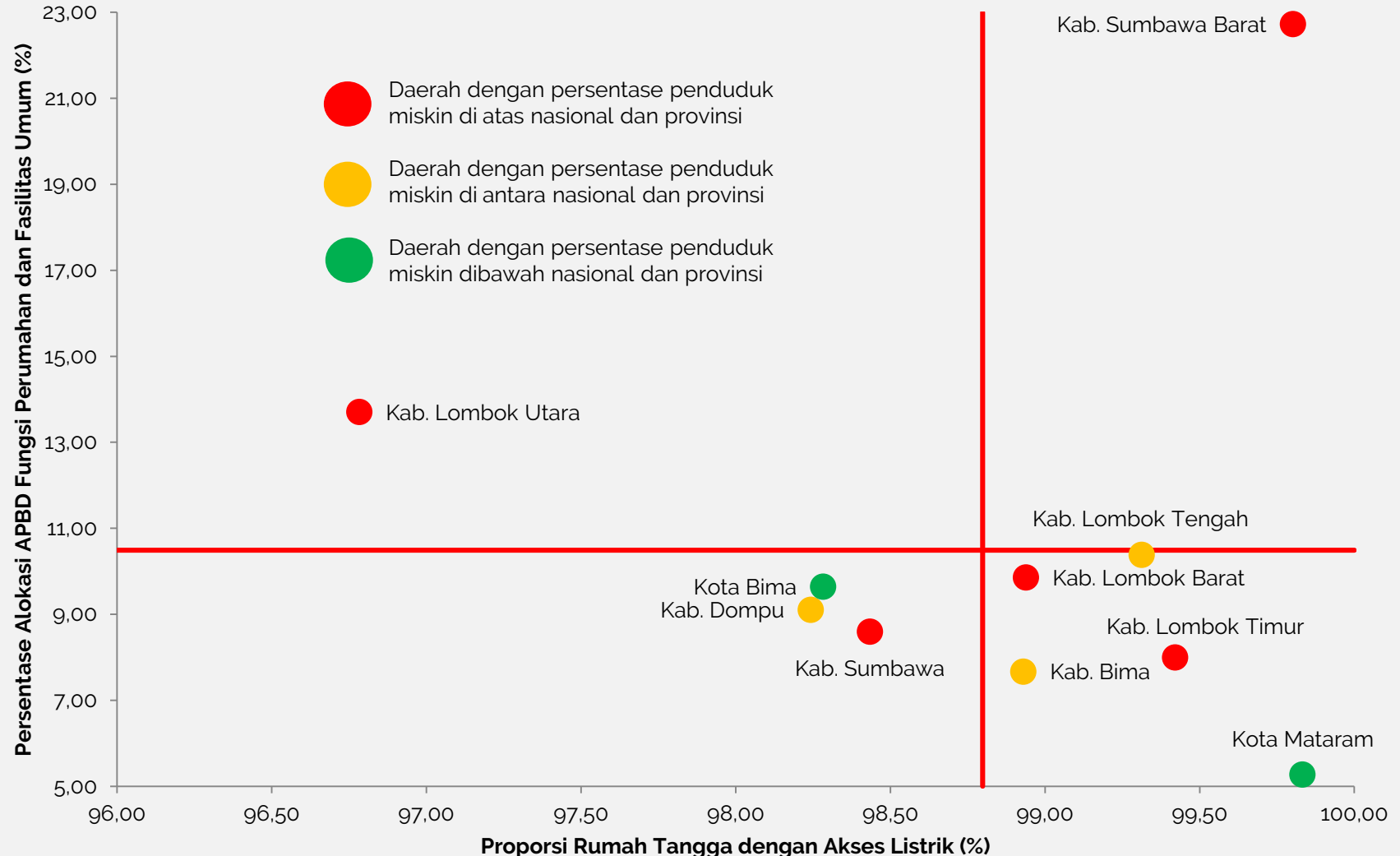


Sumber: Badan Pusat Statistik, data Kabupaten/Kota diolah dari SUSENAS 2015, grafik diolah

Jumlah Rumah Tangga Desil 1-4 Tanpa Akses Listrik Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015

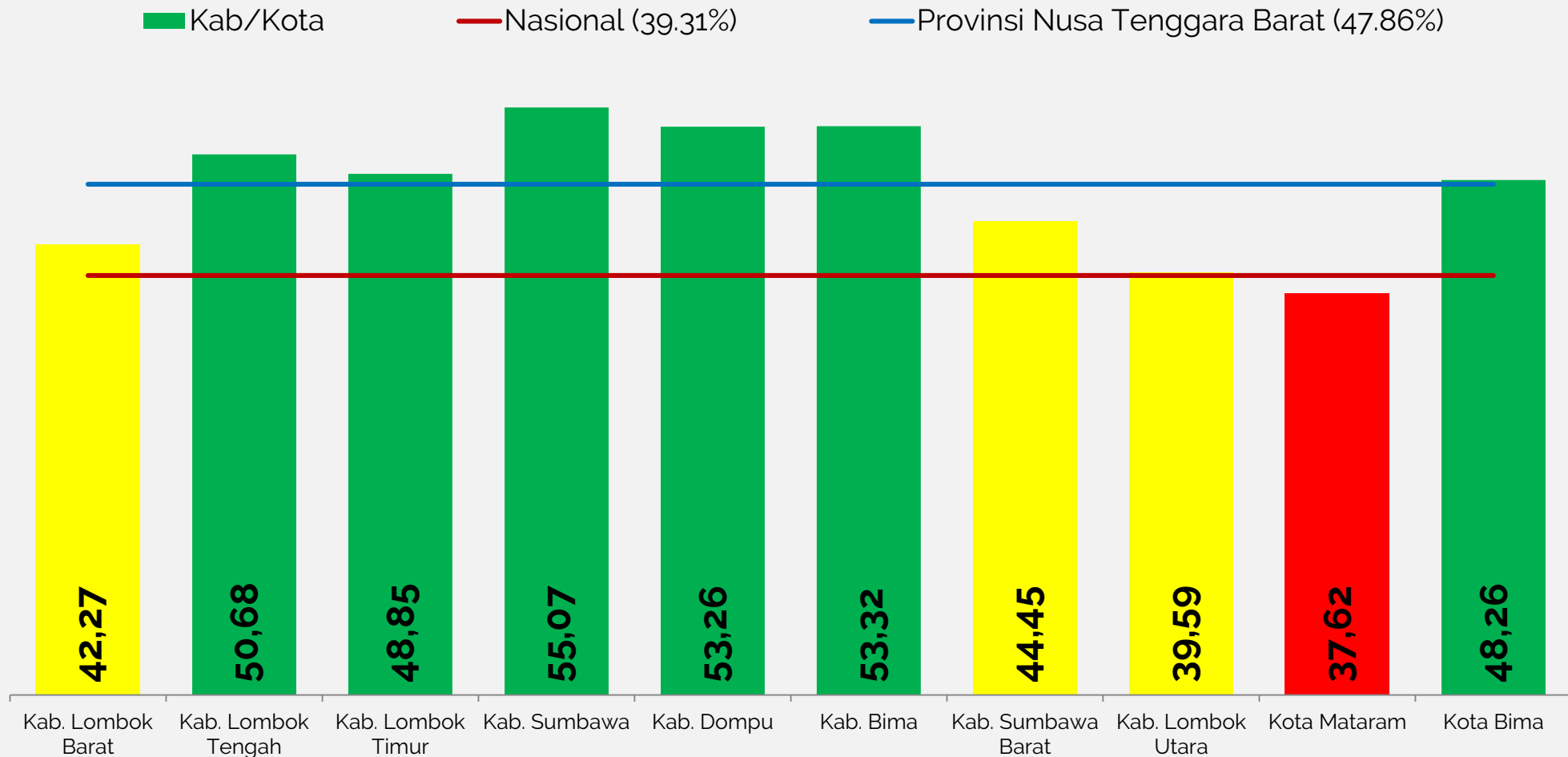


Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Infrastruktur Dasar dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015



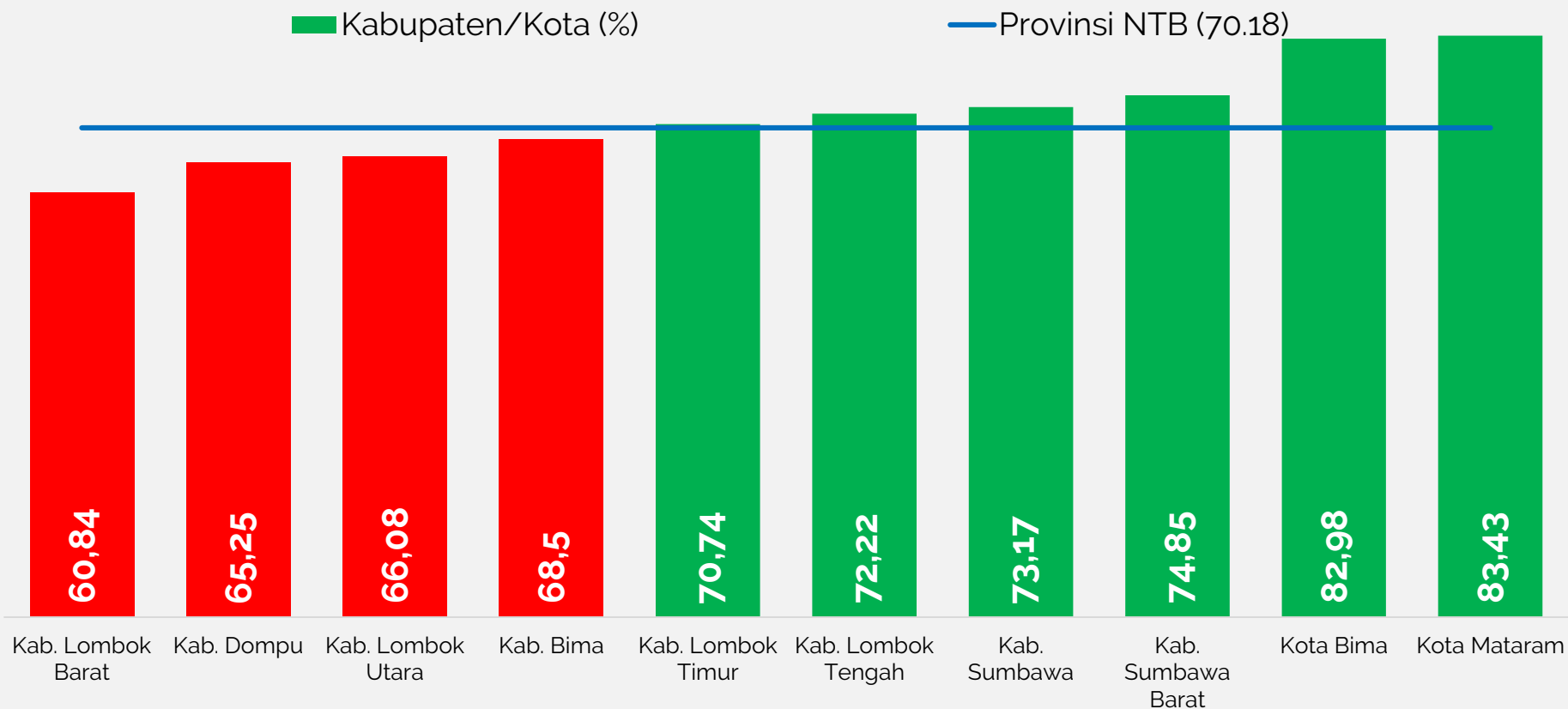
Sumber: Data olah SUSENAS BPS 2015 dan Kemenkeu RI (DJPK), grafik diolah

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2014



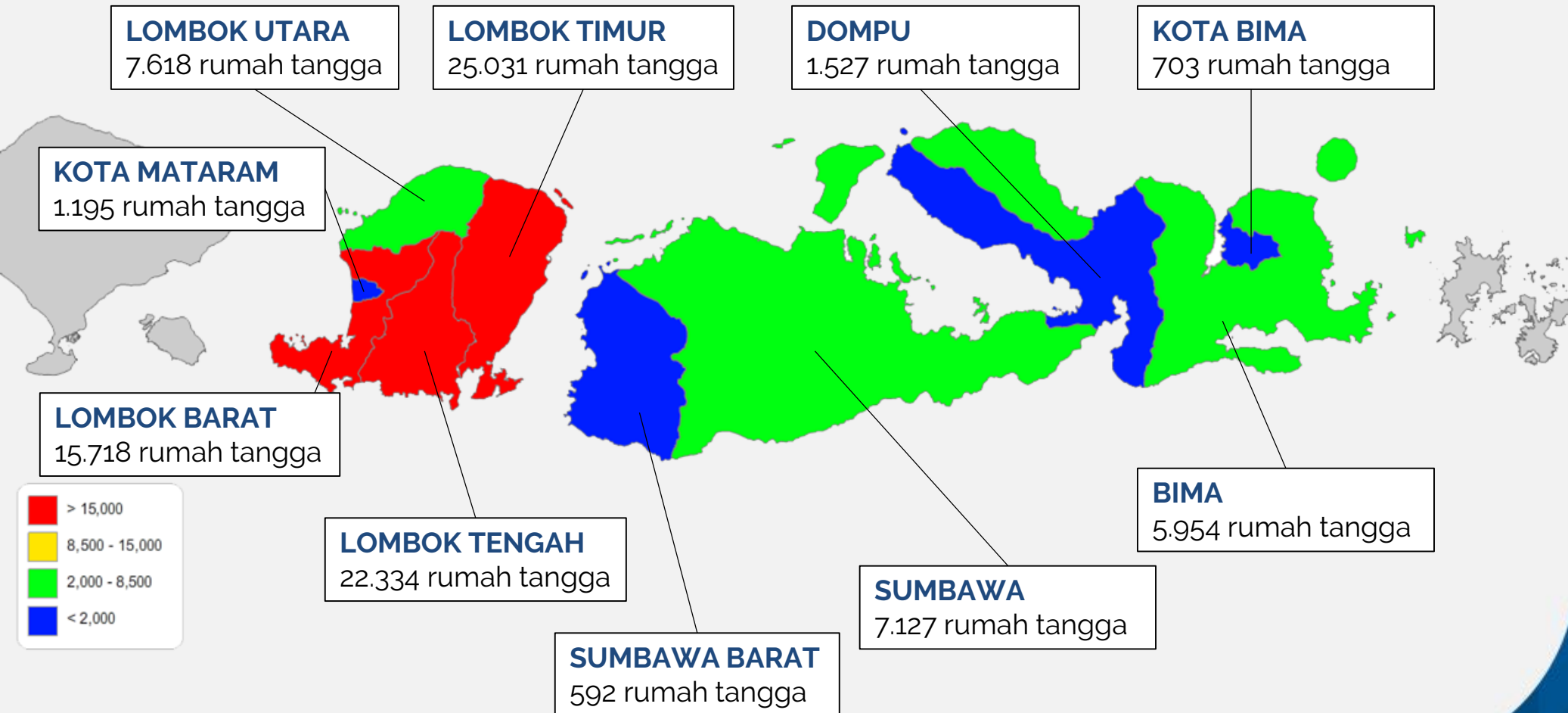
Sumber: Badan Pusat Statistik, grafik diolah

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih (%) Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015

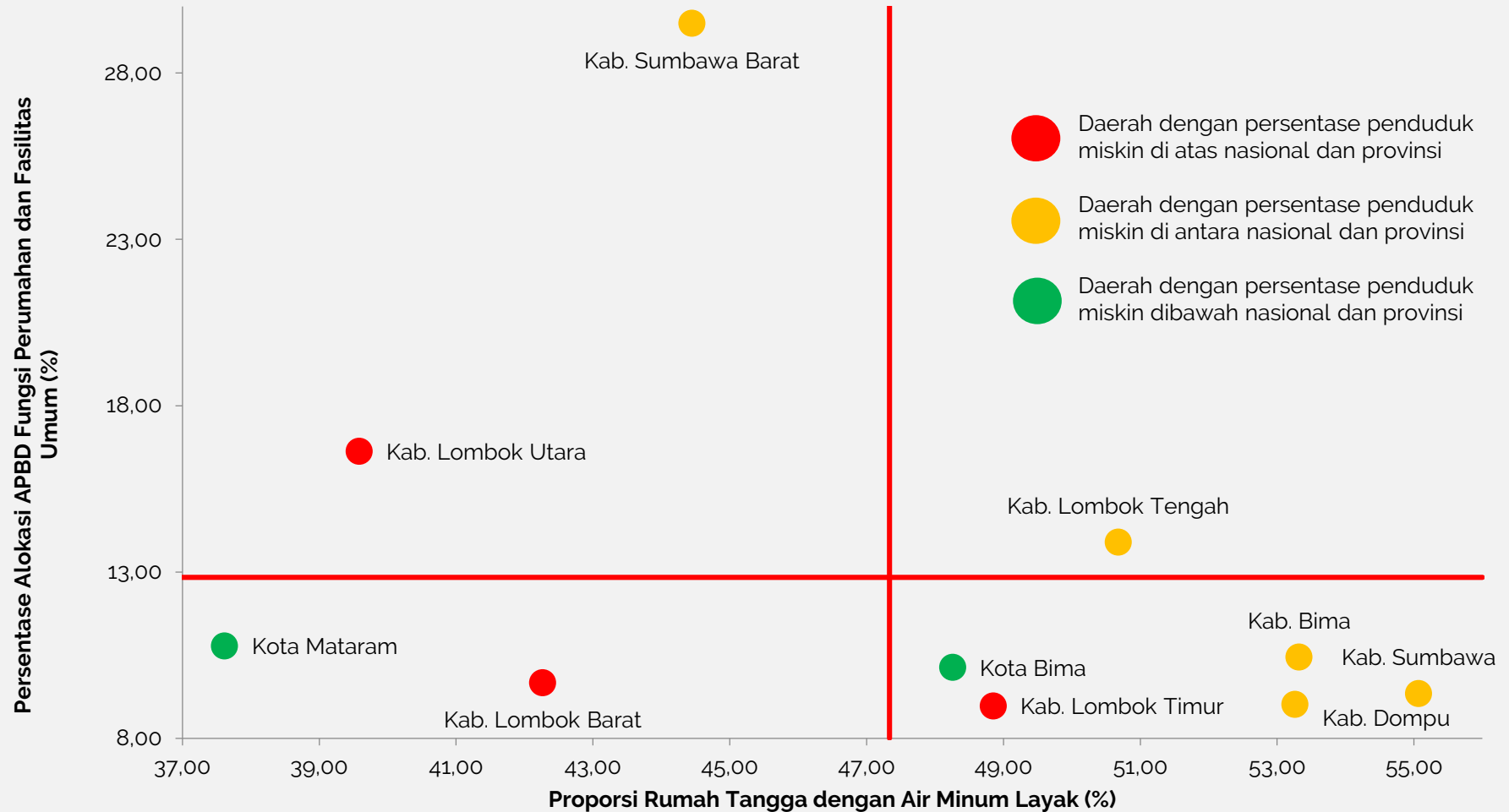


Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, grafik diolah

Jumlah Rumah Tangga Desil 1-4 dengan Air Minum dari Sumber Tidak Terlindungi Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015

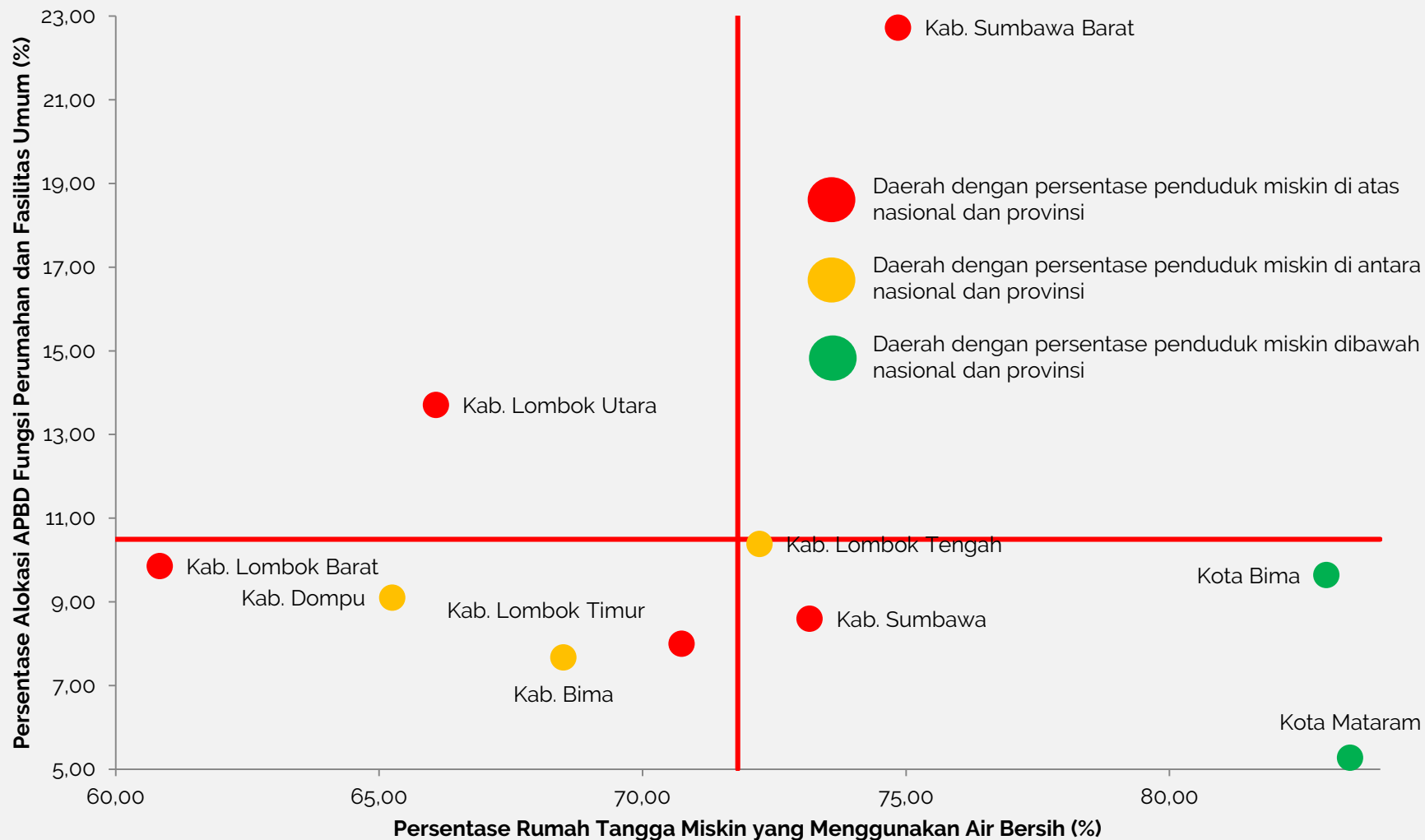


Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Infrastruktur Dasar dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2014



Sumber: BPS 2014 dan Kemenkeu RI (DJPK), grafik diolah

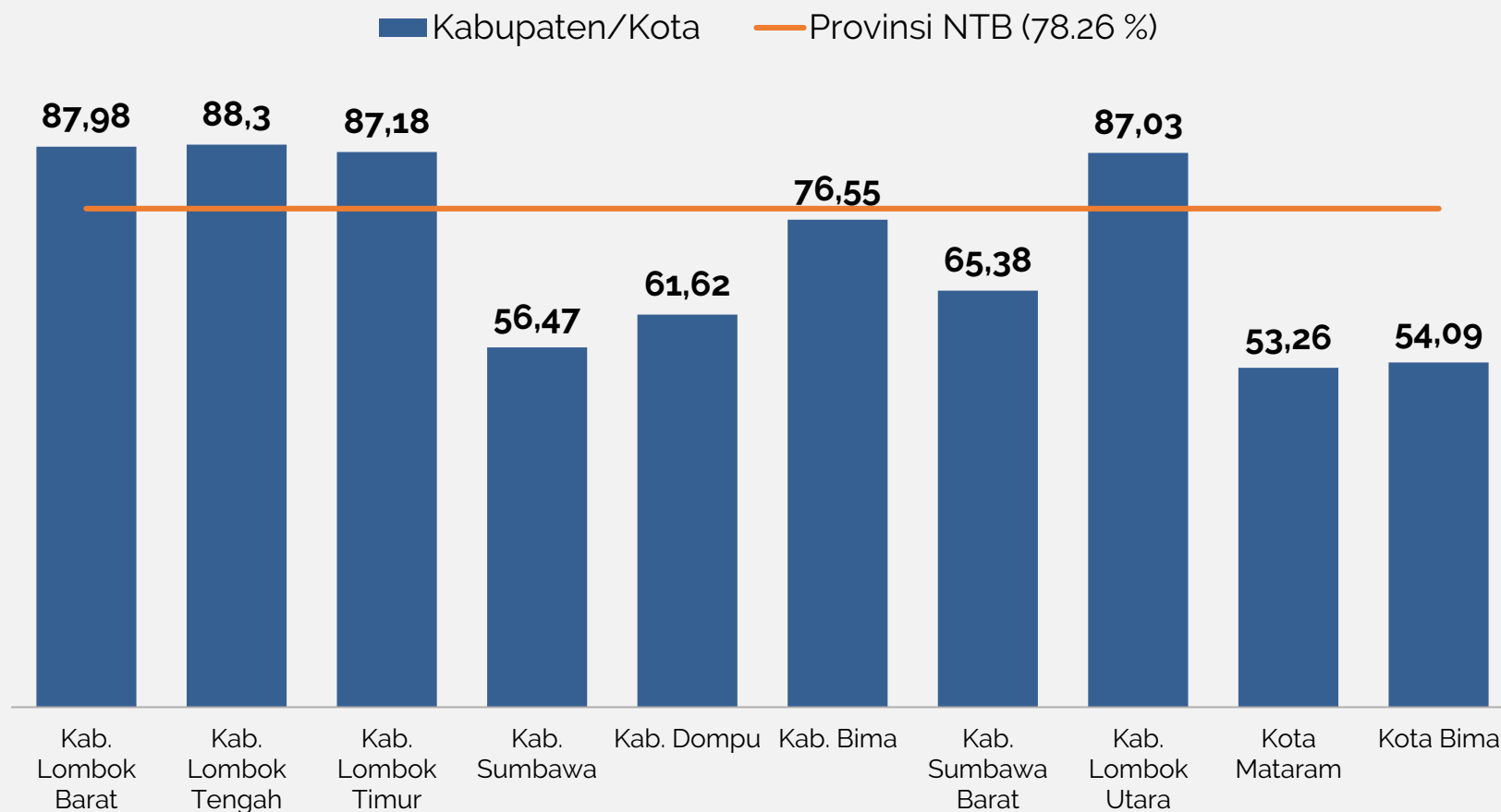
Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Infrastruktur Dasar dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015



Sumber: BPS , Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015 dan Kemenkeu RI (DJPK), grafik diolah

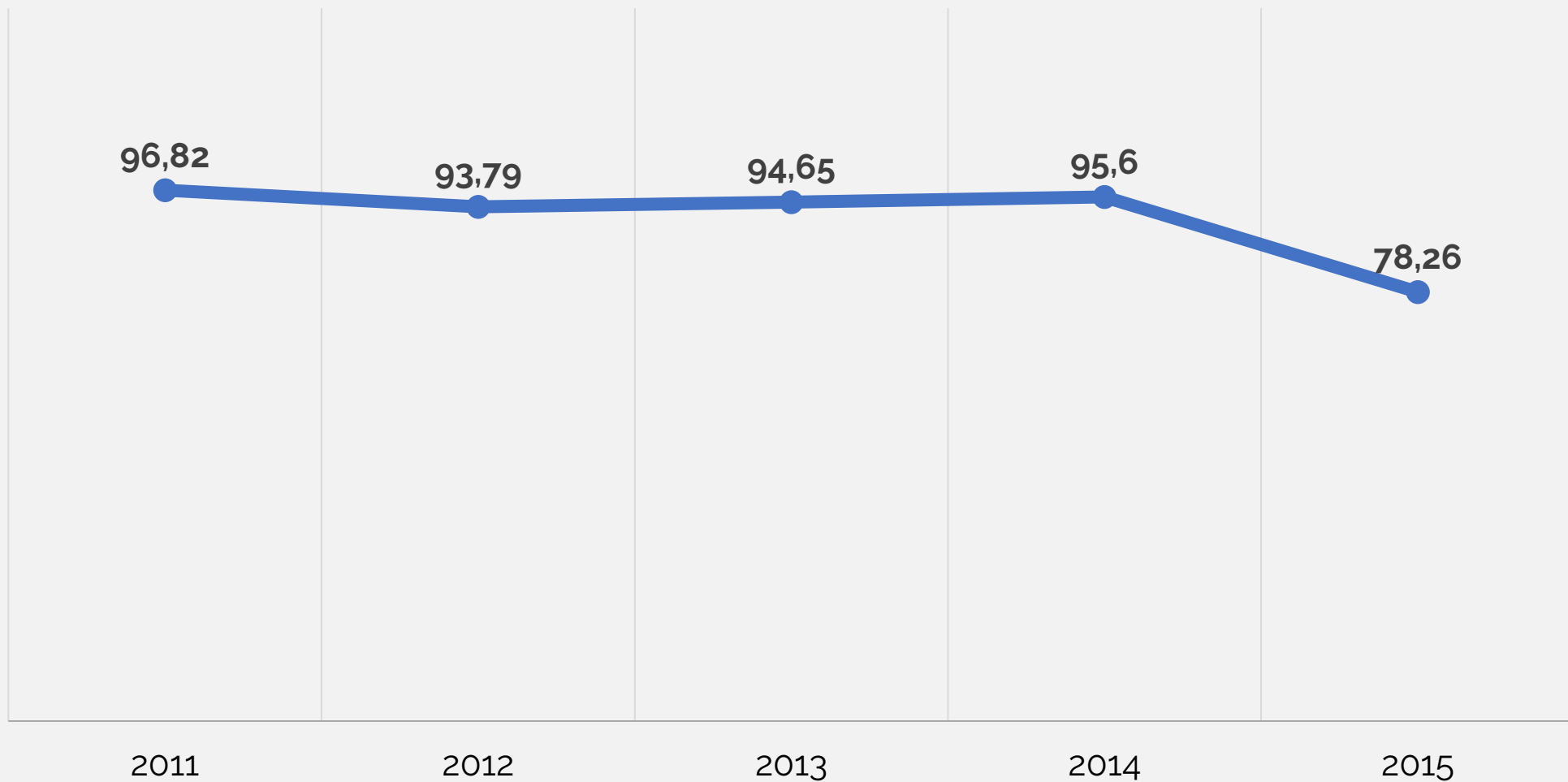
Raskin

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan RASKIN (%) Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota, 2015



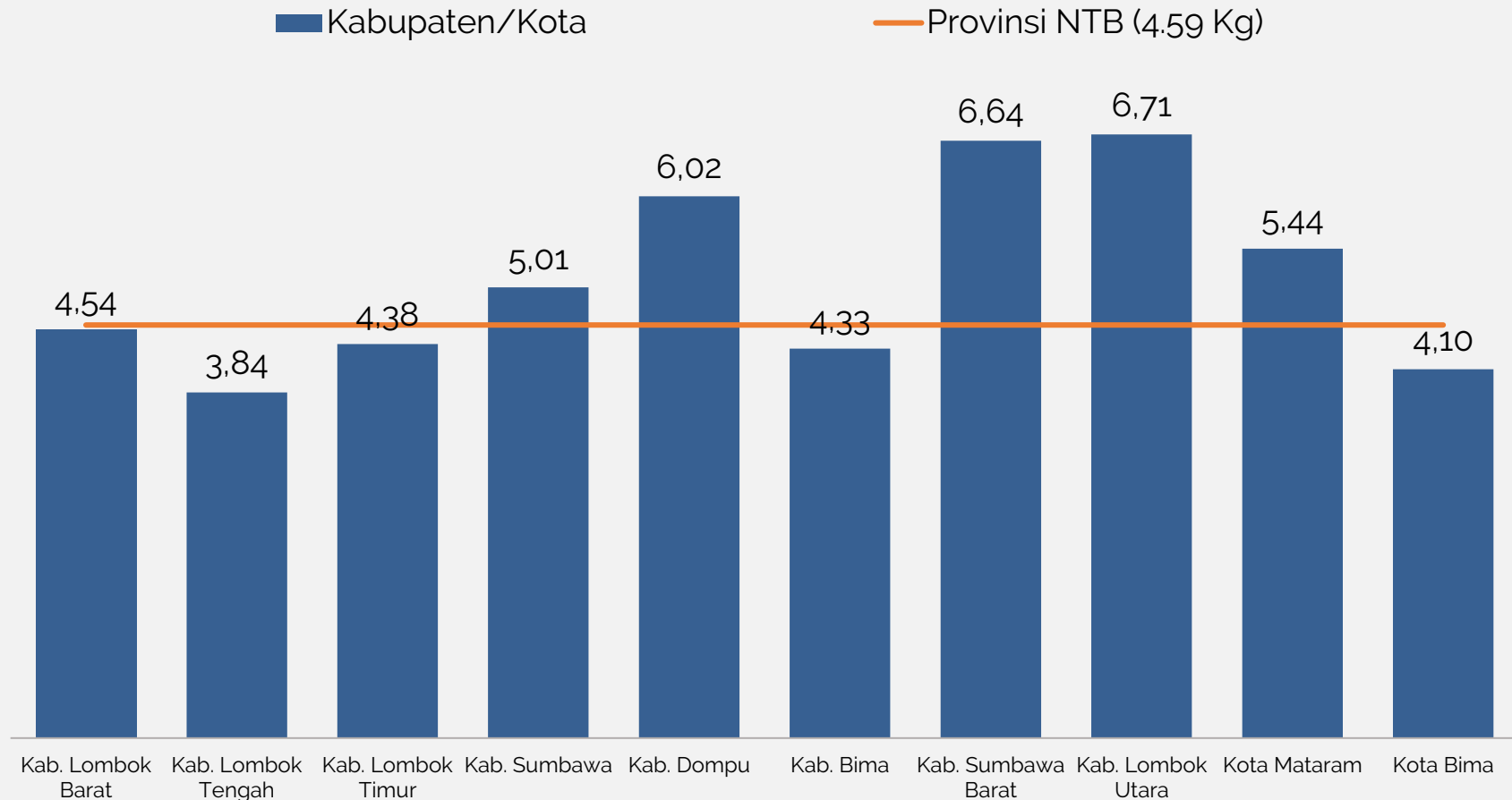
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, grafik diolah

Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan RASKIN (%) Provinsi NTB, 2011-2015



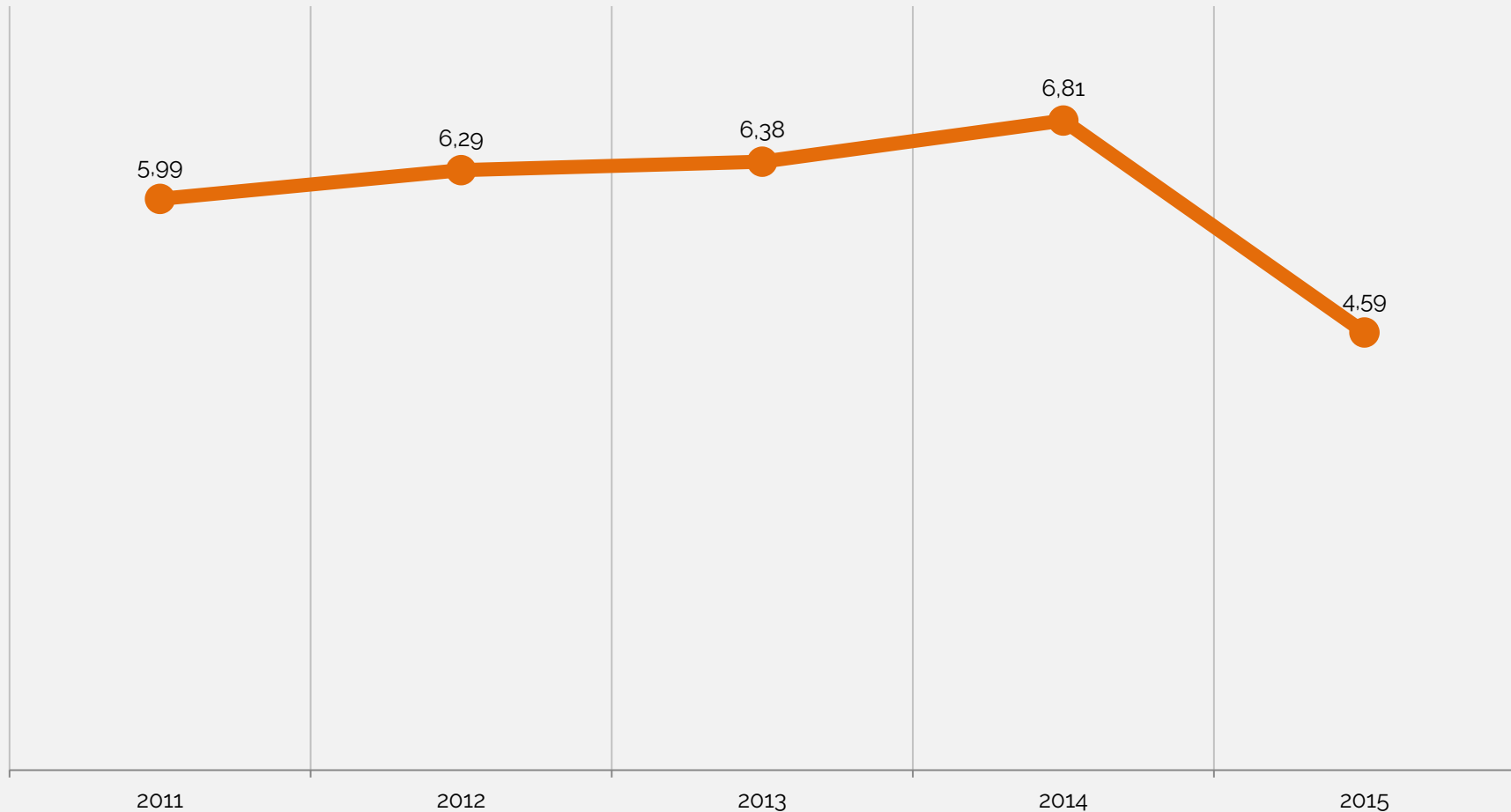
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2011-2015, grafik diolah

Rata-rata Jumlah Beras RASKIN yang Diterima (Kg) Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota, 2015



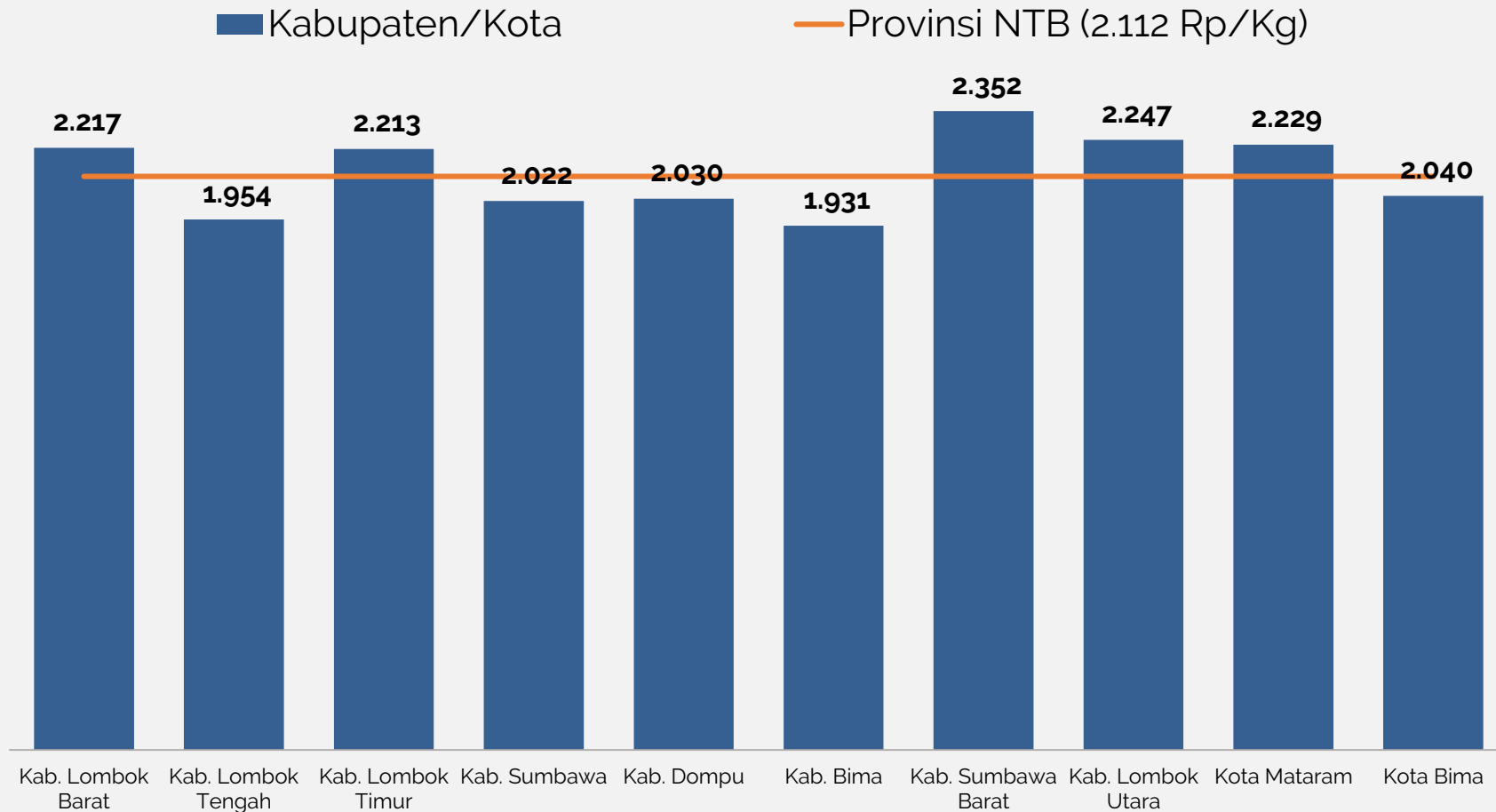
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, grafik diolah

Perkembangan Rata-rata Jumlah Beras RASKIN yang Diterima (kg) Provinsi NTB , 2011 - 2015



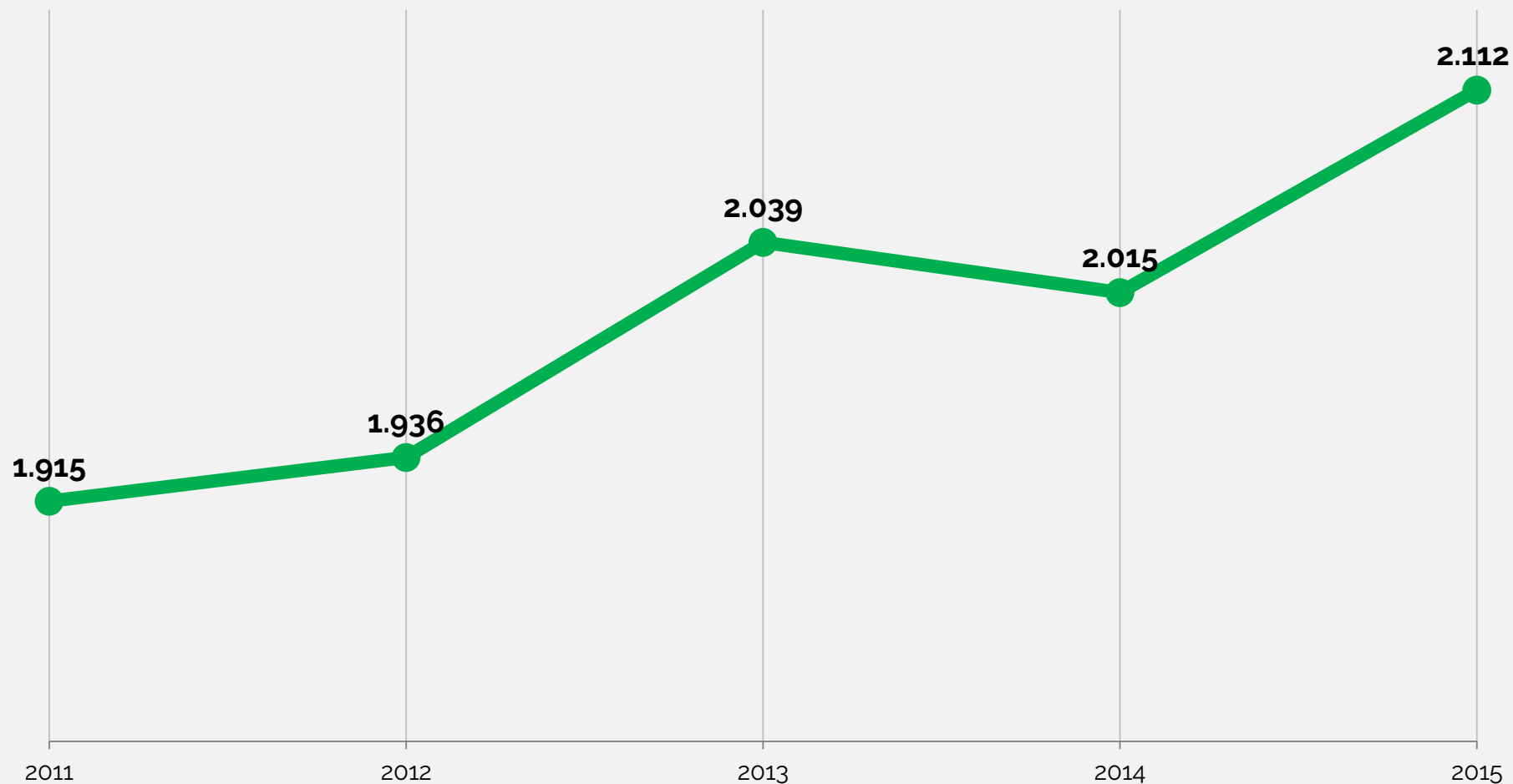
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2011-2015, grafik diolah

Rata-rata Harga Pembelian RASKIN (Rp/Kg) Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, grafik diolah

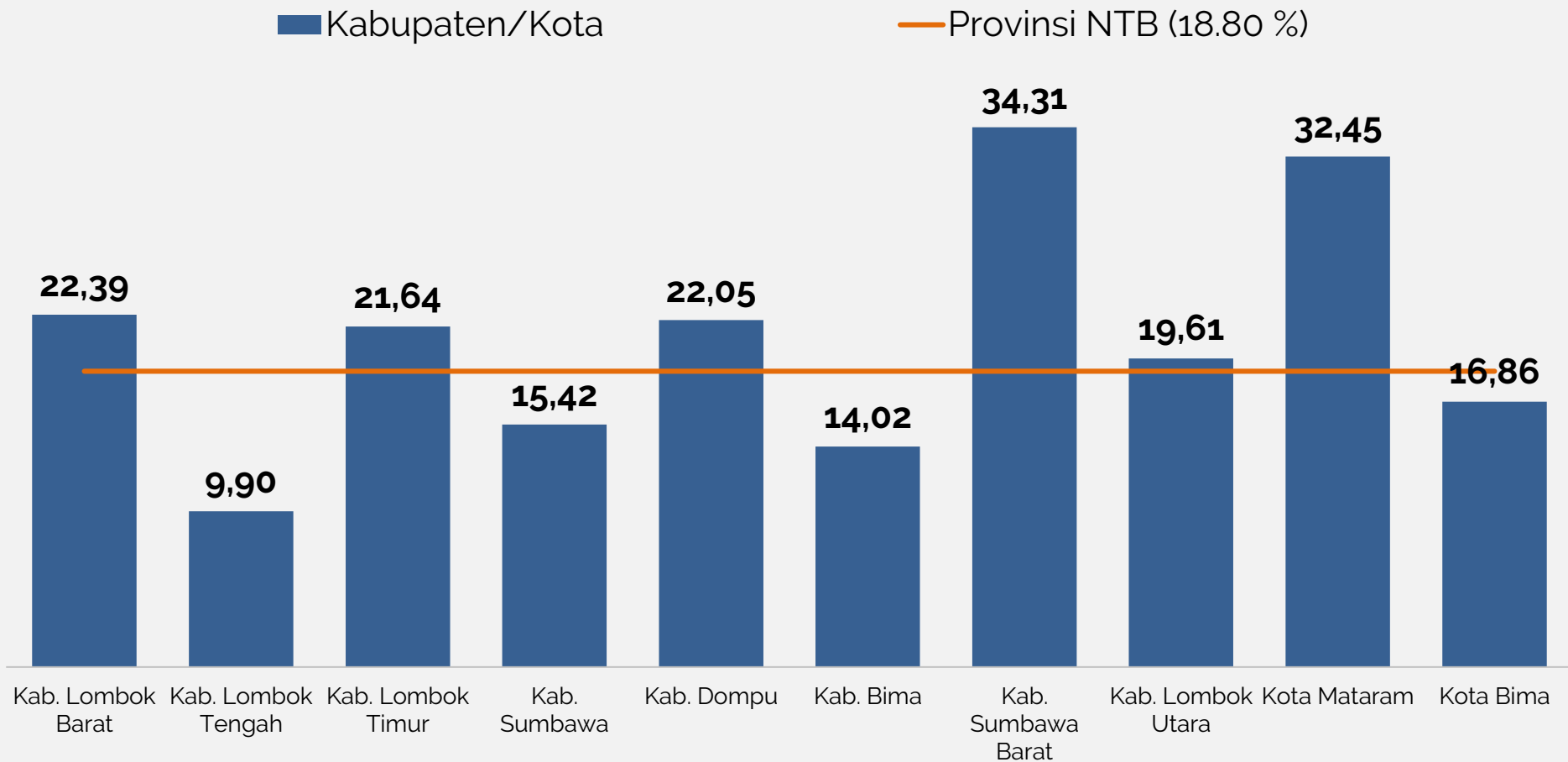
Perkembangan Rata-rata Harga Pembelian RASKIN (Rp/kg) Provinsi NTB, 2011 - 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2011-2015, grafik diolah

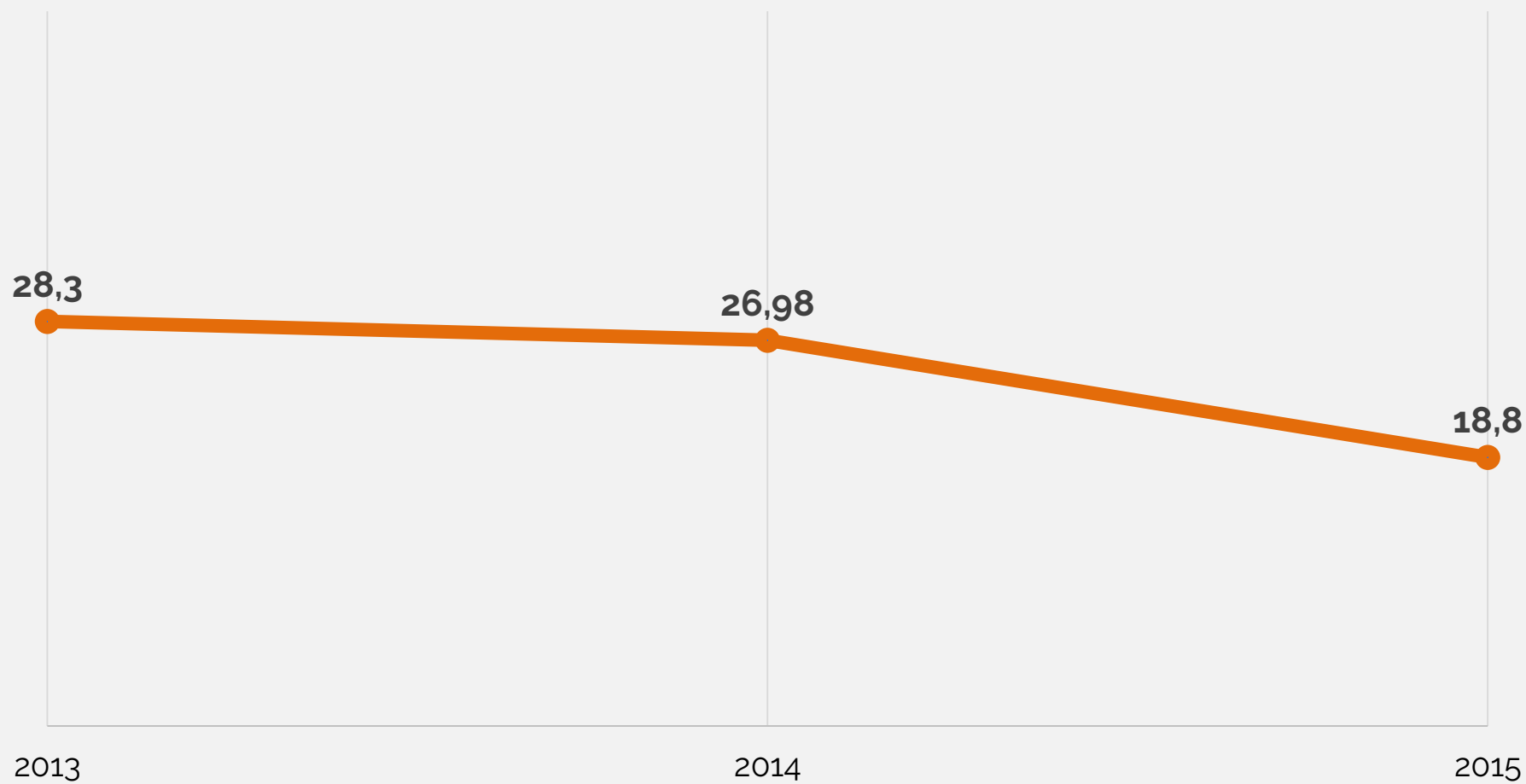
BSM SD/SMP

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan BSM SD/SMP (%) Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, grafik diolah

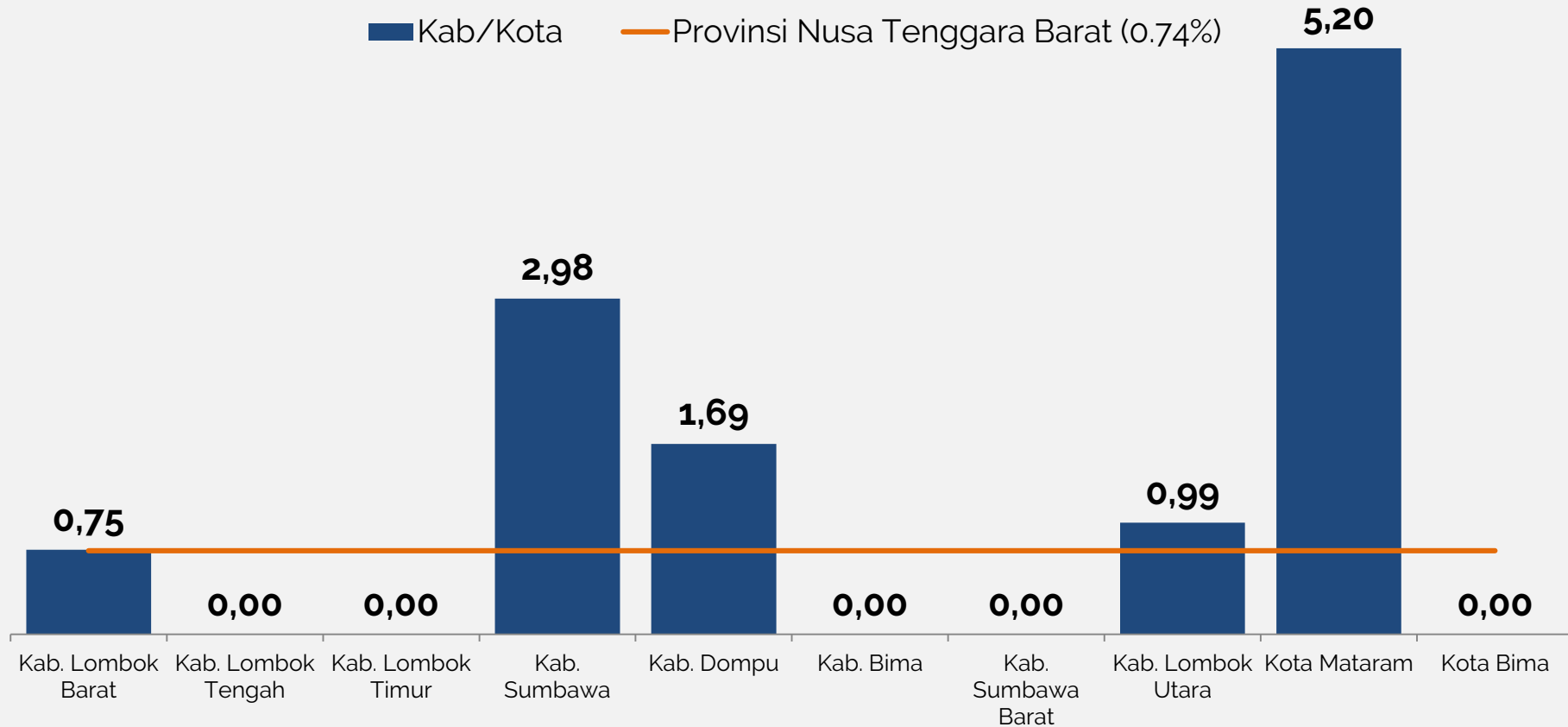
Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan BSM (%) Provinsi NTB, 2013-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013-2015, grafik diolah

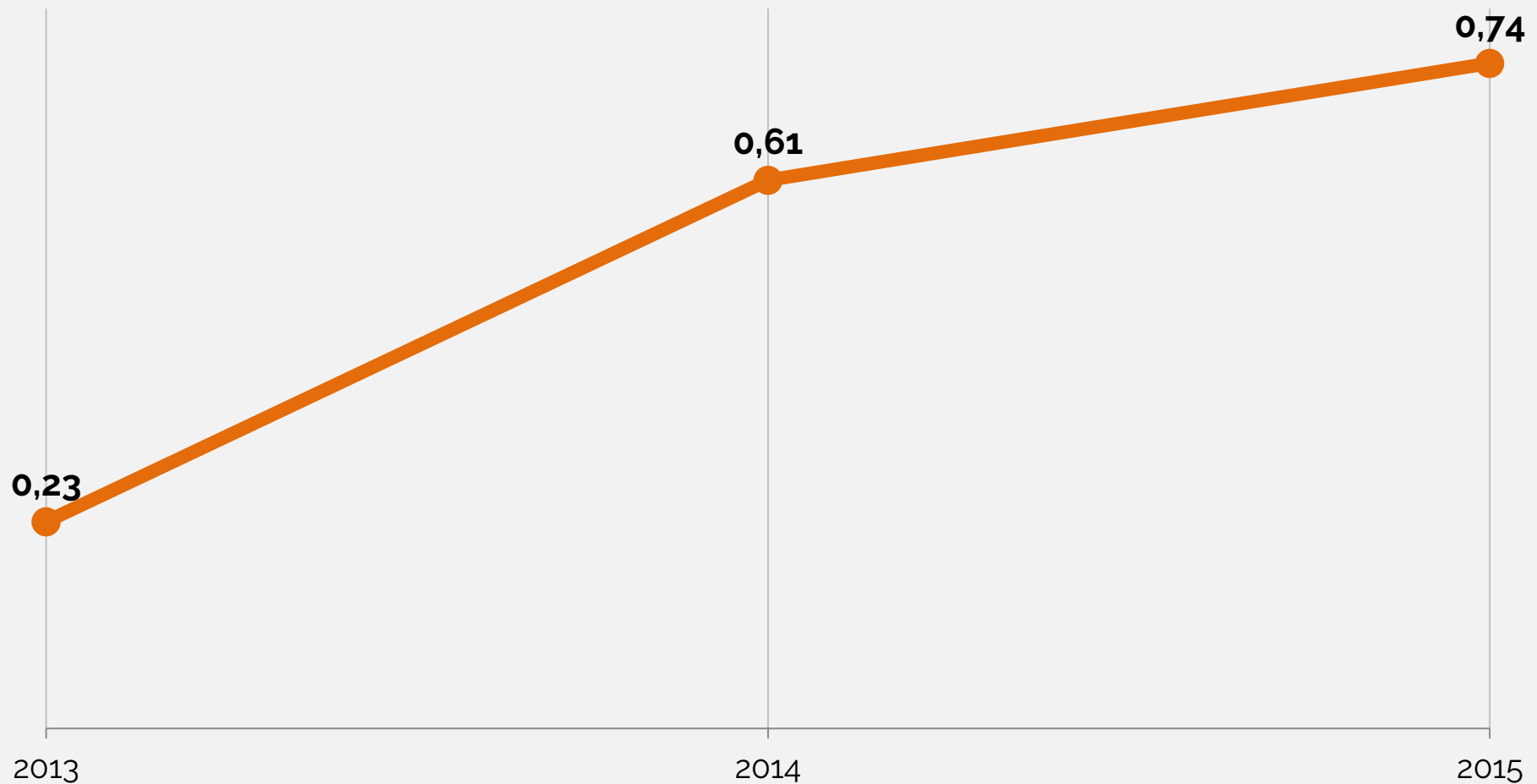
KUR

Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan Program KUR (%) Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, grafik diolah

Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan Program KUR (%) Provinsi NTB , 2013 - 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013-2015, grafik diolah

Penajaman Anggaran Belanja Berdasarkan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Pilot Project Pengembangan Model Advokasi Belanja Publik Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

TUJUAN

- Meningkatkan **relevansi** arah kebijakan, program dan alokasi APBD terhadap kebutuhan intervensi penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatkan **konsolidasi** belanja APBD-APBN; dan antar APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk penanggulangan kemiskinan.

WILAYAH PILOT:

Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Kabupaten Lombok Utara
- Kabupaten Dompu

STRATEGI

- Pengembangan **model analisis** belanja publik (APBD) untuk penanggulangan kemiskinan.
- Peningkatan **kapasitas** tim teknis TKPK dan TAPD.
- Penguatan **dukungan politik** pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD).
- Penguatan **kontrol masyarakat** melalui forum dan media massa lokal

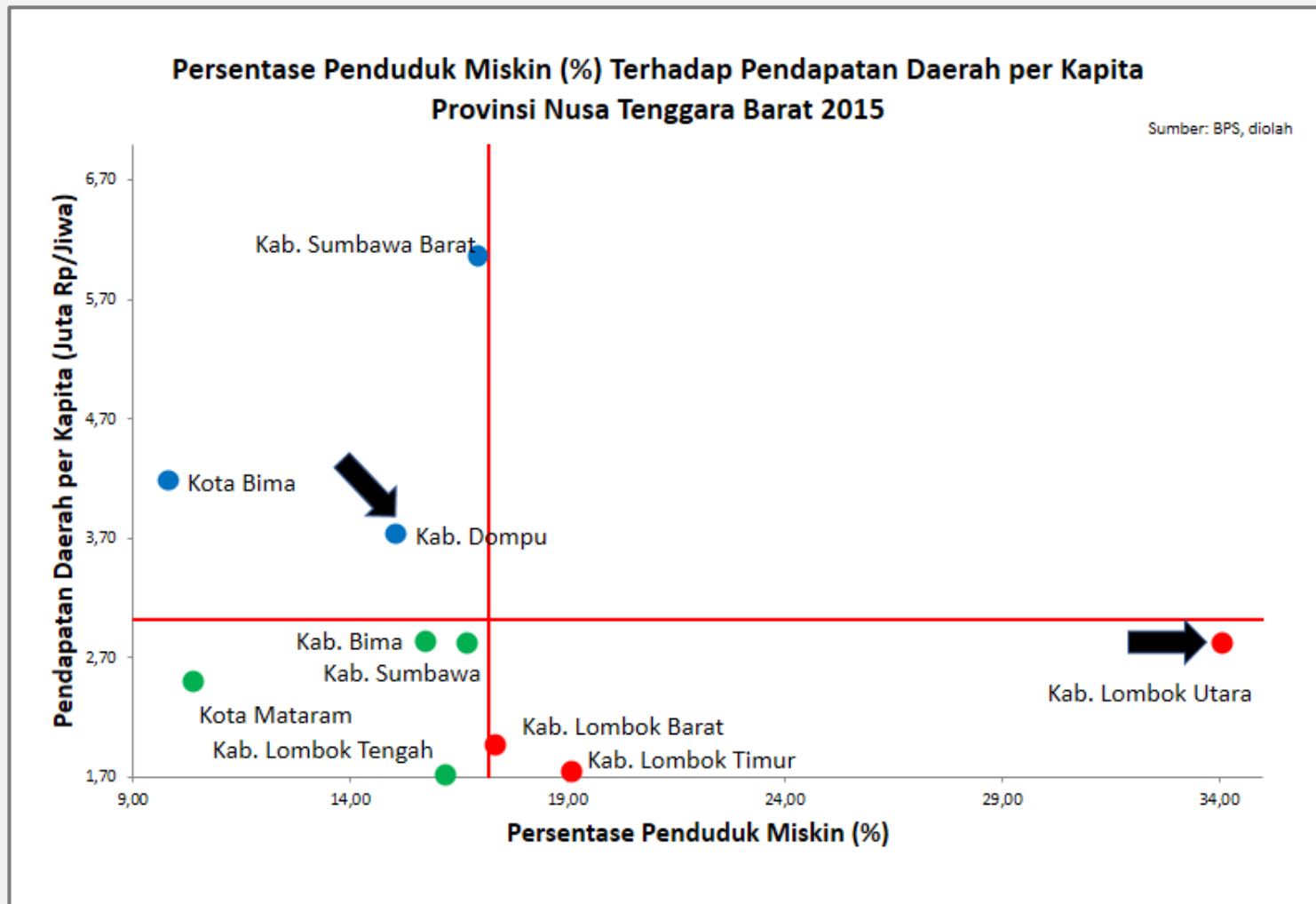
KEGIATAN

- **FGD** pemantapan substansi dan proses advokasi APBD
- Penyusunan **Buku Panduan** Advokasi Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan
- **TOT** Analisis Belanja Publik
- **Workshop** evaluasi APBD
- **Audiensi** kepada Kepala Daerah dan DPRD
- **Kampanye** media lokal
- Intervensi forum **Rakor** TKPK dan **Musrenbang**
- **Launching** Buku Panduan
- Advokasi **Permendagri** tentang Pedoman Penyusunan APBD

Modul Pelatihan Bagi TKPK | 2017

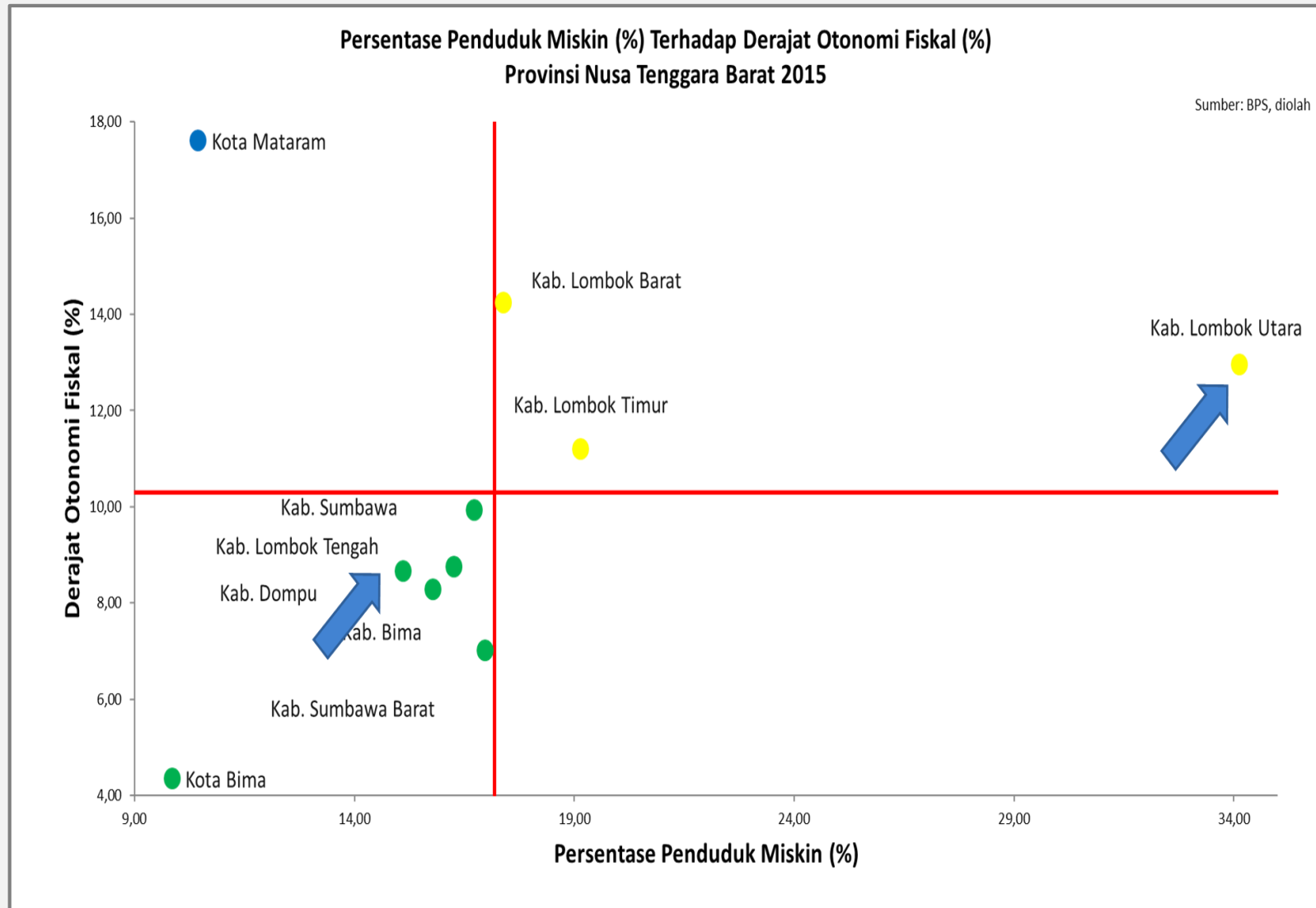
- **Kemiskinan dan potensi fiskal daerah**
 - Pendapatan daerah perkapita
(Pendapatan dalam APBD/jumlah penduduk)
 - Derajat otonomi fiskal (PAD/total pendapatan)
 - Ruang fiskal (total pendapatan APBD – belanja wajib – belanja pegawai)
- Menyusun *benchmark* analisis
- Menganalisis APBD
- Tindaklanjut oleh TKPK

Persentase Penduduk Miskin vs Pendapatan Daerah per Kapita



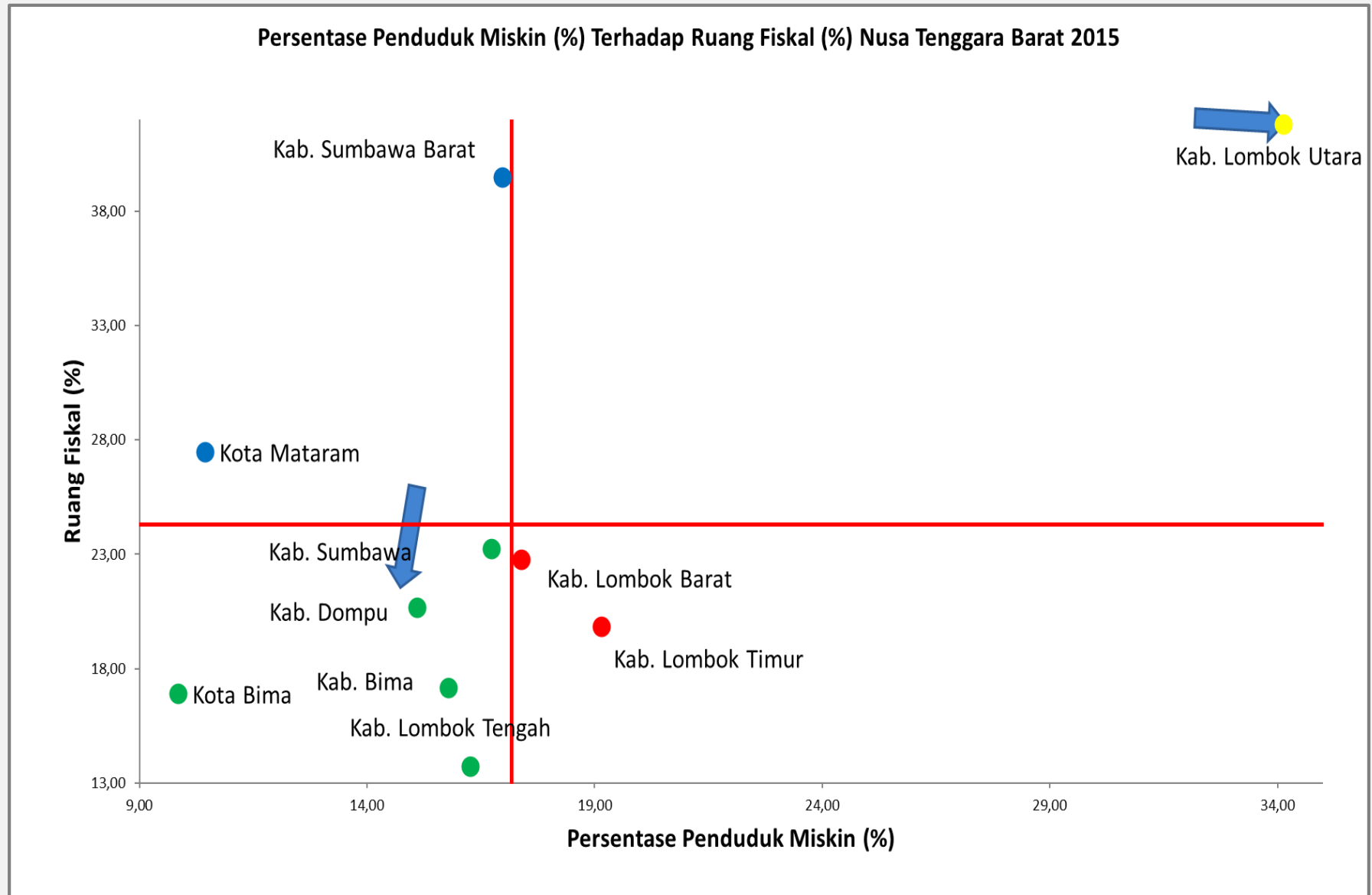
Pendapatan daerah per kapita ↑, peluang peningkatan kesejahteraan setiap penduduk ↑

Persentase Penduduk Miskin vs Derajat Otonomi Fiskal



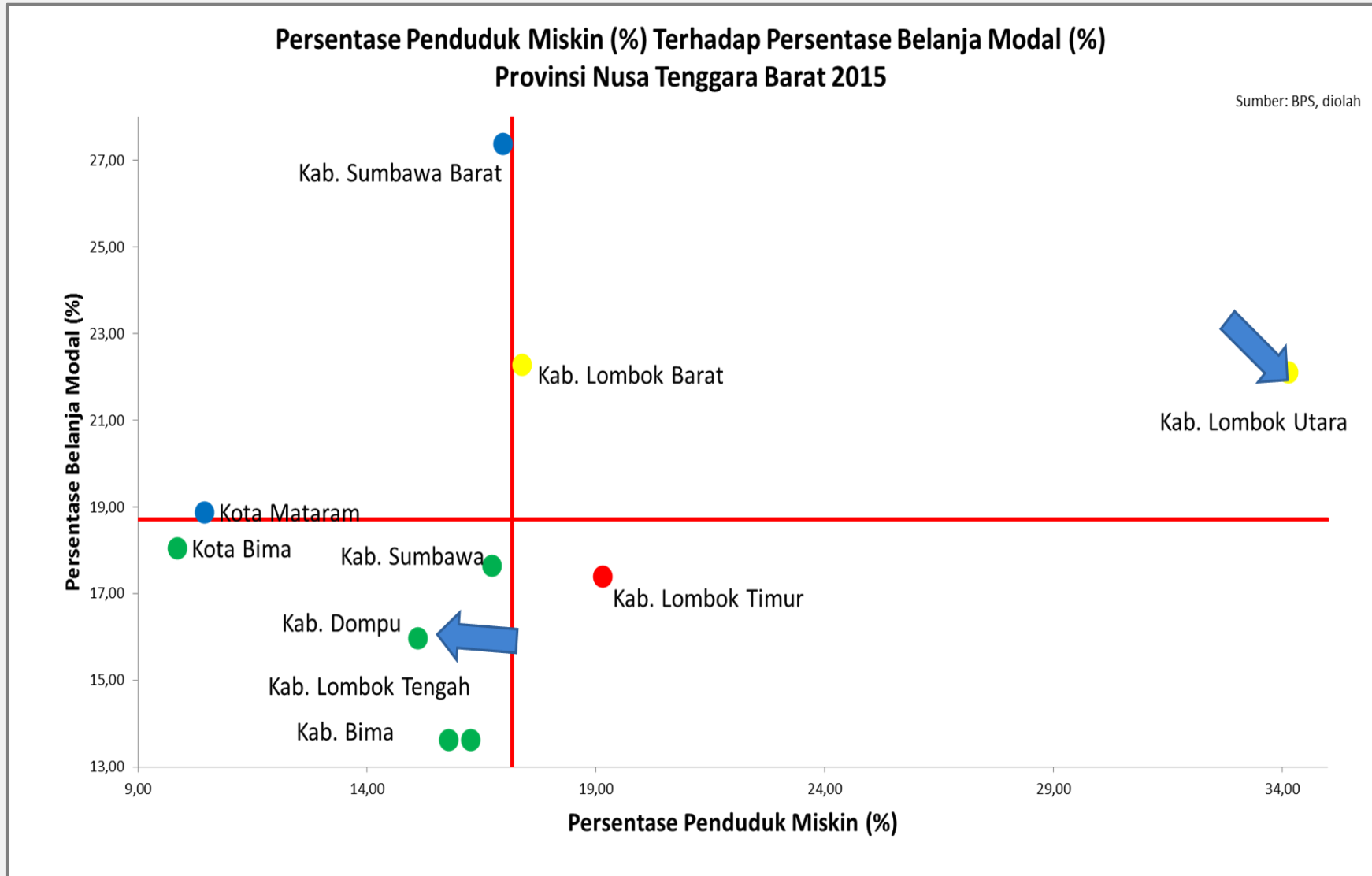
Derajat otonomi fiskal ↑, Ketergantungan terhadap transfer dari pusat ↓

Persentase Penduduk Miskin vs Ruang Fiskal



Ruang fiskal ↑, Diskresi untuk mendanai belanja prioritas ↑

Persentase Penduduk Miskin vs Belanja Modal

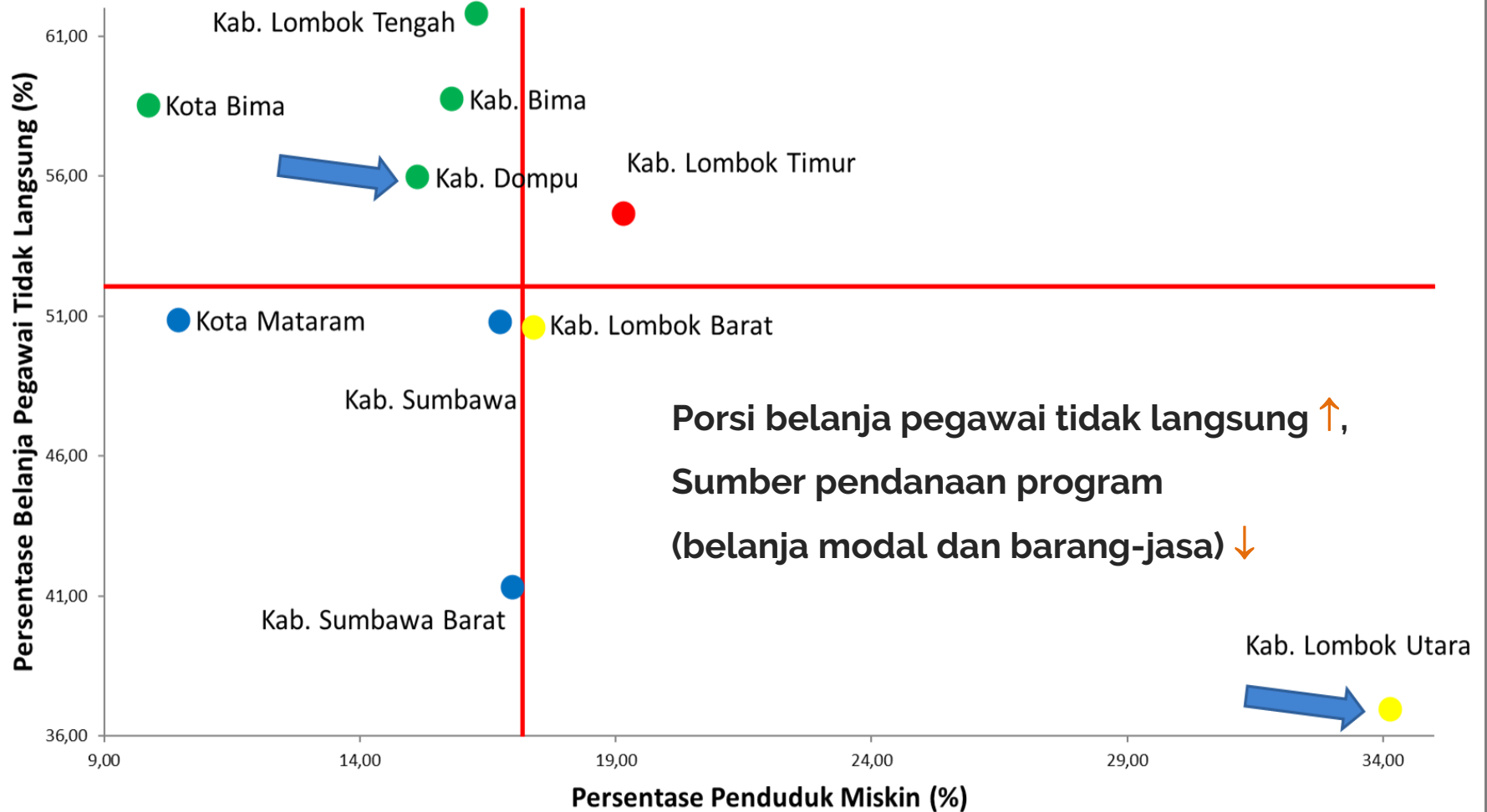


Porsi belanja modal ↑, Peluang pertumbuhan ekonomi ↑

Persentase Penduduk Miskin vs Belanja Pegawai Tidak Langsung

**Persentase Penduduk Miskin (%) Terhadap Persentase Belanja Pegawai Tidak Langsung (%)
Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015**

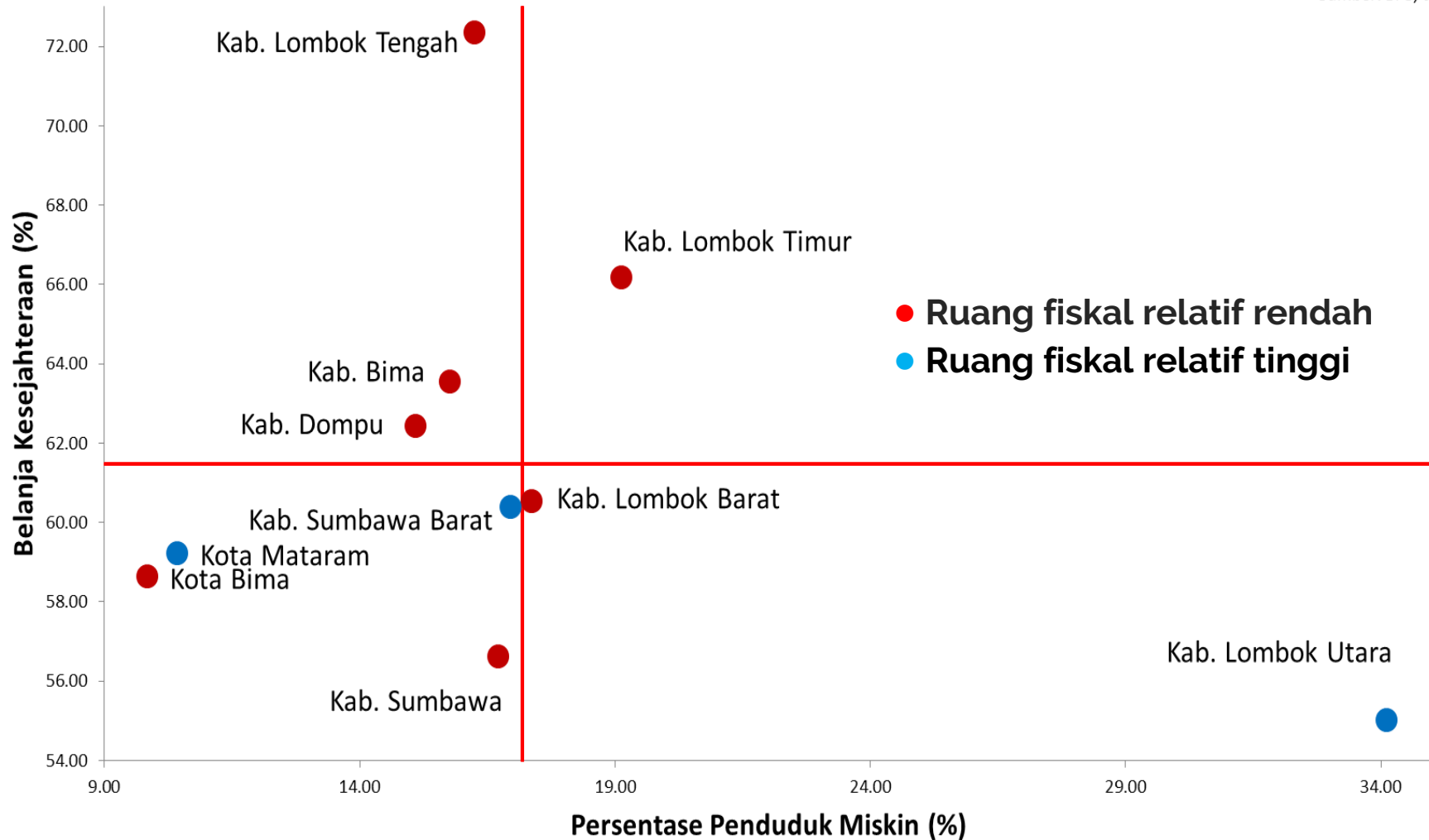
Sumber: BPS, diolah



Ruang Fiskal vs Belanja Kesejahteraan

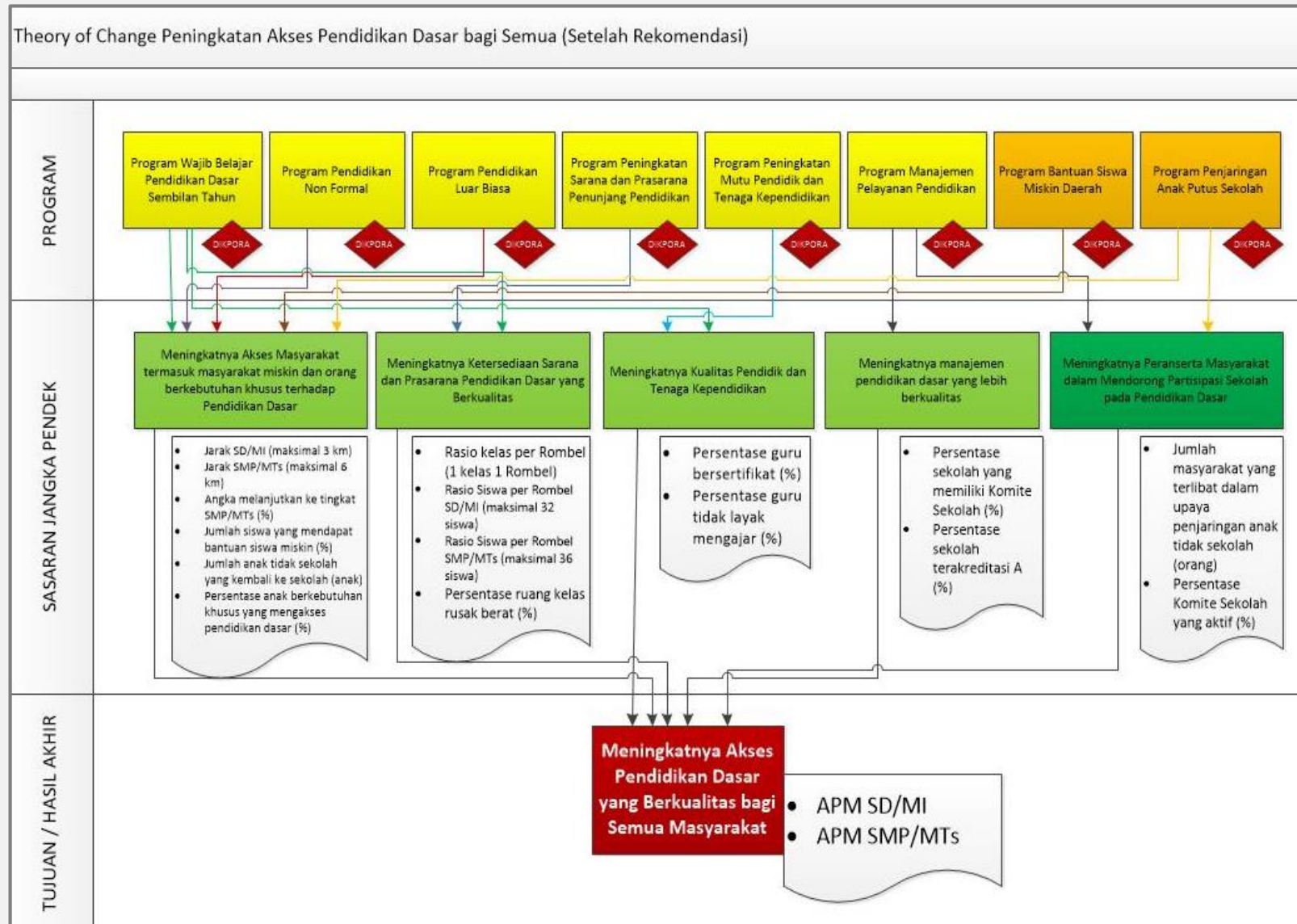
Persentase Penduduk Miskin (%) Terhadap Belanja Kesejahteraan (%)
vs Ruang Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015

Sumber: BPS, diolah

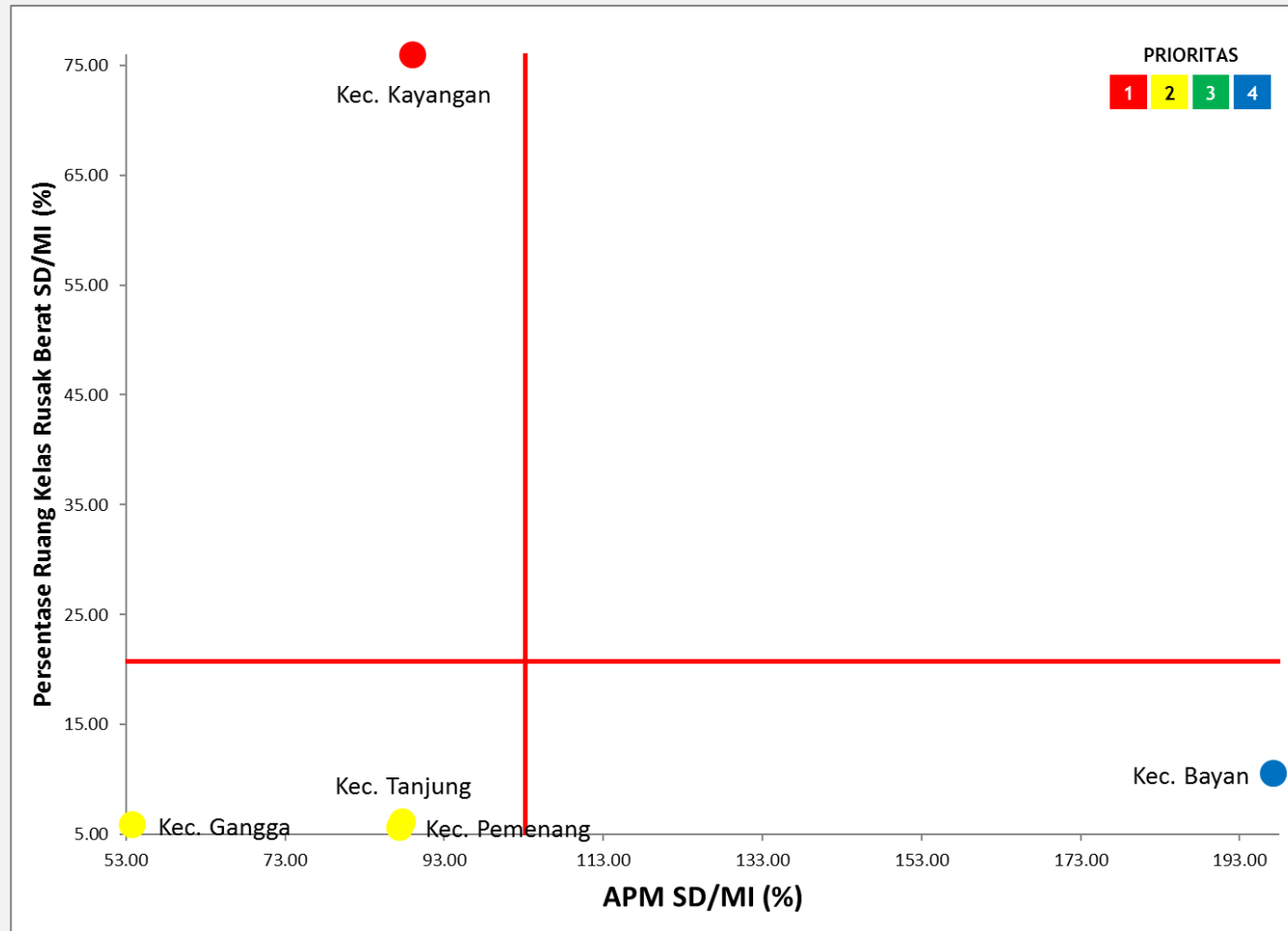


Logika Program (*Theory of Change*) Revisi

Theory of Change Peningkatan Akses Pendidikan Dasar bagi Semua (Setelah Rekomendasi)



Analisis Prioritas Wilayah



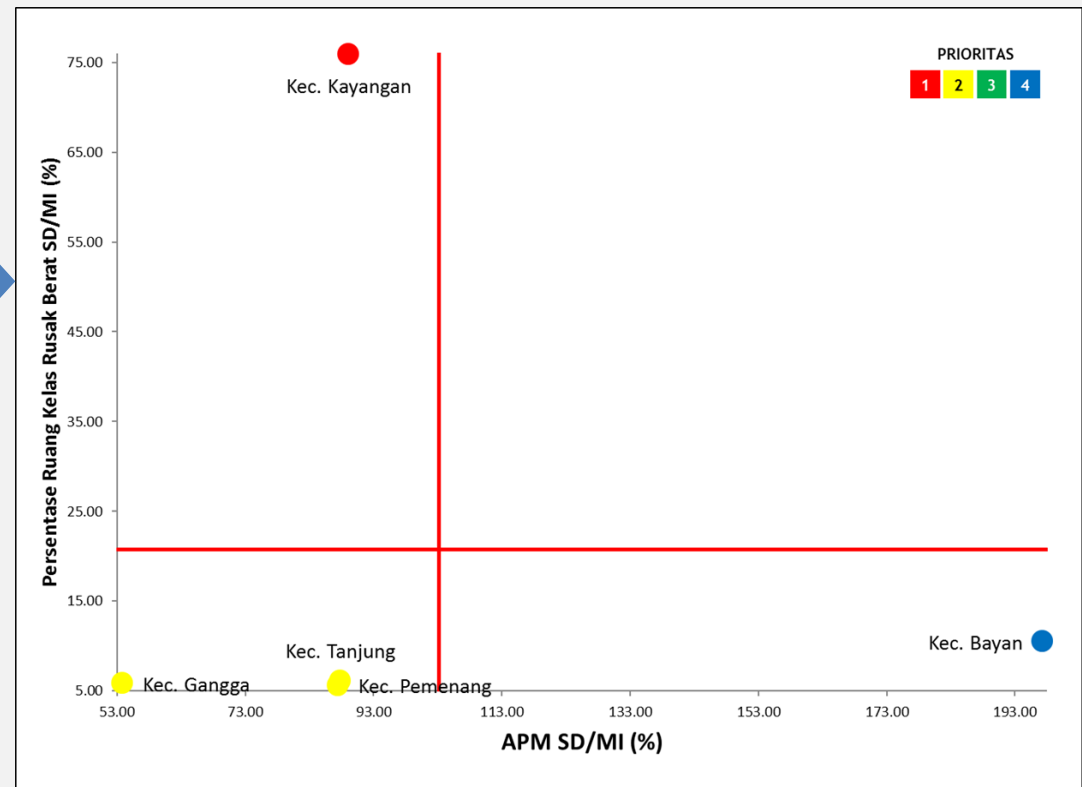
Prioritas Wilayah Perbaikan APM SD/MI melalui Rehab Ruang Kelas Rusak Berat, Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2014

Matching Lokasi Kegiatan dan Prioritas Wilayah

Realisasi Kegiatan Belanja Langsung Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tahun 2014

Kegiatan	Lokasi
Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah	
SDN NW Menggala	Kec. Bayan
SDN 4 Akar Akar	Kec. Bayan
SDN 3 Loloan	Kec. Bayan
SDI Soloh Rempek	Kec. Gangga
SDN 3 Bentek	Kec. Gangga
SDN 5 Gondang	Kec. Gangga
SDN 6 Ganggalang	Kec. Gangga
SDN 7 Ganggalang	Kec. Gangga
SDN 3 Rempek	Kec. Gangga
SDN 3 Gondang	Kec. Gangga
SDN 4 Gondang	Kec. Gangga
SDN 1 Rempek	Kec. Gangga
SDN 1 Dangiang	Kec. Kayangan
SDN 4 Santong	Kec. Kayangan
SDN 1 Salut	Kec. Kayangan
SDN 2 Salut	Kec. Kayangan
SDN 1 Selengen	Kec. Kayangan
SDN 1 Sesait	Kec. Kayangan
SDN 5 Pemenang Barat	Kec. Pemenang
SDN 4 Pemenang Timur	Kec. Pemenang
SDN 7 Pemenang Barat	Kec. Pemenang
SDN 1 Malaka	Kec. Pemenang
SDN 6 Tanjung	Kec. Tanjung
SDN 4 Jenggala	Kec. Tanjung
SDN 1 Tanjung	Kec. Tanjung
SDN 4 Tanjung	Kec. Tanjung
SDN 3 Tegal Maja	Kec. Tanjung
SDN 7 Sokong	Kec. Tanjung
SDN 5 Tanjung	Kec. Tanjung
SDN 1 Medana	Kec. Tanjung

Prioritas Wilayah Intervensi Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2014



Sumber: LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Note: Semestinya menggunakan DPPA SKPD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Terima kasih

